



GEMAH RIPAH LOH JINAWI

LAPORAN KINERJA

PEMERINTAH KOTA CIREBON

TAHUN

2024

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Cirebon Tahun 2024, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cirebon ini disusun dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban kinerja yang memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran yang menjadi suatu rekam jejak atas ikhtiar dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis sebagai mana tertuang pada tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cirebon Tahun 2024-2026. Berkenaan dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwasanya Laporan Kinerja ini juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Perwujudan kinerja pada tahun 2024 dilakukan dengan cukup adaptif dan *agile*, diantaranya sebagai tindak lanjut perkembangan dan dinamika kinerja di tahun berjalan, kami melakukan evaluasi pada target-target yang dinilai tidak relevan lagi di tahun 2024 diantaranya target yang telah tercapai di tahun 2023, kami rubah dan tingkatkan target tersebut di tahun 2024 yang kemudian diejawantahkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024. Melalui tahap adaptif dan *agile* tersebut, kinerja pada sasaran strategis di dorong untuk mewujudkan target-target yang optimis, dan terbukti upaya tersebut menghasilkan kinerja yang cukup optimal di berbagai sektor kendati kami pun menyadari masih terdapat beberapa kekurangan yang mesti menjadi focus perbaikan pada tahun berikutnya.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2024 ini bermanfaat serta menjadi bagian dalam gambaran pencapaian kinerja dalam LPPD serta dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat. Mudah-mudahan segala harapan tersebut mendapat ridho dan petunjuk dari Allah SWT, Amin.

Cirebon, 17 Maret 2025

WALI KOTA CIREBON



EFFENDI EDO, S.AP. M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI	III
DAFTAR GAMBAR	IV
DAFTAR TABEL.....	V
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum Kota Cirebon	3
1.2.1 Kondisi Geografis Daerah	3
1.2.2 Topografi	6
1.2.3 Geologi	9
1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Aparatur.....	10
1.4 Isu Strategis	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	22
2.1 Perencanaan Strategis	22
2.1.1 Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	22
2.1.2 Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah.....	29
2.1.3 Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	34
2.2. Prioritas Pembangunan Daerah 2024-2026.....	39
2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	44
2.4. Perjanjian Kinerja.....	46
2.5. Rencana Anggaran Tahun 2024	49
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	53
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024...	54
3.2. Pengukuran, Analisis, dan Evaluasi Pencapaian Kinerja.....	62
Tujuan 1: "Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat"	63
Tujuan 2: "Meningkatkan Potensi, Kapasitas dan Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi Daerah"	124
Tujuan 3: "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berwibawa"	139
3.3 Akuntabilitas Keuangan-Analisis, Efektivitas dan Efisiensi.....	172
3.3.1 Belanja Operasi	172
3.3.2 Belanja Modal	173
3.3.3 Belanja Tidak Terduga.....	174
3.4 Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran	176
3.5 Inovasi dan Prestasi	179
3.6 Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Peningkatan Implementasi SAKIP 2025	183
BAB IV PENUTUP	196

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kota Cirebon	5
Gambar 1. 2 Luas Wilayah Per Kecamatan di Kota Cirebon.....	6
Gambar 1. 3 Peta Jenis Tanah Kota Cirebon	10
Gambar 2. 1 Hubungan RPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya.....	30
Gambar 3. 1 Diagram realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama.....	61
Gambar 3. 2 Indeks Pembangunan Manusia Kota Cirebon Tahun 2024.....	64
Gambar 3. 3 IPM Kota Cirebon 2020-2024	65
Gambar 3. 4 Pemkot Cirebon di Tahun 2024 Fokus pada Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, dan Ekonomi Daerah	65
Gambar 3. 5 Tingkat Kemiskinan Kota Cirebon.....	67
Gambar 3. 6 Indeks Lingkungan Hidup Kota Cirebon 2018-2024.....	69
Gambar 3. 7 Penghargaan yang diterima Bank Sampah Mekar Berseri	69
Gambar 3. 8 RLS dan HLS 2021-2024 Kota Cirebon.....	72
Gambar 3. 9 Data Prevalensi Stunting 2014-2024	77
Gambar 3. 10 Data Skor Pola Pangan Harapan 2018-2024	79
Gambar 3. 11 Kota Cirebon Masuk Empat Besar Verifikasi Penilaian Lapangan Masyarakat Hidup Sehat	81
Gambar 3. 12 Data Pengeluaran Per kapita 2020-2024	84
Gambar 3. 13 Persentase OKP Terbina Tahun 2024.....	98
Gambar 3. 14 Kota Cirebon, Berhasil Meraih Penghargaan Program Kampung Iklim Kategori Madya	109
Gambar 3. 15 Sistem Informasi Ketengakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon	121
Gambar 3. 16 Aplikasi siap.kerja dan pendaftaran CPMI.....	122
Gambar 3. 17 Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri	130
Gambar 3. 18 Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan (ADHB)	131
Gambar 3. 19 Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan (ADHB)	132
Gambar 3. 20 Realisasi Investasi Kota Cirebon Capai Rp.1,97 Triliun dengan dominasi UMKM	138
Gambar 3. 21 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah	139
Gambar 3. 22 Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Cirebon tahun 2019- 2024	141
Gambar 3. 23 Indeks SPBE Kota Cirebon Tahun 2018-2024	144
Gambar 3. 24 Halaman dashboard sistem informasi E-SAKIP Kota Cirebon.....	150
Gambar 3. 25 Pemerintah Kota Cirebon meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-8 kali secara berturut-turut	151
Gambar 3. 26 Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Cirebon Tahun 2019-2024...	152
Gambar 3. 27 Dashboard Aplikasi DOLANBAE	155
Gambar 3. 28 Doa Bersama dan Deklarasi Damai, Kota Cirebon Komitmen Jaga Pilkada yang Aman dan Kondusif.....	169

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Luas Wilayah Berdasarkan Kelurahan Kota Cirebon	4
Tabel 1. 2 Banyaknya Kelurahan, RW dan RT Menurut Kecamatan di Kota Cirebon Tahun 2020	5
Tabel 1. 3 Ketinggian Wilayah Diatas Permukaan Laut Menurut Kecamatan di Kota Cirebon	7
Tabel 1. 4 Kemiringan Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Cirebon	7
Tabel 1. 5 Isu Internasional, Isu Nasional, Isu Provinsi Jawa Barat serta Isu Strategis Kota Cirebon.....	20
Tabel 2. 1 Integrasi Prioritas Pembangunan Kota Cirebon dengan Program Nomenklatur PMDN No. 90 Tahun 2019	40
Tabel 3. 1 Tabel Predikat Capaian Kinerja Berdasar Kode Warna	54
Tabel 3. 2 Tabel Predikat Capaian Kinerja	54
Tabel 3. 3 Capaian Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2024.....	55
Tabel 3. 4 Capaian Kinerja Tujuan 1 "Meningkatnya kualitas hidup masyarakat" Tahun 2024	63
Tabel 3. 5 Faktor Pendukung, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Tujuan 1 Indikator 1 ""Indeks Pembangunan Manusia Kota Cirebon"	66
Tabel 3. 6 Faktor Pendukung, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah...68	68
Tabel 3. 7 Faktor Pendukung, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Tujuan 1 Indikator 3 "Indeks Lingkungan Hidup Kota Cirebon".....	70
Tabel 3. 8 Capaian Sasaran 1.1 "Meningkatnya kualitas Pendidikan dan literasi masyarakat" Tahun 2024.....	71
Tabel 3. 9 Capaian Realisasi Anggaran program pendukung sasaran 1.1	73
Tabel 3. 10 Faktor Pendukung, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 1.1. ""Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi masyarakat".....	74
Tabel 3. 11 Capaian Sasaran 1.2 "Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi Masyarakat" Tahun 2024	75
Tabel 3. 12 Perkembangan Usia Harapan Hidup 2014-2024	76
Tabel 3. 13 Capaian Realisasi Program Anggaran Pendukung Sasaran 1.2.....	80
Tabel 3. 14 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 1.2 "Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi Masyarakat" Tahun 2024	82
Tabel 3. 15 Capaian Sasaran 1.3 "Meningkatnya Kemampuan Masyarakat dalam Pemenuhan Kebutuhan Hidup" Tahun 2024	83
Tabel 3. 16 Data Target Dan Realisasi Penerima Bantuan Sosial Kota Cirebon Tahun 2024	86
Tabel 3. 17 Capaian Sasaran 1.4 "Terkendalinya jumlah penduduk" Tahun 2024	88
Tabel 3. 18 Capaian Realisasi Anggaran Sasaran 1.4 "Laju Pertumbuhan Penduduk"	90
Tabel 3. 19 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 1.4 "Laju Pertumbuhan Penduduk" Tahun 2024.....	91
Tabel 3. 20 Capaian Sasaran 1.5 "Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Olahraga"	91
Tabel 3. 21 Daftar Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Kota Cirebon	94
Tabel 3. 22 Persentase Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Terbina Tahun 2024.....	97
Tabel 3. 23 Capaian Realisasi Anggaran Program pendukung	98

Tabel 3. 24 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah ..99	
Tabel 3. 25 Capaian Sasaran 1.6 “Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan dan Perlindungan Anak” Tahun 2024	100
Tabel 3. 26 Hasil Evaluasi Skor Kota Layak Anak Kota Cirebon Tahun 2024	102
Tabel 3. 27 capaian realisasi anggaran program pendukung sasaran 1.6.....	104
Tabel 3. 28 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 1.6 “Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan dan Perlindungan Anak”	105
Tabel 3. 29 Capaian Sasaran 1.7 “Menurunnya Dampak Perubahan Iklim” Tahun 2024	106
Tabel 3. 30 Kontribusi Capaian Penurunan Emisi GRK Kota Cirebon Tahun 2019-2024	108
Tabel 3. 31 Key Category Analysis (KCA) Kota Cirebon Tahun 2023	109
Tabel 3. 32 Capaian Anggaran Program pendukung sasaran 1.7	110
Tabel 3. 33 Capaian Sasaran 1.8 “Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal” Tahun 2024	113
Tabel 3. 34 Rekap Data Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang Dilestarikan	114
Tabel 3. 35 Data Cagar Budaya Yang Dimanfaatkan Tahun 2024	115
Tabel 3. 36 Capaian Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1.8.....	119
Tabel 3. 37 Capaian Sasaran 1.9 “Menurunnya tingkat pengangguran terbuka” Tahun 2024	120
Tabel 3. 38 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka antara Kota Cirebon dengan regional Jawa Barat.....	120
Tabel 3. 39 Perkembangan TPT Kota Cirebon dalam 5 Tahun Terakhir	122
Tabel 3. 40 Capaian Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1.9.....	123
Tabel 3. 41 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 1.9 “Menurunnya tingkat Pengangguran Terbuka” Tahun 2024	123
Tabel 3. 42 Tujuan Meningkatkan Potensi, Kapasitas dan Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi Daerah	124
Tabel 3. 43 Perbandingan Target RPD Provinsi Jawa Barat dan Kota Cirebon 2024-2026	126
Tabel 3. 44 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Tujuan 2	127
Tabel 3. 45	128
Tabel 3. 46 Capaian Sasaran 2.2 “Meningkatnya investasi penanaman modal” Tahun 2024	136
Tabel 3. 47 Nilai Pertumbuhan Kumulatif Kota Cirebon dalam 10 Tahun Terakhir	137
Tabel 3. 48 Capaian Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2.2.....	138
Tabel 3. 49 Capaian Kinerja Tujuan 3 “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berwibawa” Tahun 2024.....	140
Tabel 3. 50 Rincian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Cirebon 2024	141
Tabel 3. 51 Capaian Sasaran 2.2 “Meningkatnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik” Tahun 2024	143
Tabel 3. 52 Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3.1	144
Tabel 3. 53 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran sasaran 3.1 “Meningkatnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik”	145

Tabel 3. 54 Capaian Sasaran 3.2 "Meningkatnya tindak lanjut hasil kelitbangan dan inovasi daerah" Tahun 2024	145
Tabel 3. 55 Realisasi Program Anggaran yang mendukung sasaran 3,2	147
Tabel 3. 56 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 3.2 "Meningkatnya Penerapan Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah"	147
Tabel 3. 57 Capaian Sasaran 3.3 "Meningkatnya dukungan penyelenggaraan pemerintahan"	148
Tabel 3. 58 Perbandingan Nilai Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 dan Tahun 2024	149
Tabel 3. 59 Hasil Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada	153
Tabel 3. 60 Capaian Realisasi Anggaran Program Pendukung Capaian Sasaran 3.3 "Meningkatnya dukungan penyelenggaraan pemerintahan"	156
Tabel 3. 61 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 3.3 "Meningkatnya dukungan penyelenggaraan pemerintahan"	157
Tabel 3. 62 Capaian Sasaran 3.4 "Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kewilayahan dan Pemberdayaan Masyarakat" Tahun 2024.....	160
Tabel 3. 63 Klasifikasi Tingkat Perkembangan Kelurahan pada Setiap Kecamatan.....	160
Tabel 3. 64 Klasifikasi Swakarya / Swasembada pada Setiap Kelurahan Kota Cirebon.161	
Tabel 3. 65 Capaian Realisasi Anggaran Program pendukung sasaran 3.4"Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kewilayahan dan Pemberdayaan Masyarakat"	162
Tabel 3. 66 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 3.4 "Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kewilayahan dan Pemberdayaan Masyarakat".....	163
Tabel 3. 67 Capaian Sasaran 3.5 "Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Stabilitas Politik Daerah" Tahun 2024	164
Tabel 3. 68 Jumlah daerah rawan peredaran minuman beralkohol di Kota Cirebon.....	167
Tabel 3. 69 Capaian Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3.5 "Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Stabilitas Politik Daerah"	170
Tabel 3. 70 Faktor Pendukung, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 3.5.....	171
Tabel 3. 71 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2024	172
Tabel 3. 72 Target dan Realisasi Belanja Operasi Kota Cirebon Tahun Anggaran 2024	172
Tabel 3. 73 Target dan Realisasi Belanja Modal Kota Cirebon Tahun Anggaran 2024 .	173
Tabel 3. 74 Data Analisis Efisiensi Pencapaian Kinerja dan Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) Tahun 2024	176
Tabel 3. 75 Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Cirebon.....	184
Tabel 3. 76 Rencana Aksi Peningkatan Implementasi SAKIP Tahun 2025 Pemerintah Kota Cirebon.....	185
Tabel 4. 1 Rekapitulasi Predikat Pencapaian Kinerja Seluruh Indikator pada Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2024.....	198



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan gambaran akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah kepada publik berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengamanatkan pada setiap instansi pemerintah untuk menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara operasional, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki peran strategis dalam mekanisme pelaporan kinerja instansi pemerintah daerah. Dokumen ini menjadi bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, dokumen ini menjadi bahan evaluasi pencapaian kinerja. Di era transparansi dan tuntutan publik

terhadap kinerja instansi pemerintah, keberadaan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi bagian dari kerangka pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan demikian, hal yang terpenting dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah mekanisme pengukuran kinerja, evaluasi, dan pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pemerintah daerah mendapatkan ruang kewenangan untuk mengelola berbagai sumber daya yang tersedia. Dalam bingkai sistem pemerintahan nasional, Pemerintah Kota Cirebon mendapatkan delegasi untuk menyelenggarakan berbagai kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Merujuk pada Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon terdiri dari:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Bidang Sosial.
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi Bidang Tenaga Kerja, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Bidang Pangan, Bidang Pertanahan, Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bidang Perhubungan, Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Penanaman Modal, Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Bidang Statistik, Bidang Persandian, Bidang Kebudayaan, Bidang Perpustakaan, Bidang Kearsipan.
3. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi Pembagian Urusan Bidang kelautan dan Perikanan, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Cirebon berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas eksternal dan internal sesuai dengan dinamika pembangunan dan tuntutan masyarakat. Berbekal berbagai target kinerja sebagaimana telah diformulasikan dalam indikator kinerja pencapaian visi dan misi daerah, Pemerintah Daerah Kota Cirebon bertekad untuk menyampaikan informasi capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan kepada masyarakat pada umumnya dan warga Kota Cirebon pada khususnya secara baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Cirebon Tahun 2024 ini memberikan gambaran dan menjelaskan secara utuh dan komprehensif pembangunan maupun pelaksanaan target-target kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2024 sekaligus juga menggambarkan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon selama tahun 2024.

Pelaksanaan pembangunan pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 merupakan tahun pertama dari yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2024-2026, sehingga dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dideskripsikan apa saja yang sudah dilakukan dalam mencapai tujuan yang direncanakan dan juga permasalahan-permasalahan dalam proses pembangunan di Kota Cirebon pada tahun 2024.



1.2 Gambaran Umum Kota Cirebon

1.2.1 Kondisi Geografis Daerah

Secara geografis, Kota Cirebon berada pada posisi 6,42° Lintang Selatan dan 108,33° bujur Timur pada Pantai Utara Pulau Jawa Bagian Barat. Bentuk wilayah Kota Cirebon memanjang dari Barat ke Timur sekitar 8 kilometer dan dari Utara ke Selatan sekitar 11 kilometer dengan ketinggian dari permukaan laut \pm 5 meter. Kota ini terletak di bagian timur Provinsi Jawa Barat dan berada pada jalur utama lintas pantura. Berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021, luas wilayah administratif Kota Cirebon adalah 39,44 km² atau sekitar 3.944 hektar dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sungai Kedung Pane
- Sebelah Barat : Sungai Banjir Kanal/Kabupaten Cirebon
- Sebelah Selatan : Sungai Kalijaga
- Sebelah Timur : Laut Jawa

Tabel 1. 1
Luas Wilayah Berdasarkan Kelurahan Kota Cirebon

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (Ha) (Perhitungan Pemetaan)
1	Harjamukti	Argasunya	684,18
		Kalijaga	422,95
		Harjamukti	234,67
		Kecapi	229,65
		Larangan	190,51
2	Lemahwungkuk	Pegambiran ^{*)}	442,93
		Kesepuhan ^{*)}	75,34
		Lemahwungkuk ^{*)}	63,73
		Panjunan ^{*)}	134,13
3	Pekalipan	Jagastru	35,37
		Pulasaren	31,37
		Pekalipan	42,61
		Pekalangan	49,33
4	Kesambi	Karyamulya	318,73
		Sunyaragi	226,76
		Drajat	93,52
		Kesambi	100,72
		Pekiringan	126,47
5	Kejaksan	Kejaksan	66,38
		Kebonbaru	74,10
		Sukapura	157,32
		Kesenden	147,08

Sumber: Permendagri Nomor 75 Tahun 2018

Dilihat dari wilayah administratif pemerintahan, Kota Cirebon terdiri dari 5 (lima) kecamatan dan 22 kelurahan, yaitu:

1. Kecamatan Kejaksan terdiri dari Kelurahan Kejaksan, Kelurahan Kesenden, Kelurahan Sukapura dan Kelurahan Kebon Baru;
2. Kecamatan Kesambi terdiri dari Kelurahan Kesambi, Kelurahan Pekiringan, Kelurahan Sunyaragi, Kelurahan Karyamulya dan Kelurahan Drajat;
3. Kecamatan Pekalipan terdiri dari Kelurahan Jagasatru, Kelurahan Pulasaren, Kelurahan Pekalipan, dan Kelurahan Pekalangan;
4. Kecamatan Lemahwungkuk terdiri dari Kelurahan Kasepuhan, Kelurahan Pegambiran, Kelurahan Panjunan, dan Kelurahan Lemahwungkuk;

- Kecamatan Harjamukti terdiri dari Kelurahan Harjamukti, Kelurahan Kecapi, Kelurahan Larangan, Kelurahan Argasanya, dan Kelurahan Kalijaga.

Lebih rinci lagi, wilayah administrasi Kota Cirebon terbagi atas 22 kelurahan, 249 Rukun Warga, dan 1.383 Rukun Tetangga. Rincian jumlah masing-masing kelurahan beserta dengan Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) di masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:

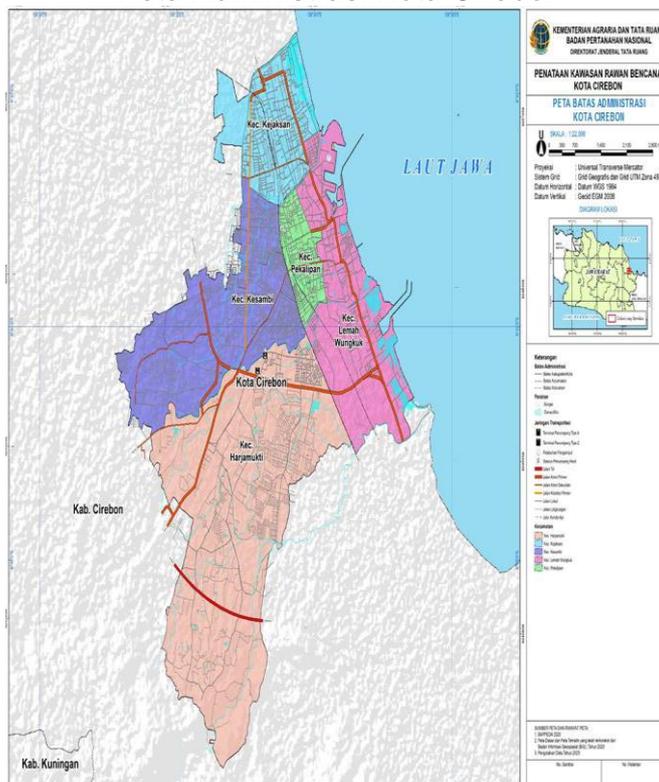
Tabel 1. 2
Banyaknya Kelurahan, RW dan RT
Menurut Kecamatan di Kota Cirebon Tahun 2024

No.	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT
1	2	3	4	5
1.	Harjamukti	5	77	469
2.	Lemahwungkuk	4	42	232
3.	Pekalipan	4	39	186
4.	Kesambi	5	56	313
5.	Kejaksan	4	35	183
Jumlah		22	249	1.383

Sumber: Setda Kota Cirebon, 2024

Lebih jelasnya, gambaran wilayah administrasi Kota Cirebon dapat dilihat pada Peta Administrasi Kota Cirebon:

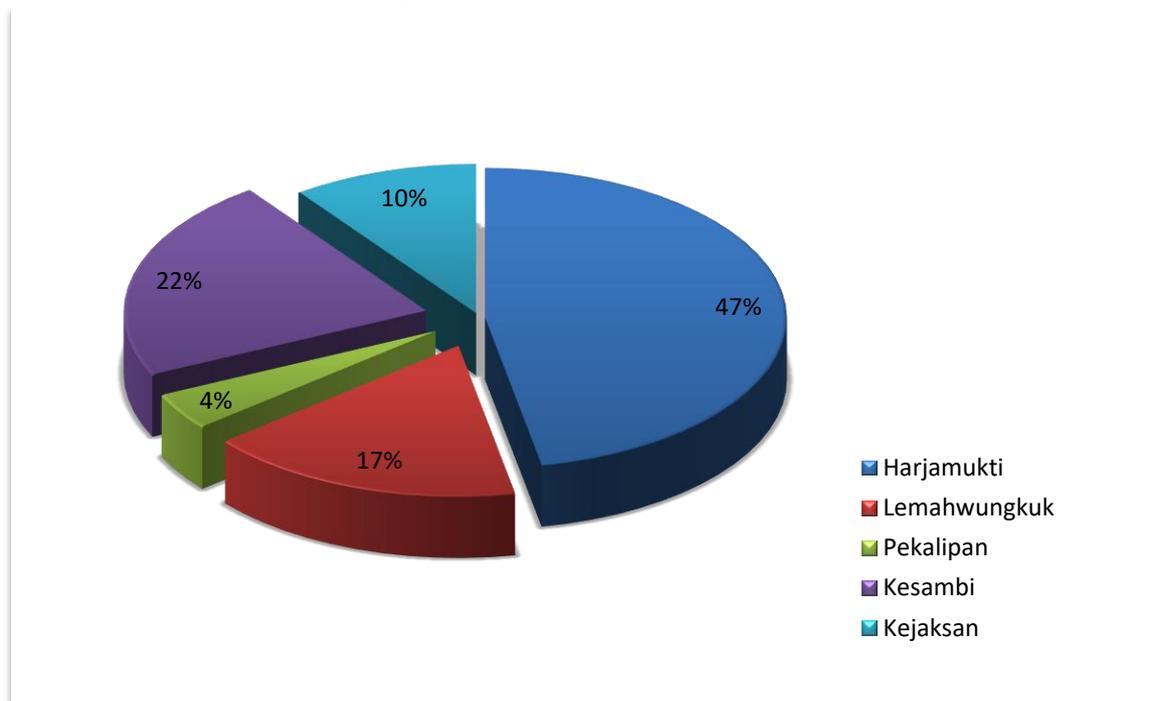
Gambar 1. 1
Peta Administrasi Kota Cirebon



Sumber: Laporan Penataan Kawasan Rawan Bencana Kota Cirebon 2020

Berdasarkan data di atas, Kecamatan Harjamukti merupakan wilayah kecamatan yang paling luas dengan jumlah RT dan RW terbanyak. Sementara itu, Kecamatan Pekalipan merupakan wilayah dengan luas paling kecil, namun jumlah RW dan RT terkecil berada di Kecamatan Kejaksan

Gambar 1. 2
Luas Wilayah Per Kecamatan di Kota Cirebon



Sumber: Kota Cirebon Dalam Angka 2020, BPS yang dikelola dalam SIPD, 2021

1.2.2 Topografi

Kondisi topografi sebagian besar wilayah Kota Cirebon merupakan dataran rendah yang berkembang sebagai pusat kegiatan perkotaan. Sebagian kecil lainnya merupakan dataran tinggi yang berada di wilayah selatan kota. Topografi wilayah perkotaan yang sebagian besar berupa dataran rendah menjadi kendala tersendiri karena kecepatan aliran air hujan yang terbangun ke laut menjadi lambat sehingga berpotensi menimbulkan genangan banjir di beberapa lokasi. Oleh karenanya di beberapa titik dibangun stasiun pompa yang berfungsi mempercepat pembuangan air hujan ke laut.

Wilayah Kota Cirebon yang merupakan dataran rendah memiliki ketinggian bervariasi pada kisaran 0-200 meter di atas permukaan laut. Peningkatan ketinggian dimulai dari daerah pantai menuju ke arah Selatan yaitu di Kelurahan Argasanya, Kecamatan Harjamukti, dengan ketinggian maksimal 200 meter.

Tabel 1. 3
Ketinggian Wilayah Diatas Permukaan Laut Menurut Kecamatan di Kota Cirebon

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Ketinggian
1.	Harjamukti	Kalijaga	18
2.	Lemahwungkuk	Pegambiran	3
3.	Pekalipan	Pekalipan	3
4.	Kesambi	Kesambi	3
5.	Kejaksan	Kesenden	6

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon, Tahun 2021

Kemiringan lahan di wilayah Kota Cirebon dapat diklasifikasikan berdasarkan rentang berikut:

1. Kemiringan 0-3 % terdapat di sebagian besar wilayah Kota Cirebon, kecuali sebagian kecil wilayah di Kecamatan Harjamukti;
2. Kemiringan 3-8 % terdapat di sebagian besar wilayah Kelurahan Kalijaga, sebagian kecil di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti;
3. Kemiringan 8-15 % terdapat di sebagian wilayah Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti;
4. Kemiringan 15-18 % terdapat di sebagian wilayah Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti

Kemiringan lahan di wilayah Kota Cirebon diklasifikasikan berdasarkan persentase kemiringan sebagai berikut:

Tabel 1. 4
Kemiringan Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Cirebon

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Persentase
1	2	3	4
1.	Harjamukti	Kalijaga	18,00
2.	Lemahwungkuk	Pegambiran	3,00
3.	Pekalipan	Pekalipan	3,00
4.	Kesambi	Kesambi	3,00
5.	Kejaksan	Kejaksan	6,00

Sumber: DLH Kota Cirebon, yang dikeloladalam SIPD, Tahun 2020

Adapun gambaran topografi berdasarkan kemiringan lereng lahan di wilayah Kota Cirebon dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.3
Peta Kemiringan Lereng Kota Cirebon



Sumber: : Dokumen Penataan Kawasan Rawan Bencana Kota Cirebon 2020

Kondisi tanah di Kota Cirebon berdasarkan data spasial dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok besar jenis tanah yang didominasi oleh jenis berupa material *alluvial* endapan *quarter* (Qa) dengan luas wilayah 2.877,76 hektar dan jenis batuan berupa endapan batuan sedimen *pliosen-plistosen* dengan luas total 1.061,24 hektar. Jenis tanah yang terbentuk di Kota Cirebon dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu jenis tanah *alluvial* dengan luas lahan 2.509,27 hektar, tanah *latosol* dengan luas 322,84 hektar dan jenis tanah *grumosol* dengan luas lahan 1.106,91 hektar.

Jenis tanah di Kota Cirebon adalah *tipe argosol* yang berasal dari endapan lava dan *piroklastik* (pasir, lempung, tanah liat, tupa, breksi lumpur, dan kerikil) hasil intrusi Gunung Ciremai. Secara rinci jenis tanah di Kota Cirebon terdiri atas:

1. Regosol coklat kelabu, asosiasi regosol kelabu;
2. Asosiasi regosol kelabu, regosol coklat kelabu;
3. Asosiasi glei humus rendah/aluvial kelabu;
4. Asosiasi regosol kelabu, regosol coklat kelabu, dan latosol;
5. Asosiasi mediteran coklat dan litosol; dan
6. Latosol coklat kemerahan.

Sementara itu kedalaman efektif tanah di Kota Cirebon terdiri atas 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Kedalaman 0-30 meter: terdapat di sebagian wilayah Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti;
2. Kedalaman 30-60 meter: terdapat di sebagian wilayah Kelurahan Argasunya, Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti dan Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi;

3. Kedalaman lebih dari 60 meter: terdapat di seluruh wilayah Kota Cirebon, kecuali di wilayah-wilayah yang telah disebutkan di atas.

Kota Cirebon yang berada di tepi laut memiliki temperatur udara cukup tinggi dengan suhu udara minimum rata-rata 26,4° C dan maksimum rata-rata 30,2° C dan banyaknya curah hujan 2.869,2 mm per tahun dengan hari hujan 129 hari. Kondisi air tanah pada umumnya dipengaruhi oleh intrusi air laut, sehingga kebutuhan air bersih masyarakat untuk keperluan air minum sebagian besar dari pasokan Perumda Air Minum Kota Cirebon yang sumber mata airnya berasal dari Cipaniis - Kabupaten Kuningan.

1.2.3 Geologi

Kondisi tanah di Kota Cirebon berdasarkan data spasial dikelompokkan menjadi dua kelompok besar jenis tanah yang didominasi oleh jenis berupa material alluvial endapan *quarter* (Qi) dengan luas wilayah 2.877,76 hektar dan jenis batuan berupa endapan batuan sedimen pliosen- pleistosen dengan luas total 1.061,24 hektar. Jenis tanah yang terbentuk di Kota Cirebon dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu jenis tanah aluvial dengan luas lahan 2.509,27 hektar, tanah latosol dengan luas 322,84 hektar dan jenis tanah grumosol dengan luas lahan 1.106,91 hektar. Jenis tanah di Kota Cirebon adalah tipe argosol yang berasal dari endapan lava dan piroklastik (pasir, lempung, tanah liat, tupa, breksi lumpur, dan kerikil) hasil intrusi Gunung Ciremai. Secara rinci jenis tanah di Kota Cirebon terdiri atas:

1. Regosol coklat kelabu, asosiasi regosol kelabu;
2. Asosiasi regosol kelabu, regosol coklat kelabu;
3. Asosiasi glei humus rendah/aluvial kelabu;
4. Asosiasi regosol kelabu, regosol coklat kelabu, dan latosol;
5. Asosiasi mediteran coklat dan litosol; dan
6. Latosol coklat kemerahan.

Sementara itu kedalaman efektif tanah di Kota Cirebon terdiri atas 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Kedalaman 0-30 meter: terdapat di sebagian wilayah Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti;
2. Kedalaman 30-60 meter: terdapat di sebagian wilayah Kelurahan Argasunya, Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti dan Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi;
3. Kedalaman lebih dari 60 meter: terdapat di seluruh wilayah Kota Cirebon, kecuali di wilayah-wilayah yang telah disebutkan di atas.

Sebaran terkait jenis tanah yang ada di Kota Cirebon disajikan pada gambar sebagai berikut:

Gambar 1. 3
Peta Jenis Tanah Kota Cirebon



Sumber: Dokumen Penataan Kawasan Rawan Bencana Kota Cirebon 2020



1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Aparatur

Gambar 1. 4
Evaluasi Kelembagaan pada Pemerintah Kota Cirebon



Dalam kurun waktu 10 (lima) tahun terakhir dan seiring agenda Reformasi Birokrasi, Pemerintah Daerah Kota Cirebon melakukan evaluasi kelembagaan sebagai upaya penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien.

Pada tahun 2022 Pemerintah Daerah Kota Cirebon berupaya melakukan adaptasi dan transisi dalam mekanisme hubungan kerja pada kelembagaan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, hal ini sebagai respon atas penyetaraan pejabat structural pada jabatan fungsional dengan menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tata Hubungan Kerja Antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

Saat ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Cirebon membentuk organisasi perangkat daerah dengan komposisi sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Tipe B;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B;
3. Inspektorat tipe B;
4. Dinas – Dinas;
 - a. Dinas Pendidikan Tipe B;
 - b. Dinas Kesehatan Tipe B;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe C;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tipe C
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B;
 - f. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C;
 - g. Dinas Sosial Tipe A;
 - h. Dinas Tenaga Kerja Tipe C;
 - i. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Tipe A;
 - j. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A;
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B;
 - l. Dinas Pemberdayaann Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A;
 - m. Dinas Perhubungan Tipe B;
 - n. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A;
 - o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tipe A;
 - p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A;
 - q. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe C;
 - r. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe C;
 - s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A

5. Badan Badan :
 - a. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A;
 - b. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A;
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe C;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe C.
6. Kecamatan – Kecamatan :
 - a. Kecamatan Kejaksan Tipe B;
 - b. Kecamatan Kesambi Tipe B;
 - c. Kecamatan Harjamukti Tipe B;
 - d. Kecamatan Lemahwungkuk Tipe B;
 - e. Kecamatan Pekalipan Tipe B.

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kota Cirebon memiliki ASN sebanyak 5.087 Pegawai terdiri laki – laki berjumlah 2.139 pegawai dan perempuan berjumlah 2948 pegawai. Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon per 31 Desember 2024 sebanyak 5.087. orang, terdiri dari 3.834 orang PNS dan 1.253 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selanjutnya data pegawai tersebut, dirinci dalam klasifikasi sebagai berikut:

Gambar 1. 5
Komposisi ASN Kota Cirebon Tahun 2024

Jenis Pegawai	Jumlah	Jenis Jabatan	Jumlah
PNS	3.834	Fungsional tertentu	3.797
PPPK GURU	822	Fungsional Umum-Pelaksana	861
PPPK Teknis	227	Struktural	429
PPPK Nakes	204		
Grand Total	5.087	Grand Total	5.087

Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Jabatan



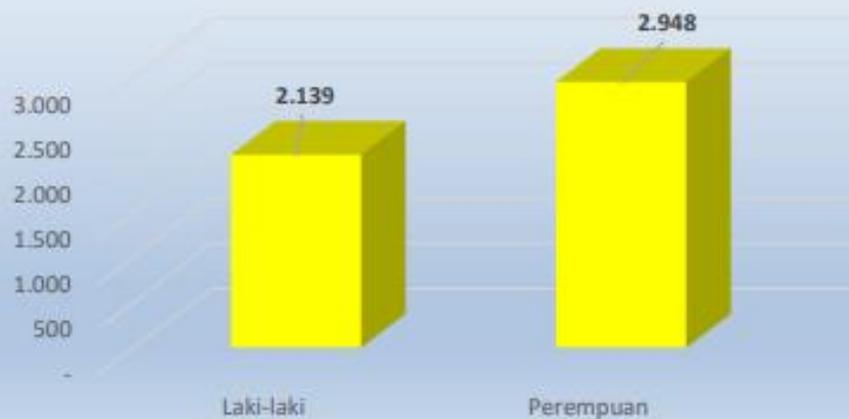
Grafik Jumlah PNS Struktural Berdasarkan Eselon

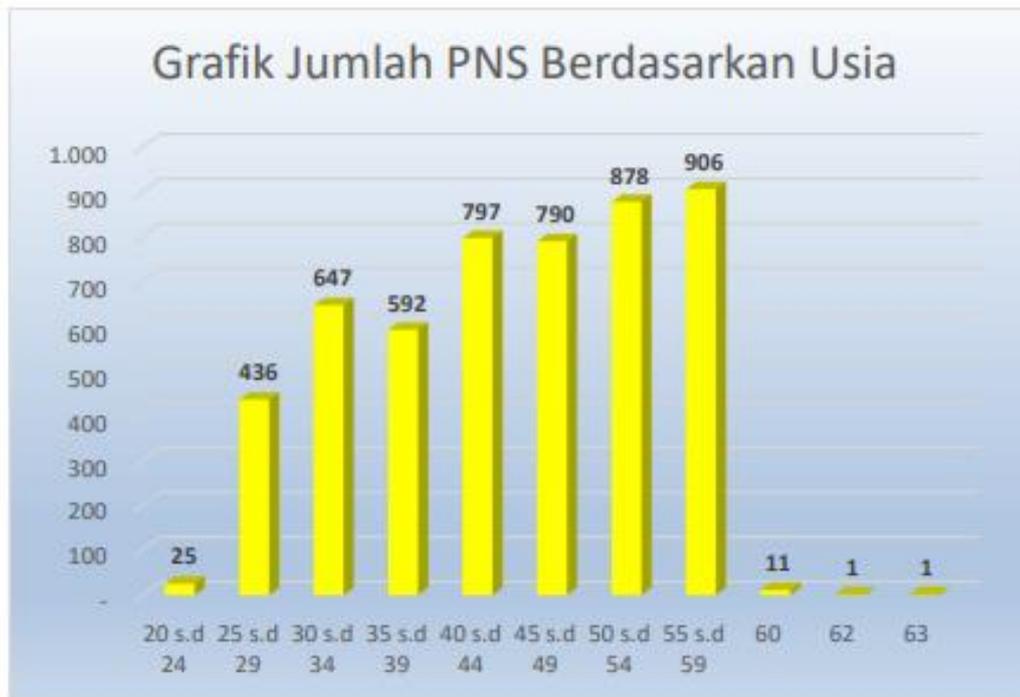


Grafik Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan



Grafik Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin





Sumber : BKPSDM Kota Cirebon 2024



1.4 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan

menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang, oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi.

Isu strategis dibangun berdasarkan isu internasional dan isu nasional serta permasalahan yang dihadapi Kota Cirebon. Isu Internasional, isu nasional dan isu Jawa Barat adalah sebagai berikut:

- A. Isu Internasional.** Isu internasional yang diangkat adalah sebagai berikut:
1. *Sustainable Development Goals (SDGs)*.
 2. Arsitektur Kesehatan Global.
 3. Transformasi Ekonomi Berbasis Digital.
 4. Transisi Energi.
- B. Isu Nasional.** Isu nasional yang diangkat berdasarkan RPJMN Tahun 2019 - 2024 adalah sebagai berikut:
1. Pembangunan SDM.
 2. Peningkatan ketahanan daya saing ekonomi kerakyatan.
 3. Pembangunan Infrastruktur.
 4. Penyederhanaan Regulasi.
 5. Penyederhanaan Birokrasi.
 6. Transformasi Ekonomi.
- C. Isu Provinsi Jawa Barat.** Isu Provinsi Jawa Barat dalam rancangan RPD Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut:
1. Kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia
 2. Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan
 3. Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur
 4. Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan
 5. Peningkatan Demokrasi dan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan isu internasional, isu nasional dan provinsi di atas, maka rumusan isu strategis Kota Cirebon untuk Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Tingginya persentase penduduk miskin

Jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Cirebon masih cukup tinggi. Meskipun terjadi penurunan dibandingkan Tahun 2021, jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Cirebon Tahun 2022 masih lebih tinggi dibandingkan Tahun 2016 – 2020. Selain itu, Gini Rasio Kota Cirebon selama Tahun 2020 – 2021 merupakan yang tertinggi di Jawa Barat, dan Tahun 2022 naik ke rangking kedua tertinggi di Jawa Barat. Gini ratio merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, yaitu bahwa kesenjangan menyebabkan kemiskinan semakin parah. Sesuai dengan mandator

2. Tingginya prevalensi stunting, tuberkulosis dan HIV/AIDS

Pada Tahun 2021, Prevalensi Balita Kurus (BB/U) Kota Cirebon merupakan yang tertinggi di Jawa Barat, yaitu sebesar 13,2%. Jika dibandingkan dengan Jawa Barat sebesar 5,31%, maka Prevalensi Balita Kurus (BB/U) Kota Cirebon lebih dari 2 kali angka Jawa Barat. Selain itu, Prevalensi Balita Pendek (TB/U) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 merupakan ketiga tertinggi dengan nilai 13%, dengan angka Jawa Barat 6,08%. Prevalensi balita kurus dan pendek Kota Cirebon yang tinggi ini tentu akan menimbulkan masalah di masa yang akan datang. Stunting berpotensi memperlambat perkembangan otak, dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan risiko serangan penyakit kronis.

Data lain yang mendukung tingginya tuberkulosis di Kota Cirebon adalah bahwa berdasarkan Angka Notifikasi kasus Tuberkulosis per 100.000 Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 merupakan yang tertinggi di Jawa Barat, yaitu sebesar 372,9. Tentu saja data ini merupakan pekerjaan rumah yang sangat besar untuk segera dituntaskan. Akan tetapi, ternyata pekerjaan rumah ini sejalan dengan upaya yang dilakukan Kota Cirebon selama ini untuk mengatasi tuberkulosis ini. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Kota Cirebon dengan 91,9 lebih tinggi dari pada Jawa Barat yang sebesar 82,7.

Selain kasus stunting dan tuberkulosis, pada Tahun 2021 Kota Cirebon menempati urutan kelima kasus HIV Positif Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan 254 kasus. Berdasarkan data di atas, maka tingginya prevalensi stunting, tuberkulosis dan HIV/AIDS menjadi salah satu isu strategis untuk perencanaan pembangunan di Kota Cirebon Tahun 2024-2026.

3. Belum optimalnya profesionalisme ASN

Berdasarkan data, Indeks Profesionalitas ASN Kota Cirebon Tahun 2022 adalah 52,15 persen, dengan kategori sangat rendah. Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Yang perlu mendapat perhatian adalah terkait dengan peningkatan kompetensi ASN, baik diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis, serta

seminar/workshop/magang/kursus/sejenisnya. Selain itu, terkait dengan kualifikasi pendidikan, jumlah ASN yang berpendidikan S2 dan S3 masih minim, yaitu hanya 9,470% ASN yang berpendidikan S2 dan hanya 0,022% ASN yang berpendidikan S3.

4. Belum optimalnya pemajuan kebudayaan dan pariwisata

Dengan jumlah sanggar seni sebanyak 197 unit pada Tahun 2021 dan jumlah wisatawan ke Kota Cirebon yang naik signifikan, maka jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya harus ditingkatkan. Selain itu, perlu dilakukan optimalisasi kegiatan untuk terwujudnya rencana pariwisata buatan yang akan dikembangkan di Kelurahan Pegambiran, Kelurahan Kesenden, dan Taman Ade Irma Suryani di Kelurahan Lemahwungkuk, termasuk juga optimalisasi pengelolaan kampung wisata yang memiliki potensi sangat besar untuk dikembangkan.

Untuk pengembangan kebudayaan, diperlukan peningkatan pengelolaan cagar budaya dan pelestarian warisan budaya Cirebon dalam kehidupan, baik di pemerintahan maupun masyarakat.

5. Belum optimalnya penggalian potensi, kapasitas dan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah

Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi wajib pajak/retribusi khususnya atas objek pajak dengan sistem penetapan jumlah pajak yang harus dibayar dilakukan oleh wajib pajak sendiri (*self assessment*), terutama pelaku usaha yang menggunakan pembayaran secara tradisional, maka pengawasan dan monitoring perlu ditingkatkan. Peningkatan pajak hotel dan restoran tahun 2021 – 2022 belum sebanding dengan pertumbuhan PDRB pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum pada tahun yang sama.

Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD dengan realisasi rata-rata masih di angka 60,34% masih dapat ditingkatkan lagi dengan peningkatan kinerja BUMD.

Peningkatan wisatawan ke Kota Cirebon dapat diikuti dengan peningkatan usaha UMKM yang mendukung pariwisata, sehingga jumlah UMKM yang naik kelas dapat turut meningkat.

6. Potensi gangguan stabilitas politik daerah dalam menghadapi pemilu dan Pemilukada

Berdasarkan Buku Indeks Kerawanan Pemilu 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, ada 6 (enam) isu utama kerawanan yang memerlukan kebijakan antisipasi berdasarkan pemetaan IKP Pemilu dan Pemilihan 2024, yaitu 1) jumlah partai politik peserta pemilu, 2) pelaksanaan tahapan pemilu di provinsi baru, 3) Netralitas penyelenggara pemilu dalam tahapan pemilu berikutnya, 4) polarisasi masyarakat dan dukungan politik, 5) penggunaan media sosial untuk kontestasi, serta 6) Pemenuhan hak memilih dan dipilih untuk perempuan dan kelompok rentan. Kecuali isu nomor 2, isu yang lain perlu diantisipasi di Kota Cirebon.

Sarana prasarana publik terkait antisipasi pemilu dan pilkada yang dimiliki Kota Cirebon saat ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan konflik dan terganggunya stabilitas politik. Untuk mencegah dan meminimalisir kondisi tersebut, diperlukan koordinasi antara pemerintah daerah, organisasi peserta pemilu/pilkada, panitia penyelenggara pemilu dan trantibum linmas dan masyarakat.

7. Ketimpangan kondisi infrastruktur di kawasan selatan dan pinggiran kota, serta belum optimalnya pengendalian banjir dan ketahanan bencana

Kondisi infrastruktur di wilayah selatan dan pinggiran kota masih belum optimal dibandingkan dengan pusat kota, terutama dilihat dari kondisi jalan, kondisi saluran, permukiman, air bersih, penanganan persampahan, serta kondisi fisik wilayah.

Untuk penanganan banjir, infrastruktur pengendali banjir yang belum ada belum optimal dikarenakan belum terintegrasi serta masih rendahnya penanganan permasalahan banjir hanya pada perangkat daerah teknis. Selain itu, masih belum optimalnya kerjasama antar wilayah, terutama pada kawasan perbatasan. Masalah lain adalah belum adanya bangunan pengendali banjir, seperti kolam retensi, yang dimiliki oleh Kota Cirebon. Masih rendahnya lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi sebagai resapan dalam upaya pengendalian banjir juga perlu diatasi.

Belum optimalnya ketahanan bencana antara dikarenakan belum adanya dokumen penanganan bencana yang dilakukan secara komprehensif. Capaian Angka Indeks Ketahanan Daerah Kota Cirebon masih di bawah capaian

Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, masih diperlukan penguatan kebijakan dan kelembagaan, pemutakhiran kajian risiko bencana dan rencana kontijensi untuk bencana beresiko tinggi, serta pembangunan sistem informasi yang mendukung penanggulangan bencana, yang didalamnya termasuk early warning system. Diperlukan juga penguatan kesiapsiagaan, penanganan darurat bencana serta pengembangan sistem pemulihan bencana.

Tabel 1. 5
Isu Internasional, Isu Nasional, Isu Provinsi Jawa Barat
serta Isu Strategis Kota Cirebon

Isu Internasional	Isu Nasional	Isu Provinsi Jawa Barat	Isu Strategis Kota Cirebon
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> • Arsitektur Kesehatan Global • Transformasi Ekonomi Berbasis Digital • Transisi Energ 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan SDM • Peningkatan ketahanan daya saing ekonomi kerakyatan. • Pembangunan Infrastruktur. • Penyederhanaan Regulasi. • Penyederhanaan Birokrasi. • Transformasi Ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia • Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan • Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan • Peningkatan Demokrasi dan Reformasi Birokrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya persentase penduduk miskin • Tingginya prevalensi stunting, tuberkulosis dan HIV/AIDS • Belum optimalnya profesionalisme ASN • Belum optimalnya pemajuan kebudayaan dan pariwisata • Belum optimalnya penggalian potensi, kapasitas dan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah • Potensi gangguan stabilitas politik daerah dalam menghadapi pemilu dan Pemilukada • Ketimpangan kondisi infrastruktur di kawasan selatan dan pinggiran kota, serta belum optimalnya pengendalian banjir dan ketahanan bencana



BARAJ

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Membahas perencanaan strategis, mencakup visi, misi, tujuan, dan sasaran rencana pembangunan daerah Kota Cirebon 2024-2026. Selain itu, dijelaskan prioritas pembangunan daerah 2024-2026, indikator kinerja utama (IKU), perjanjian kinerja, serta rencana anggaran tahun 2024.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan dan perjanjian kinerja merupakan hal mendasar dalam sistem akuntabilitas kinerja, melalui perencanaan dan perjanjian kinerja maka target-target terhadap kinerja akan terarah dan terukur. Perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun 2024 tidak terlepas dari rencana strategis yang ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 44 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2024-2026

Melalui Bab II ini diuraikan komponen-komponen yang terdapat dalam perencanaan dan perjanjian kinerja, diantaranya Perencanaan Strategis, Prioritas Pembangunan Daerah 2024-2026, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja serta Rencana Penganggaran. Penjelasan mengenai perencanaan dan perjanjian kinerja ini dilakukan guna menjadi acuan dalam mengupas pengukuran, evaluasi dan analisa atas pencapaian kinerja di BAB selanjutnya.



2.1 Perencanaan Strategis

2.1.1 Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Suatu strategi, dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Pada permasalahan tertentu satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran saja. Pada kondisi/permasalahan lain beberapa sasaran dapat bersifat inherent dengan satu tema, sehingga satu strategi dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPJMD. Hal ini dilakukan agar pilihan-pilihan strategis dapat selaras dengan arahan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang dirumuskan harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil daerah pada masa depan.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan

dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah dan perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi.

Sehubungan dengan berakhirnya periode Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon pada tahun 2023, dan memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, Bahwa Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati, Wali Kota Akan Dilaksanakan Secara Serentak Pada Tahun 2024. Sehingga Pada masa transisi ini, jika dipandang dari sisi perencanaan, maka Rencana Jangka Menengah Daerah sebagai acuan dalam Perencanaan Tahunan atau RKPD Tahun 2023 Terjadi “Kekosongan”.

Untuk menjembatani hal tersebut, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 5 Desember 2022 telah menerbitkan regulasi berupa Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus segera menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cirebon Tahun 2024-2026 disusun melalui berbagai tahapan, analisis, konsultasi publik, pembahasan bersama perangkat daerah dan DPRD serta pemangku kepentingan lainnya.

Rencana Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2024-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon tahun 2005-2025. RPD ini merupakan tahapan ke-5 dari 5 (lima) tahapan pencapaian visi jangka panjang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon tahun 2005 2025. Tahap ke-5 ini masih melanjutkan

pencapaian tahap ke-4, yaitu Tahap Pencapaian mewujudkan Kota Cirebon menjadi Kota Perdagangan dan Jasa yang Maju dan Sejahtera, dimana fokus pembangunan lebih diarahkan dalam memantapkan daya dukung terhadap pembangunan yang ditandai dengan terlihatnya peningkatan kualitas dan kuantitas pengamalan ajaran agama dan keharmonisan sosial sehingga menjadi landasan pembangunan di Kota Cirebon, baik dalam hal pembangunan SDM, ekonomi, pemerintahan, politik, dan hukum serta aspek-aspek lainnya.

Pemantapan dalam bidang kesehatan ditandai dengan meningkatnya angka harapan hidup yang ditandai dengan menurunnya angka kematian ibu dan kematian bayi maupun kematian anak balita serta pemerataan pelayanan kesehatan di Kota Cirebon. Pemantapan dalam bidang pendidikan ditandai dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah dengan berhasil dan tuntasnya program Wajib Belajar 12 tahun, dan tidak adanya angka drop out serta tidak adanya lagi angka buta huruf. peningkatan pendapatan perkapita, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dengan IPM. Sementara dalam aspek lingkungan ditandai dengan tersedianya sistem pengelolaan lingkungan yang berpedoman pada hasil kajian AMDAL.

Pemantapan dalam bidang daya beli masyarakat akan dengan sendirinya tumbuh dan berkembang apabila dibangun dengan optimalisasi pendidikan, keterampilan (*skills*) atau profesionalisme yang didukung dengan tingkat kesehatan masyarakat yang cukup baik serta sarana dan prasarana yang memadai. Berfokus pada masyarakat miskin/kurang mampu diorientasikan pada pemberian pendidikan dan pelatihan produksi serta pemasaran serta pemberian pinjaman modal serta bimbingan usaha.

Permasalahan pokok pembangunan yang yang dihadapi Kota Cirebon adalah:

1. Belum optimalnya kualitas hidup Masyarakat.
2. Belum optimalnya daya saing daerah.
3. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang berwibawa.

Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 j mengarahkan agar tujuan dan sasaran yang disusun untuk perencanaan pembangunan jangka menengah sedikitnya memuat upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran setidaknya mengindikasikan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Sesuai Perda Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005 – 2025, RPJPD Kota Cirebon ditetapkan untuk masa perencanaan 20 tahun, mulai tahun 2005 hingga tahun 2025. Dalam dokumen perencanaan Kota Cirebon untuk jangka panjang ini, telah ditetapkan visi misi yang diharapkan dapat tercapai di akhir periode tahun perencanaan.

Sebagaimana arahan Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022, Visi Misi pada RPJPD ini akan menjadi acuan dalam perumusan tujuan dan sasaran RPD yang akan disusun untuk periode perencanaan 2024-2026. Hal ini juga perlu dilakukan dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode.

Visi Kota Cirebon 2005-2025 disusun dengan memperhatikan potensi dan permasalahan pembangunan kota serta proyeksi arah pembangunan yang akan dihadapi Kota Cirebon. Dalam RPJPD Kota Cirebon 2005-2025 dirumuskan visi Kota Cirebon adalah “Dengan Nuansa Religius Kota Cirebon Menjadi Kota Perdagangan dan Jasa yang Maju dan Sejahtera”.

Selanjutnya berdasarkan visi pembangunan tersebut, ditetapkan enam Misi Pembangunan Kota Cirebon Tahun 2005-2025 dalam dimensi religius, kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, sarana dan prasarana umum serta pemerintahan, yakni:

1. Mewujudkan masyarakat yang religius;
2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi;
4. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif, stabil, merata dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan; dan
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, sarana prasarana umum di ikuti dengan terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Arah kebijakan strategis pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, meliputi penataan ruang, pembangunan infrastruktur, pengembangan mutu pendidikan dasar dan menengah, pengembangan mutu layanan kesehatan, pembangunan sarana ekonomi, pembangunan kelembagaan dan pemerintahan, dan pengembangan sikap mental masyarakat dan nilai budaya.

Secara terperinci, upaya pencapaian visi misi rencana pembangunan jangka menengah disusun dalam 3 (tiga) tahapan rencana pembangunan jangka menengah. Sesuai rencana yang telah ditetapkan, saat ini Kota Cirebon akan memasuki tahapan pembangunan periode pertama, yakni RPD ke-1 untuk periode perencanaan 2024-2026.

Dalam rangka semakin memantapkan daya dukung terhadap pembangunan maka pada tahap RPD ke-3 akan ditandai dengan terlihatnya peningkatan kualitas dan kuantitas pengamalan ajaran agama dan keharmonisan sosial sehingga menjadi landasan pembangunan di Kota Cirebon, baik dalam hal pembangunan SDM, ekonomi, pemerintahan, politik, dan hukum serta aspek-aspek lainnya.

Pemantapan dalam bidang kesehatan ditandai dengan meningkatnya angka harapan hidup yang ditandai dengan menurunnya angka kematian ibu dan kematian bayi maupun kematian anak balita serta pemerataan pelayanan kesehatan di Kota Cirebon. Adapun pemantapan dalam bidang pendidikan ditandai dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah dengan berhasil dan tuntasnya program Wajib Belajar 12 tahun, dan tidak adanya angka drop out serta tidak adanya lagi angka buta huruf. Peningkatan pendapatan perkapita, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dengan IPM. Sementara dalam aspek lingkungan ditandai dengan tersedianya sistem pengelolaan lingkungan yang berpedoman pada hasil kajian AMDAL. Sedangkan pemantapan dalam bidang daya beli masyarakat akan dengan sendirinya tumbuh dan berkembang apabila dibangun dengan optimalisasi pendidikan, keterampilan atau profesionalisme yang didukung dengan tingkat kesehatan masyarakat yang cukup baik serta sarana dan prasarana yang memadai. Berfokus pada masyarakat miskin/kurang mampu diorientasikan pada pemberian pendidikan dan pelatihan produksi serta pemasaran serta pemberian pinjaman modal serta bimbingan usaha.

Tahapan pembangunan aspek supra struktur dan infrastruktur adalah:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pemahaman serta aplikasi nilai keagamaan pada masyarakat Kota Cirebon;
2. Pemantapan dan pemeliharaan Puskesmas dengan fasilitas atau sarana dan prasarana yang lengkap di Setiap Kecamatan;
3. Pemantapan, pemeliharaan dan pemberdayaan POSYANDU yang terkoordinasi dengan baik di Setiap RW dan Kelurahan;
4. Pemantapan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pendidikan (SD SMP dan SMA) berskala internasional;

5. Pemantapan dan pemeliharaan Prasarana dan sarana pendidikan sebagai upaya mempercepat WAJAR 12 tahun;
6. Pemantapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana/kesejahteraan dalam rangka peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan;
7. Pemantapan dan pemeliharaan KUKM (Koperasi Usaha Kecil dan Menengah);
8. Pemantapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana KUKM hingga pembentukan CBD (Central Bisnis Distrik);
9. Pemantapan dan pemeliharaan sistem pendukung permodalan dan pendampingan bagi KUKM pengembangan produk unggulan Kota Cirebon;
10. Pemantapan dan pemeliharaan mekanisme keterlibatan aktif pemerintah terhadap produksi, distribusi dan pemasaran akan produk unggulan Kota Cirebon;
11. Pemantapan dan pemeliharaan sistem terpadu dalam upaya penanggulangan banjir dan bencana alam serta permasalahan sosial.
12. Pemantapan dan pemeliharaan sistem pemanfaatan lahan tidak produktif disertai dengan pembangunan ruang terbuka hijau (buffer zone);
13. Pemantapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pendidikan keterampilan bagi para nelayan;
14. Pemantapan dan pemeliharaan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan perempuan dalam pembangunan;
15. Pemantapan, pemeliharaan, pengembangan sarana dan prasarana pariwisata terutama:
 - a) Wisata Bahari/Pantai;
 - b) Wisata Belanja;
 - c) Wisata Sejarah; serta
 - d) Wisata Kuliner;
16. Pemantapan dan pemeliharaan fungsi jalan untuk mendukung sistem transportasi terpadu di kota dan lintas kota;
17. Pemantapan dan pemeliharaan jalan/jembatan yang menghubungkan kawasan-kawasan potensial tumbuh dan berkembang;
18. Pemantapan pembangunan dan optimalisasi fasilitas Pra-Sekolah/TK, SD/Sederajat, SLTP/Sederajat, dan SLTA/Sederajat guna mendukung/mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk;
19. Pemantapan dan pemeliharaan jembatan penyeberangan orang (JPO) di titik-titik rawan kemacetan lalu-lintas;
20. Pemantapan dan pemeliharaan pelayanan infrastruktur;
21. Pemantapan Pemberdayaan profesionalisme aparatur dan kinerja pemerintah daerah;
22. Pemantapan dan pemeliharaan serta terus merevitalisasi pasar-pasar tradisional yang dinilai mengalami penurunan kualitas fisik lingkungan;
23. Pemantapan, pemeliharaan sistem pengadaan dan pelayanan jaringan air bersih yang mandiri dan sanitasi pada daerah padat penduduk.

2.1.2 Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

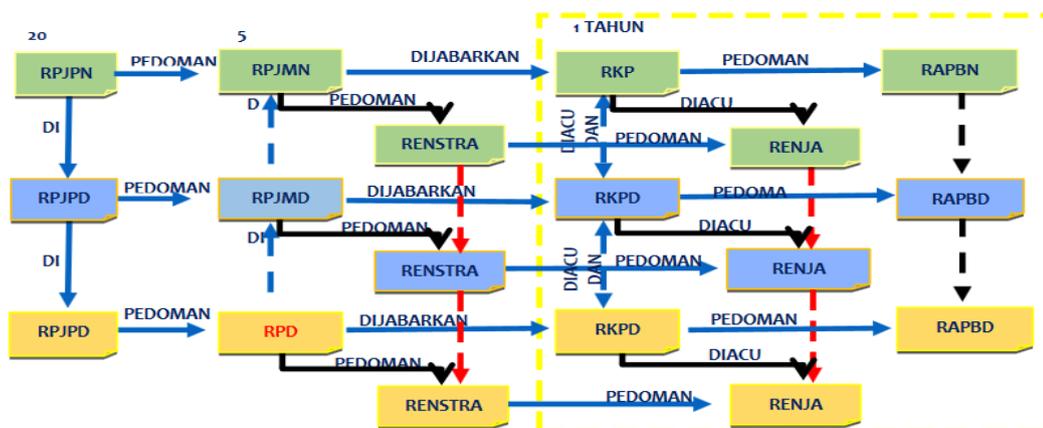
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus segera menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cirebon Tahun 2024-2026 disusun melalui berbagai tahapan, analisis, konsultasi publik, pembahasan bersama perangkat daerah dan DPRD serta pemangku kepentingan lainnya.

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2024- 2026 memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting dan memiliki nilai nilai strategis serta politis sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2024- 2026 merupakan rencana pembangunan untuk mengisi kekosongan RPJMD Kota Cirebon sehubungan dengan berakhirnya RPJMD periode 2018 2023 dan belum adanya Kepala Daerah Definitif hasil Pemilukada.
2. Rencana Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2024-2026 merupakan pedoman pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2024-2026.
3. Rencana Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2024-2026 merupakan pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan perencanaan tahunan dalam Rencana Kerja Tahunan Daerah.
4. Rencana Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2024-2026 merupakan pedoman bagi daerah dalam penyusunan rencana pembangunan daerah yang selaras dengan rencana pembangunan nasional dan provinsi.
5. Rencana Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2024-2026 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah selama 3 (tiga) tahun.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2024-2026 merupakan alat atau instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan.

Adapun hubungan antara Rencana Pembangunan Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2. 1
Hubungan RPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya



mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2024-2026 harus memperhatikan:

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024.
2. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas provinsi Jawa Barat dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.
3. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Cirebon sampai tahun 2025.
4. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023.
5. RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.
6. Isu-isu strategis yang berkembang.
7. Kebijakan nasional.
8. Regulasi yang berlaku.

Berdasarkan kebijakan-kebijakan dan prioritas-prioritas yang telah dikemukakan sebelumnya pada RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023, serta permasalahan dan isu-isu strategis Kota Cirebon selama periode RPD 2024-2026, maka ditetapkanlah 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Penanggulangan Kemiskinan;
2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan ATM;
3. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan;
4. Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Nilai Sejarah;
5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan;
6. Peningkatan Profesionalisme ASN; dan
7. Penguatan Stabilitas Politik di Daerah.

Program dalam Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2024-2026 telah menggunakan Program dan Kegiatan berdasarkan Hasil Pemetaan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 meliputi:

1. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Pengembangan Kurikulum
4. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
5. Program Pembinaan Perpustakaan
6. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
7. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
9. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
10. Program Penanganan Kerawanan Pangan
11. Program Pengawasan Keamanan Pangan
12. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
13. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
14. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
15. Program Pem-Berdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
16. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
17. Program Pengembangan UMKM
18. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
19. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
20. Program Pemberdayaan Sosial
21. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
22. Program Rehabilitasi Sosial
23. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
24. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
25. Program Pengendalian Penduduk
26. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
27. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
28. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
29. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
30. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
31. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
32. Program Perlindungan Khusus Anak
33. Program Perlindungan Perempuan
34. Program Kawasan Permukiman
35. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Ling-Kungan Hidup (PPLH)
36. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
37. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
38. Program Penataan Bangunan Gedung
39. Program Penatagunaan Tanah
40. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
41. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
42. Program Pengelolaan fan Pengembangan Sistem Drainase

43. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
44. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
45. Program Pengelolaan Persampahan
46. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
47. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
48. Program Pengembangan Permukiman
49. Program Pengembangan Perumahan
50. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
51. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
52. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
53. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
54. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
55. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Psu)
56. Program Penyelenggaraan Jalan
57. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Llaj)
58. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
59. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
60. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
61. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
62. Program Pengelolaan Permuseuman
63. Program Pengembangan Kebudayaan
64. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
65. Program Hubungan Industrial
66. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
67. Program Penempatan Tenaga Kerja
68. Program Perencanaan Tenaga Kerja
69. Program Pemasaran Pariwisata
70. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
71. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
72. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
73. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
74. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
75. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
76. Program Pengembangan Ekspor
77. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
78. Program Pengembangan UMKM
79. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
80. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
81. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
82. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
83. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

84. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
85. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
86. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
87. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
88. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
89. Program Penyuluhan Pertanian
90. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
91. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
92. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
93. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
94. Program Pelayanan Penanaman Modal
95. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
96. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
97. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
98. Program Promosi Penanaman Modal
99. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
100. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
101. Program Penyeleng-Garaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
102. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
103. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
104. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dprd
105. Program Kepegawaian Daerah
106. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
107. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
108. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
109. Program Pencatatan Sipil
110. Program Pendaftaran Penduduk
111. Program Pengelolaan Arsip
112. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
113. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
114. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
115. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
116. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
117. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
118. Program Penyelenggaraan Pengawasan
119. Program Perekonomian dan Pembangunan
120. Program Perizinan Penggunaan Arsip
121. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
122. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
123. Program Administrasi Pemerintahan Desa
124. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
125. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
126. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
127. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
128. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
129. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

130. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
131. Program Penanganan Bencana
132. Program Penanggulangan Bencana
133. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
134. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
135. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
136. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
137. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
138. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

2.1.3 Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Rencana Kerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cirebon Tahun 2024-2026. Tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2024 mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan Kota Cirebon yang tertuang dalam RPJPD 2005-2025 yaitu “Dengan Nuansa Religius Kota Cirebon Menjadi Kota Perdagangan dan Jasa yang Maju dan Sejahtera”.

Prioritas pembangunan tahun 2024 terdiri dari sasaran pembangunan daerah dan prioritas pembangunan daerah. Selanjutnya, program pembangunan daerah dijabarkan kedalam kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kota Cirebon pada Tahun 2024.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kota Cirebon Tahun 2024 disusun berdasarkan pendekatan visi dan misi RPJPD Kota Cirebon Tahun 2005-2025 sebagaimana ditetapkan dalam RPD Kota Cirebon 2024-2026. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan kualitas hidup masyarakat:
 - a. meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi masyarakat;
 - b. meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Cirebon;
 - c. meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup;

- d. terkendalinya jumlah penduduk;
 - e. meningkatnya kapasitas daya saing kepemudaan dan meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dan perlindungan anak;
 - f. menurunnya dampak perubahan iklim;
 - g. meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal; dan
 - h. menurunnya tingkat pengangguran
2. Meningkatnya Pertumbuhan Potensi, Kapasitas, dan Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi Daerah:
 - a. meningkatnya pengembangan ekonomi berkelanjutan; dan
 - b. meningkatnya investasi penanaman modal.
 3. meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berwibawa:
 - a. meningkatnya pelayanan publik berbasis elektronik;
 - b. meningkatnya tindak lanjut hasil kelitbangan dan inovasi daerah;
 - c. meningkatnya dukungan penyelenggaraan pemerintahan;
 - d. meningkatnya kualitas pembangunan kewilayahan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta stabilitas politik daerah.

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan daerah terkait, dihubungkan dengan program pembangunan daerah pada Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 44 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cirebon 2024 – 2026.

Berdasarkan dari Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2024, mempedomani prioritas RPD 2024-2026 dan isu strategis, maka untuk mewujudkannya telah disusun prioritas Pembangunan yaitu 7 prioritas pembangunan daerah berdasarkan Dokumen RPD tahun 2024-2026.

Prioritas Pembangunan tersebut adalah:

1. Penanggulangan Kemiskinan;
2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDS-Tuberkulosis-Malaria (ATM);
3. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan;

4. Pemajuan kebudayaan dan Pelestarian Sejarah;
5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan;
6. Peningkatan Profesionalisme ASN; dan
7. Menjaga Stabilitas Politik Daerah.

Program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, sedangkan program, kegiatan dan sub kegiatan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019.

Penjabaran Prioritas Program Pembangunan Daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Penanggulangan Kemiskinan, dilakukan antara lain melalui:
 - a. Pengelolaan data base dan pelayanan keluarga miskin Program-program yang mendukung Penanggulangan Kemiskinan, antara lain:
 - 1) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - 2) Program Pendaftaran Penduduk
 - b. Penyediaan jaminan kesehatan bagi keluarga miskin Program yang mendukung penyediaan jaminan kesehatan bagi keluarga miskin adalah:
 - 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
 - c. Perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin Program yang mendukung Perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin adalah:
 - 1) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
 - d. Pemberdayaan keluarga miskin Program-program yang mendukung Pemberdayaan keluarga miskin adalah:
 - 1) Program Pemberdayaan Sosial
 - 2) Program Rehabilitasi Sosial
 - 3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
2. Percepatan penurunan stunting dan ATM, dilakukan melalui:
 - a. Peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat, konvergensi penurunan stunting, penanggulangan AIDs dan TB, yang dilalui melalui program-program sebagai berikut:
 - 1) Program Pendaftaran Penduduk
 - 2) Program Pencatatan Sipil

- 3) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - 4) Program Penanganan Kerawanan Pangan
 - 5) Program Pengelolaan Pendidikan
 - 6) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - 7) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - 8) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - 9) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
 - 10) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
 - 11) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - 12) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - 13) Program Pengembangan Permukiman
 - 14) Program Pengembangan Perumahan
 - 15) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 - 16) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
 - 17) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - 18) Program Perencanaan Tenaga Kerja
 - 19) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - 20) Program Penempatan Tenaga Kerja
 - 21) Program Hubungan Industrial
 - 22) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
 - 23) Program Perlindungan Perempuan
 - 24) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - 25) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
 - 26) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
3. Pemerataan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan, dilakukan melalui:
- a. Revitalisasi kawasan stadion Bima Revitalisasi kawasan stadion Bima dilakukan melalui program program sebagai berikut:
 - 1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
 - 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
 - 3) Program Penyelenggaraan Jalan
 - 4) Program Penataan Bangunan Gedung
 - b. Peningkatan fungsi kualitas RTH
Program yang mendukung peningkatan fungsi kualitas RTH adalah:
 - 1) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
 - c. Pengendalian banjir di wilayah Kawasan Cipto
Program-program yang mendukung pengendalian banjir di wilayah Kawasan Cipto adalah:
 - 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 - 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
 - d. Peningkatan kapasitas Masyarakat Tangguh Bencana

- 1) Program Penanganan Bencana
- 2) Program Penanggulangan Bencana
- e. Kampung Proklim
 - 1) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - 2) Program Pengelolaan Persampahan
- f. Pengembangan angkutan umum masal perkotaan
 - 1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
4. Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Nilai Sejarah, dilaksanakan melalui:
 - a. Pembangunan dan aktivasi Pusat Budaya Rarasantang Pembangunan dan aktivasi Pusat Budaya Rarasantang dilakukan melalui program:
 1. Program Pengembangan Kebudayaan
 - b. Pelestarian Naskah Kuno Daerah
 - 1) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
 - c. Gapura pintu masuk kota Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
 - d. Pelestarian Cagar Budaya (perlindungan)
 - 1) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan, dilaksanakan melalui:
 - a. Pengembangan kampung wisata
 - 1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - b. Revitalisasi Pasar menuju Pasar Sehat
 - 1) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 - 2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - c. Penguatan Sertifikasi Produksi IKM
 - 1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - d. Penetapan Kawasan dan Promosi Investasi
 - 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - 2) Program Promosi Penanaman Modal
 - e. Peningkatan kompetensi tenaga kerja
 - f. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Penguatan Koperasi dan UMKM
 - 1) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
 - 2) Program Pemberdayaan dan Perlindungan koperasi
 - 3) Program Pemberdayaan Usaha Menengah , Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
 - g. Kampung Budi Daya Perikanan
 - 1) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - 2) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
6. Peningkatan Profesionalisme ASN
 - a. Peningkatan Kompetensi ASN
 - 1) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - b. Pengembangan Karir ASN

- 1) Program Kepegawaian Daerah
- c. Pemerintahan Digital
 - 1) Penyelenggaraan Statistik Sektor
 - 2) Penyelenggaraan Persandian
 - 3) Pengelolaan Aplikasi Informasi
7. Penguatan Stabilitas Politik di Daerah, dilakukan melalui:
 - a. Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada
 - 1) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 2) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - 3) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - b. Pendidikan Politik Masyarakat
 - 1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - 2) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

2.2. Prioritas Pembangunan Daerah 2024-2026

Program prioritas daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD. Program prioritas daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Mengingat strategis dan pentingnya program prioritas daerah, maka dalam pelaksanaannya perlu diprioritaskan dan mendapatkan dukungan penganggaran yang seimbang dengan target yang akan dicapai.

Program-program prioritas pembangunan daerah Kota Cirebon tersebut disusun dengan memperhatikan pula prioritas-prioritas dari kebijakan perencanaan pembangunan tingkat pemerintahan di atasnya yang tertuang di dalam dokumen perencanaannya masing-masing yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Republik Indonesia 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Berdasarkan kebijakan-kebijakan dan prioritas-prioritas yang telah dikemukakan sebelumnya pada RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023, serta permasalahan dan isu-isu strategis Kota Cirebon selama periode RPD 2023-2026, maka ditetapkanlah 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Penanggulangan Kemiskinan;
2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDS-Tuberkulosis-Malaria (ATM);
3. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan;
4. Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Nilai Sejarah;

5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan;
6. Peningkatan Profesionalisme ASN; dan
7. Penguatan Stabilitas Politik di Daerah.

Tabel 2. 1

Integrasi Prioritas Pembangunan Kota Cirebon dengan Program Nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No. 90 Tahun 2019

PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	Sinkronisasi Program PMDN 90
1. Penanggulangan Kemiskinan	Pengelolaan data base dan pelayanan keluarga miskin;	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Program Pendaftaran Penduduk
	Penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin;	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin;	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
	Pemberdayaan keluarga miskin;	Program Pemberdayaan Sosial Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan ATM	Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, konvergensi penurunan stunting, penanggulangan AIDs dan TB	Program Pendaftaran Penduduk
		Program Pencatatan Sipil
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		Program Penanganan Kerawanan Pangan
		Program Pengelolaan Pendidikan
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air	

		Limbah
		Program Pengembangan Permukiman
		Program Pengembangan Perumahan
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
		Program Perencanaan Tenaga Kerja
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja
		Program Hubungan Industrial
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga
		Program Perlindungan Perempuan
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
3. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan	Revitalisasi Kawasan Stadion Bima	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
		Program Penyelenggaraan Jalan
		Program Penataan Bangunan Gedung
	Peningkatan fungsi kualitas RTH	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Pengendalian banjir di wilayah Kawasan Cipto	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
		Program Penanganan Bencana
	Peningkatan kapasitas Masyarakat Tangguh Bencana	Program Penanggulangan Bencana

	Kampung Proklam	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan
	Pengembangan angkutan umum masal perkotaan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
4. Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Nilai Sejarah	Pembangunan dan aktivasi Pusat Budaya Rarasantang	Program Pengembangan Kebudayaan
	Pelestarian Naskah Kuno Daerah	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
	Gapura Pintu masuk Kota	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
	Pelestarian Cagar Budaya (perlindungan)	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	Pengembangan Kampung Wisata (DED)	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	Revitalisasi Pasar menuju Pasar Sehat	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
	Penguatan Sertifikasi Produksi IKM	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
	Penetapan Kawasan dan Promosi Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Program Promosi Penanaman Modal
		Catatan Kegiatan Litbang Bidang Perekonomian
	Peningkatan Kompetensi tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Penguatan Koperasi dan UMKM	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
Program Pemberdayaan Usaha Menengah , Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)		
Kampung Budi Daya Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
6. Peningkatan Profesionalisme ASN	Peningkatan Kompetensi ASN	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Pengembangan Karir ASN	Program Kepegawaian Daerah

	Pemerintahan Digital	Penyelenggaraan Statistik Sektoral
		Penyelenggaraan Persandian
		Pengelolaan Aplikasi Informasi
7. Penguatan Stabilitas Politik di Daerah	Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada;	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
	Pendidikan Politik Masyarakat	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Guna mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, maka pelaksanaan prioritas pembangunan harus fokus dan terarah dengan jelas. Untuk itu perlu dirumuskan tema/fokus pembangunan daerah selama 2 (dua) tahun kedepan maka perlu disusun arah kebijakan untuk mencapai sasaran tersebut. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap dalam penyusunan dokumen RPJMD. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan sebagai cara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan. Meskipun penekanan program prioritas pada setiap tahapan berbeda, namun memiliki sinkronisasi dan konsistensi dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan RPJMD secara khusus dan sasaran perencanaan jangka panjang pada umumnya. Oleh karena itu, dalam menyusun arah kebijakan perlu adanya sinergitas antara berbagai dokumen perencanaan guna menyelaraskan berbagai program pembangunan antar periode maupun antar tingkatan administrasi pemerintahan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil daerah pada masa depan.

2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian indikator pembangunan Kota Cirebon Tahun 2023 serta dengan mempertimbangkan berbagai hal termasuk isu strategis yang berkembang secara global/Internasional, Nasional maupun Regional yang kemungkinan akan dihadapi pada tahun 2024 serta dengan mempedomani Dokumen RPD Kota Cirebon Tahun 2024-2026, maka Pemerintah Kota Cirebon menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai pada tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Cirebon

No	Sasaran	Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah
2.		Harapan Lama Sekolah
3.		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
4.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Cirebon	Angka Harapan Hidup
5.		Angka Kejadian TB
6.		Prevalensi Balita Stunting
7.		Skor Pola Pangan Harapan
8.	Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan
9.		Tingkat Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Jangkauan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Gender /IPG
10.	Terkendalinya Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)
11.		Angka Partisipasi Masyarakat Olahraga

No	Sasaran	Indikator Kinerja
12.	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Pemuda terbina
13.	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender/IPG (Poin)
14.		Indeks Pemberdayaan Gender/IDG (Poin)
15.		Jumlah Skor Evaluasi Kota Layak Anak
16.	Menurunnya dampak perubahan iklim	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
17.	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	Persentase pelestarian obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya
18.	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
19.	Meningkatnya pengembangan ekonomi berkelanjutan	Kontribusi PDRB dari Sektor Industri (ADHB)
20.		Kontribusi PDRB dari Sektor Pariwisata (ADHB)
21.		Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan (ADHB)
22.		Kontribusi PDRB dari Sektor Pertanian dan Perikanan (ADHB)
23.	Meningkatnya investasi penanaman modal	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi PMA dan PMDN
24.	Meningkatnya pelayanan publik berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
25.	Meningkatnya penerapan hasil kelitbangan dan inovasi daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang Diserahkan Untuk Dimanfaatkan Oleh Perangkat Daerah dan/atau Stakeholders
26.	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat
27.		Indeks Perencanaan Pembangunan
28.		Indeks Profesionalitas ASN
29.		Nilai SAKIP
30.		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan
31.		Tingkat Maturitas SPIP
32.	Meningkatnya kualitas pembangunan kewilayahan dan pemberdayaan Masyarakat	Target Kelurahan Cepat Berkembang
33.		Target Kelurahan Swasembada

No	Sasaran	Indikator Kinerja
34.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta stabilitas politik daerah	Indeks Ketahanan Daerah
35.		Jumlah Daerah Rawan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
36.		Jumlah kejadian konflik kebangsaan, nasionalisme dan antar umat beragama

Penetapan IKU ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kinerja, tetapi juga sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Dengan demikian, capaian kinerja Pemerintah Kota Cirebon dapat dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

2.4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan, melalui target-target yang diperjanjikan maka akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan pada tahun tersebut. Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh instansi akan berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas, sehingga kinerja yang diperjanjikan pada tahun tersebut bisa dijadikan prioritas untuk mendapatkan pembiayaan dan menjadi fokus prioritas dalam pencapaian kinerja.

Pemerintah Kota Cirebon menjadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana telah ditetapkan pada Keputusan Walikota Cirebon Nomor 100/Kep.111-BAPPELITBANGDA/2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2024-2026 sebagai acuan dalam menetapkan sasaran pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2024. Dengan memastikan seluruh indikator kinerja utama menjadi indikator yang diperjanjikan maka Pemerintah Kota Cirebon berupaya menjamim program prioritas dapat dilaksanakan guna mendukung indikator kinerja tersebut.

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) Perjanjian Kinerja selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cirebon Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024, dan dokumen Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Sebagai upaya membangun kinerja berkelanjutan, Pemerintah Kota Cirebon melakukan monitoring dan evaluasi kinerja *on years* dan menemukan bahwa beberapa target kinerja telah

tercapai lebih cepat daripada yang ditargetkan, merespon hal tersebut pada tahun 2024 Pemerintah Kota Cirebon meningkatkan target pada beberapa indikator dan mengejawantahkannya pada Perjanjian Kinerja Perubahan dengan target-target yang adaptif dan progresif, berikut Kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2024 tersebut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cirebon (Poin)	76,76
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Persen)	56,08
		Presentase Penduduk Miskin (Persen)	8,94
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	10,75
		Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	13,16
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Poin)	88
1.2	Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Harapan Hidup (Tahun)	75,18
		Angka Kejadian TB (per 100 ribu penduduk)	497
		Prevalensi Balita Stunting (Persen)	14
		Skor Pola Pangan Harapan (Persen)	92
1.3	Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rp)	12.550
		Tingkat Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Jangkauan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (Persen)	100
1.4	Terkendalinya Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)	0,98

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.5	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Olahraga	Angka Partisipasi Masyarakat Olahraga (Persen)	54
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan Pemuda terbina (Persen)	65
1.6	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender/IPG (Poin)	94,47
		Indeks Pemberdayaan Gender/IDG (Poin)	78,7
		Jumlah Skor Evaluasi Kota Layak Anak (Poin)	550
1.7	Menurunnya dampak perubahan iklim	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Persen)	7,26
1.8	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan local	Persentase pelestarian obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya (Persen)	76,50
1.9	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)	7,65
Tujuan:			
2.	Meningkatnya Potensi, Pertumbuhan, Kapasitas, dan Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (Persen)	4,49
Sasaran:			
2.1	Meningkatnya pengembangan ekonomi berkelanjutan	Kontribusi PDRB dari Sektor Industri (ADHB) (Persen)	10,87
		Kontribusi PDRB dari Sektor Pariwisata (ADHB) (Persen)	5,60
		Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan (ADHB) (Persen)	30,46
		Kontribusi PDRB dari Sektor Pertanian dan Perikanan (ADHB) (Persen)	0,34
2.2	Meningkatnya investasi penanaman modal	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Persen)	4,68
Tujuan:			
3.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berwibawa	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	74
Sasaran:			
3.1	Meningkatnya pelayanan publik berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Poin)	3,56

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3.2	Meningkatnya penerapan hasil kelitbangan dan inovasi daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang Diserahkan Untuk Dimanfaatkan Oleh Perangkat Daerah dan/atau <i>Stakeholders</i> (Persen)	71
3.3	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	82
		Indeks Perencanaan Pembangunan (Poin)	95,58
		Indeks Profesionalitas ASN (Poin)	70
		Nilai SAKIP (Poin)	71
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan (Peringkat)	WTP
		Tingkat Maturitas SPIP (Poin)	3
3.4	Meningkatnya kualitas pembangunan kewilayahan dan pemberdayaan Masyarakat	Target Kelurahan Cepat Berkembang (Persen)	90,91
		Target Kelurahan Swasembada (Persen)	40,91
3.5	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta stabilitas politik daerah	Indeks Ketahanan Daerah (Poin)	0,5
		Jumlah Daerah Rawan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lokasi)	12
		Jumlah kejadian konflik kebangsaan, nasionalisme dan antar umat beragama (Kasus)	0

2.5. Rencana Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka mewujudkan kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kota Cirebon pada tahun 2024 melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cirebon dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5
Rencana Belanja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN BELANJA
1	Belanja Pegawai	777.466.978.400,00
2	Belanja Barang dan Jasa	717.290.266.397,00
3	Belanja Bunga	0,00

4	Belanja Subsidi	1.900.000.000,00
5	Belanja Hibah	65.059.408.310,00
6	Belanja Bantuan Sosial	4.165.000.000,00
	JUMLAH	1.565.881.653.107,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon, 2024 (diolah)

Sementara itu berikut adalah rencana penganggaran tahun 2024 berdasarkan program-program yang mendukung pencapaian sasaran pada Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja serta seluruh sasaran strategis di Rencana Pembangunan Daerah Kota Cirebon 2024-2026, rencana anggaran tersebut merupakan komponen dari belanja langsung yang berbentuk program/kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran strategis serta program/kegiatan yang tidak secara langsung mendukung sasaran strategis, pada umumnya program yang tidak mendukung sasaran langsung tersebut merupakan program kegiatan pendukung yang berada pada wilayah kesekretariatan. Rekapitulasi jumlah anggaran program/kegiatan tersebut kami akan uraikan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Rencana Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Rencana Anggaran
1.	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat	
1.1	Meningkatan akses dan mutu pendidikan	122,616,404,617
1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Cirebon	91,509,482,986.00
1.3	Meningkatnya Kemampuan Masyarakat dalam Pemenuhan Kebutuhan Hidup	9,573,508,161.00
1.4	Terkendalinya jumlah penduduk	3,019,399,235.00
1.5	Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Pemuda	12,790,815,619.00
1.6	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	2,383,265,634.00
1.7	Menurunnya Dampak Perubahan Iklim	82,624,988,495.00
1.8	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal	2,624,789,427.00
1.9	Menurunnya Tingkat Pengangguran	3,688,619,935.00
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Potensi, Kapasitas, dan Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi Daerah	

No.	Tujuan/Sasaran	Rencana Anggaran
2.1	Meningkatnya pengembangan ekonomi berkelanjutan	7,135,202,453.00
2.2	Meningkatnya Investasi Penanaman Modal	1,368,558,914.00
3	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berwibawa	
3.1	Meningkatnya pelayanan publik berbasis elektronik	7,766,557,786.00
3.2	Meningkatnya tindak lanjut hasil kelitbangan dan inovasi daerah	734,721,716.00
3.3	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan pemerintahan	28,649,798,563.00
3.4	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kewilayahan dan Pemberdayaan Masyarakat	1,596,660,926.00
3.5	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Stabilitas Politik Daerah	39,423,023,087.00
Total Anggaran		1.576.560.018.375

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2024 (diolah)



BAB III

MEMBAHAS PENCAPAIAN INDIKATOR DAN PERJANJIAN KINERJA 2024 SERTA EVALUASINYA MELALUI PERBANDINGAN DENGAN TARGET SEBELUMNYA, RPJMD, DAN STANDAR NASIONAL. ANALISIS MENCAKUP FAKTOR KEBERHASILAN ATAU KENDALA, ALTERNATIF SOLUSI, SERTA EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI SUMBER DAYA.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif, yang dilakukan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Pemerintah Kota Cirebon melaksanakan kewajiban melaporkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahannya melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cirebon yang dibuat dengan berpedoman pada ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2024 memuat gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026 , RKT Tahun 2024, RKPD Tahun 2024, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya, kemudian realisasi dan target tersebut dilakukan penghitungan untuk menemukan selisih atau celah kinerja (*performance gap*). pada umumnya penghitungan capaian menggunakan rumus $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$, jika semakin tinggi realisasi semakin baik, namun jika semakin rendah realisasi semakin baik maka menggunakan rumus $\frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$ Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mendapat strategi yang tepat dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang (*performance improvement*). Predikat capaian kinerja dapat dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan

pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Tabel Predikat Capaian Kinerja Berdasar Kode Warna

Persentase	Predikat	Kode Warna
<100%	Tidak tercapai	Merah
=100%	Tercapai / Sesuai Target	Hijau
>100%	Melebihi Target	Biru

Sementara predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (<100%) dilakukan pendekatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Tabel Predikat Capaian Kinerja

Predikat	Rata Rata Capaian
Sangat Tinggi	>90
Tinggi	75.00 – 89.99
Sedang	65.00 – 74.99
Rendah	50.00 – 64.99
Sangat Rendah	0 – 49.99

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran utama keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis, dimana hal tersebut merupakan ejawantah dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau Rencana Pemerintah Daerah. Melalui penetapan indikator kinerja utama diharapkan pencapaian kinerja dapat lebih fokus dan terukur. Setelah melalui analisis dan rewiu Indikator Kinerja Utama tersebut ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 100/Kep.111-BAPPELITBANGDA/2024 Tentang Penetapan Indkator Kinerja Utama Tahun 2024-2026. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 didasarkan pada Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026, sehingga seluruh sasaran dan indikator tersebut menjadi sasaran dan indikator yang diperjanjikan. Hasil pengukuran atas akuntabilitas kinerja melalui capaian Indikator Kinerja Utama sekaligus Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 3
Capaian Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja
Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2024

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satu an	Targ et	Realis asi	Capaian Kinerja	Ketera ngan
1	Meningkatn ya kualitas hidup masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cirebon	Poin	76,7 6	78.09	101,73%	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	56,0 8	59,20	105,56%	
		Persentase Penduduk Miskin	Pers en	8,94	9.02	99.10%	
1.1	Meningkatn ya kualitas pendidikan dan literasi masyarakat	Rata–rata lama Sekolah	Tahu n	10,7 5	10,53	97,95%	
		Harapan lama sekolah	Tahu n	13,1 6	13,17	100,07%	Target Di Rubah /Dinaik an pada Perub ahan PK
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	88	95,37	108,38%	
1.2	Meningkatn ya derajat kesehatan masyarakat Kota Cirebon	Angka Harapan Hidup	Tahu n	75,1 8	75,48	100,41 %	
		Angka Kejadian TB	Juml ah	497	1259	53,32%	
		Prevalensi Balita Stunting	Pers en	14	13,04	106,64%	
		Skor Pola Pangan Harapan	Pers en	92	92,6	100,7%	Target Diruba h /Dinaik an di PK Perub ahan
1.3	Meningkatn ya kemampua n	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	Ribu Rupi ah	12.5 50	12.869	102,54%	Target di rubah , semul

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satu an	Targ et	Realis asi	Capaian Kinerja	Ketera ngan
	masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup						a 12.500 karena pencapaian tahun 2023 adalah 12.506
		Tingkat Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Jangkauan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Pers en	100	99,78	99,78%	
1.4	Terkendali nya Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)	Pers en	0,98	1,22	75,51%	
1.5	Meningkatn ya Kapasitas Daya Saing Kepemuda an dan Olahraga	Angka Partisipasi Masyarakat Olahraga	Pers en	54	55,00	101,85%	
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan Pemuda terbina	Pers en	65	66,07	101,65%	
1.6	Meningkatn ya peran perempuan dalam pembangu nan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender/IPG (Poin)	Poin	94,4 7	95,55	101,15%	
		Indeks Pemberdayaa n Gender/IDG (Poin)	Poin	78,7 0	77,03	98,16%	
		Jumlah Skor Evaluasi Kota Layak Anak	Poin	550	638,52	116,09%	
1.7	Menurunny a dampak perubahan iklim	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Pers en	7,26	7,99	110,05%	

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satu an	Targ et	Realis asi	Capaian Kinerja	Ketera ngan
1.8	Meningkatn ya pelestarian dan pengemba ngan kebudayaa n lokal	Persentase pelestarian obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya	Pers en	76,5 0	77,45	101,24%	
1.9	Menurunny a tingkat penganggu ran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Pers en	7,65	6,29	117,8%	
2	Meningkat nya Pertumbu han Potensi, Kapasitas , dan Kontribusi Pertumbu han Ekonomi Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Poin	4,49	5,02	122,74%	Hasil Penilai an Mandiri Pelaks anaan RB
2.1	Meningkatn ya pengemba ngan ekonomi berkelanjut an	Kontribusi PDRB dari Sektor Industri (ADHB)	Nilai	10,8 7	10,09	92,82%	
		Kontribusi PDRB dari Sektor Pariwisata (ADHB)	pers en	5,60	5,72	102,14%	Diruba h /Dinaik an pada PK Perub ahan
		Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan (ADHB)	pers en	30,4 6	27,31	89,66%	
		Kontribusi PDRB dari Sektor	pers en	0,34	0,32	94,12%	

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satu an	Targ et	Realis asi	Capaian Kinerja	Ketera ngan
		Pertanian dan Perikanan (ADHB)					
2.2	Meningkatn ya investasi penanama n modal	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi PMA dan PMDN	pers en	4,68	0,36	101,50%	
3.	Meningkatk an Tata Kelola Pemerintah an yang Berwibawa	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	74	84,13	113,69%	Target di rubah/ dinaika n Pada PK Perub ahan
3.1	Meningkatn ya pelayanan publik berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,56	4,13	116,01%	Target Diruba h/Dinai kan Pada PK Perub ahan Tahun 2024
3.2	Meningkatn ya penerapan hasil kelitbangan dan inovasi daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang Diserahkan untuk Dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dan/atau Stakeholders	Pers en	71	71,43	100,61%	
3.3	Meningkatn ya dukungan penyelengg araan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	82	86,59	105,60%	

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satu an	Targ et	Realis asi	Capaian Kinerja	Ketera ngan
	pemerintah an	Indeks Perencanaan Pembangunan	Poin	95,5 8	97,94	102,47%	
		Indeks Profesionalitas ASN	Poin	70	78,85	112,5%	
		Nilai SAKIP	Poin	71	69,04	97,24%	
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Perin gkat	WTP	WTP	100%	
		Tingkat Maturitas SPIP	Poin	3	3,074	102,47%	
3.4	Meningkatn ya kualitas pembangu nan kewilayah an dan pemberday aan Masyarakat	Target Kelurahan Cepat Berkembang	Pers en	90,9 1	90,91	100%	
		Target Kelurahan Swasembada	Pers en	40,9 1	59,09	144,44%	
3.5	Meningkatn ya ketentram an dan ketertiban umum serta stabilitas politik daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,5	0,77	154%	
		Jumlah Daerah Rawan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Loka si	12	12	100%	
		Jumlah kejadian konflik kebangsaan, nasionalisme dan antar umat beragama	Kasu s	0	0	100%	

Dari tabel diatas dapat terlihat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja tersebut sebagai berikut

Tujuan 1: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cirebon, pencapaian 101,73% dengan Predikat **Melebihi Target**
2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), pencapaian 105,56%, dengan predikat **Melebihi Target**
3. Persentase Penduduk Miskin, pencapaian 99,10% dengan predikat **Sangat Tinggi**

Indikator Sasaran pada Tujuan 1:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi masyarakat, pencapaian 102,13% dengan predikat **Melebihi Target**
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Cirebon, pencapaian 90,27% dengan predikat **Sangat Tinggi**
3. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup, pencapaian 101,16% dengan predikat **Melebihi Target**
4. Terkendalnya Jumlah Penduduk, pencapaian 75,51% dengan predikat **Tinggi**
5. Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Olahraga, pencapaian 101,75% dengan predikat **Melebihi Target**
6. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dan perlindungan anak, pencapaian 105,13% dengan predikat **Melebihi Target**
7. Menurunnya dampak perubahan iklim, pencapaian 110,06% dengan predikat **Melebihi Target**
8. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal, pencapaian 101,24% dengan predikat **Melebihi Target**
9. Menurunnya tingkat pengangguran, pencapaian 117,80% dengan predikat **Melebihi Target**

Tujuan 2 Meningkatkan Pertumbuhan Potensi, Kapasitas, dan Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi Daerah:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), pencapaian 122,74% dengan predikat **Melebihi Target**

Indikator Sasaran pada Tujuan 2:

1. Meningkatnya pengembangan ekonomi berkelanjutan, pencapaian 94,69% dengan predikat **Sangat Tinggi**

2. Meningkatnya investasi penanaman modal, pencapaian 101,50% dengan predikat **Melebihi Target**

Tujuan 3 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berwibawa:

1. Indeks Reformasi Birokrasi, pencapaian 113,69% dengan predikat **Melebihi Target**

Indikator Sasaran pada Tujuan 3:

1. Meningkatnya pelayanan publik berbasis elektronik, pencapaian 116,01% dengan predikat **Melebihi Target**
2. Meningkatnya penerapan hasil kelitbangan dan inovasi daerah, pencapaian 100,61% dengan predikat **Melebihi Target**
3. Meningkatnya dukungan penyelenggaraan pemerintahan, pencapaian 103,38% dengan predikat **Melebihi Target**
4. Meningkatnya kualitas pembangunan kewilayahan dan pemberdayaan Masyarakat, pencapaian 122,22% dengan predikat **Melebihi Target**
5. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta stabilitas politik daerah, pencapaian 118% dengan predikat **Melebihi Target**

Pencapaian Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari 21 Indikator, didapati indikator dengan pencapaian melebihi target 17, pencapaian sesuai target berjumlah 3, dan pencapaian tidak sesuai target namun dengan predikat Sangat Tinggi atau >90% berjumlah 3, dan pencapaian predikat Tinggi berjumlah 1 berikut disajikan persentase hasil pencapaian indikator kinerja utama dalam bentuk diagram:

Gambar 3. 1
Diagram realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama



Pencapaian dari Indikator Kinerja Utama juga merupakan capaian dari Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Wali Kota Tahun 2024, hal ini karena seluruh Indikator Kinerja Utama diperjanjikan oleh Wali Kota Cirebon selaku pimpinan Pemerintah Kota Cirebon. Sinkronisasi ini merupakan suatu upaya menjamin seluruh indikator kinerja utama sebagai tolak ukur utama dalam pencapaian kinerja dapat menjadi prioritas kinerja Pemerintah Kota Cirebon.

Penjelasan tentang Indikator Kinerja Utama yang juga tertuang dalam Perjanjian Kinerja dan seluruh tujuan serta sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Cirebon 2024-2026 akan diuraikan pada sub bab berikutnya, yaitu sub bab pengukuran, analisis dan evaluasi capaian kinerja.

3.2. Pengukuran, Analisis, dan Evaluasi Pencapaian Kinerja

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan terkait pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan, khususnya memberikan gambaran pencapaian terhadap indikator kinerja utama dimana indikator tersebut juga diperjanjikan sebagai Perjanjian Kinerja Wali Kota Tahun 2024. Hasil pengukuran tersebut kemudian dianalisis guna mendapatkan informasi yang akurat terkait faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menjadi kendala. Hal ini menjadi informasi yang valid guna melakukan evaluasi terhadap keberhasilan ataupun kegagalan dari suatu indikator yang telah ditetapkan.

Sebagai upaya memberi gambaran pencapaian target atas kinerja yang dilakukan Pemerintah Kota Cirebon secara komprehensif serta dalam rangka keperluan menganalisa dan mengevaluasi seluruh sasaran strategis yang telah ditetapkan berikut kami sajikan data pencapaian kinerja sesuai pada tabel capaian kinerja sebelumnya bahwa sasaran dengan rata-rata **pencapaian indikator tertinggi** adalah sasaran 3.4 “Meningkatnya kualitas pembangunan kewilayahan dan pemberdayaan Masyarakat” dengan rata-rata capaian indikator **122,22%**, sementara sasaran dengan **pencapaian terendah** adalah sasaran 1.4 “Terkendalnya Jumlah Penduduk” dengan pencapaian **75,51%**, sementara **rata-rata pencapaian Indikator pada seluruh Tujuan/Sasaran** adalah **103,54%**. Masing-masing Tujuan/Sasaran serta indikatornya akan dijelaskan secara terperinci dengan memuat analisa dan evaluasi sebagai berikut:

1. Perbandingan Realisasi kinerja tahun ini dengan target
2. Perbandingan realisasi kinerja dengan target beberapa tahun lalu
3. Perbandingan dengan target realisasi tahun ini dengan target jangka menengah RPJMD
4. Perbandingan target tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan (kendala) serta alternative solusi
6. Analisis Program/Kegiatan yang mendukung keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja
7. Analisis atas efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya (akan dijelaskan secara lebih rinci pada sub bab tersendiri)

Pengukuran, analisa dan evaluasi tersebut dijelaskan per masing-masing Sasaran sebagai berikut:

Tujuan 1 : "Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat"

"Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat ", sesuai dengan arah kebijakan dalam Rencana Pemerintah Daerah 2024-2026, meningkatkan kualitas hidup masyarakat menjadi tujuan ke 1 (satu) dalam perencanaan strategis transisi. Tujuan "meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat memiliki 9 (sembilan) sasaran, akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3. 4
Capaian Kinerja Tujuan 1 "Meningkatkan kualitas hidup masyarakat" Tahun 2024

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi		Target Akhir RPD (2026)	Capaian Kinerja 2024
					N-1 (2023)	2024		
1.	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cirebon	Poin	76,76	76,46	78.09	77,80	101,73%
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persen	56,08	50,04	59,20	56,18	105,56%
		Presentase Penduduk Miskin	Persen	8,94	9,16	9.02	8,81	99,10%
Rata Rata Capaian Indikator Kinerja								102,13%

Tujuan "Meningkatnya kualitas hidup masyarakat "diukur oleh 3 (tiga) indikator yang lazim digunakan dalam mengukur sejauh mana kualitas sumber daya manusia sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia
2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
3. Prentase Penduduk Miskin

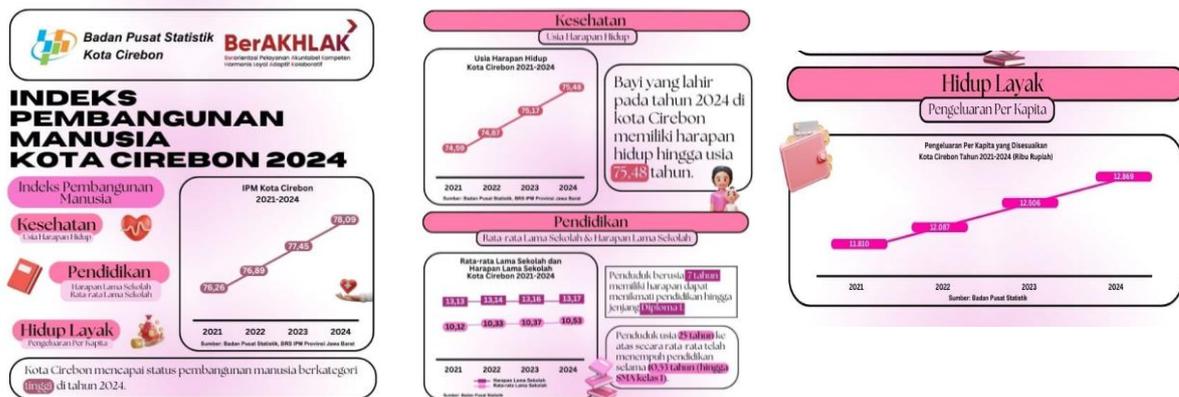
Pencapaian Indikator ke – 1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah. IPM dikembangkan oleh *United Nations Development Programme (UNDP)* dan mengukur tiga dimensi utama, Kesehatan, Pendidikan, dan Standar Hidup Layak melalui pengukuran angka pengeluaran perkapita.

IPM dinyatakan dalam angka antara 0 hingga 100, di mana semakin tinggi angka IPM, semakin baik tingkat pembangunan manusia di daerah tersebut. Pemerintah Kota Cirebon menjadikan IPM sebagai indikator dalam Tujuan ke-1 mencerminkan komitmen yang tinggi terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan di Kota Cirebon. Pengukuran pada IPM dapat menjadi evaluasi berharga bagi Pemerintah Kota Cirebon untuk menganalisa keberhasilan pembangunan sosial dan ekonomi, membantu perencanaan dan prioritas kebijakannya, serta menentukan alokasi anggaran yang tepat.

Berdasarkan data yang di rilis BPS pada Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia Kota Cirebon tahun 2024 , pembangunan manusia di Kota Cirebon terus mengalami kemajuan dalam beberapa tahun terakhir dimana IPM Kota Cirebon terus meningkat. IPM Kota Cirebon meningkat dari 70,74 pada tahun 2010 dan pada tahun 2024 berada pada 78,09.

Gambar 3. 2
Indeks Pembangunan Manusia Kota Cirebon Tahun 2024



Selama periode tersebut, IPM Kota Cirebon rata-rata tumbuh sebesar 0,56 persen per tahun. disandingkan dengan target Pemerintah Kota Cirebon pada tahun 2024 maka capaian Kinerja pada indikator ini adalah : $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = \frac{78,09}{76,76\%} \times 100\% = 101,73$. IPM Kota Cirebon **lebih tinggi daripada rata-rata IPM Nasional Tahun 2024** yaitu 75,02.

Gambar 3. 3
IPM Kota Cirebon 2020-2024



Sumber : BPS Kota Cirebon-Cirebon Satu Data,di olah

Gambar 3. 4
Pemkot Cirebon di Tahun 2024 Fokus pada Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, dan Ekonomi Daerah



Menurut Pj Wali Kota, Cef Bukan Sekadar Festival Semata, Melainkan Langkah Besar Dalam Upaya Pengembangan Potensi Ekonomi Di Daerah, Khususnya Di Wilayah Ciayumajakuning (cirebonkota.go.id, 2024)



Pj Walikota Cirebon, H. agus Mulyadi membuka acara orasi pencegahan stunting dengan aksi bergizi di Grage City Mall Cirebon (Cirebon, fajarsatu.com,2024)



Pemda Kota Cirebon Pada Tahun 2024 Akan Memprioritaskan Peningkatan Sumber Daya Manusia (Sdm) Dan Perbaikan Infrastruktur Pendidikan. Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Wali Kota Cirebon, Drs. H. Agus Mulyadi, M.Si., Memimpin Briefing Staf Bersama Di Aula Dinas Pendidikan (cirebonwartanews.com)

Dalam pencapaian IPM tahun 2024 berikut faktor pendukung, penghambat serta strategi pemecahan masalah sebagai evaluasi untuk implementasi kinerja pada tahun berikutnya.

Tabel 3. 5
Faktor Pendukung, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Tujuan 1 Indikator 1 “Indeks Pembangunan Manusia Kota Cirebon”

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
<ul style="list-style-type: none"> Program sektor kesehatan dan pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik seperti akses pendidikan dan pelayanan dasar kesehatan yang mudah kemampuan daya beli masyarakat meningkat Pertumbuhan ekonomi yang stabil Pemberdayaan UMKM melalui berbagai program 	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat kemiskinan yang belum dapat ditekan lebih optimal Masih adanya budaya lokal yang tidak mendukung program pendidikan dan kesehatan (imunisasi, pentingnya pendidikan dasar Belum optimalnya pemanfaatan data kemiskinan secara terpadu dalam penanggulangan kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar program yang mempengaruhi kondisi IPM Melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama Meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan pemberdayaan masyarakat

Pencapaian Indikator ke-2 “Persentase Penduduk Miskin”

38.867 KPM di Kota Cirebon Terima Bantuan Pangan Beras Tahun 2024

6 FEBRUARI 2024



sumber gambar :
about.cirebon.go.id,2024

Tahun 2024 Pemerintah Kota Cirebon menargetkan persentase penduduk miskin sebesar 8,94% ri total penduduk wilayah Kota Cirebon. Pemerintah Kota Cirebon telah gencar menekan angka kemiskinan salah satunya dengan penguatan isu Kemiskinan sebagai isu tematik dalam Reformasi Birokrasi, rencana aksi terhadap penanggulangan

Kemiskinan di senengikan dalam satu koordinasi pada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Terpadu.

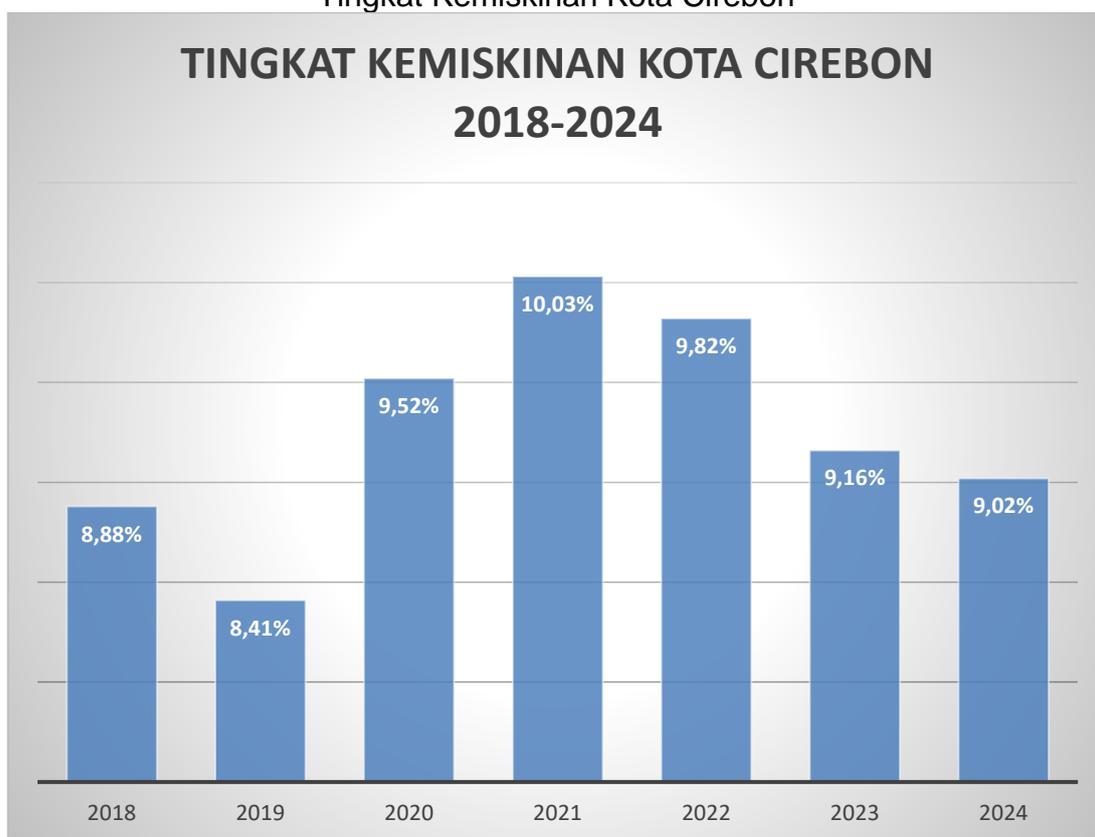
Pada tahun 2024 berdasarkan data yang dirilis BPS bahwa persentase penduduk miskin Kota Cirebon adalah 9,02%

Berdasarkan realisasi tersebut maka pencapaian indikator dapat dihitung dengan menggunakan rumus $\frac{Target+(Target-Realisasi)}{Target} \times 100\% =$

$$\frac{8,94\%+(8,94\%-9,02\%)}{8,94\%} \times 100\% = 99,10\% \text{ atau berpredikat **Sangat Tinggi**}$$

Persentase Kemiskinan Kota Cirebon pada angka 9,02% **sedikit lebih baik jika dibandingkan Persentase Kemiskinan Tingkat Nasional yang berada pada 9.03%**, disamping hal tersebut Kota Cirebon sangat focus pada penanganan masyarakat rentan khususnya untuk mengatasi potensi kemiskinan ekstreme yang docanangkan 05 pada tahun 2024. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, kemiskinan Kta Cirebon selalu menunjukkan trend penurunan kecuali pada masa pandemi covid 19 yang cukup menekan kondisi prekonomian nasional maupun lokal.

Gambar 3. 5
Tingkat Kemiskinan Kota Cirebon



Sumber: BPS Kota Cirebon-Cirebon Satu Data (diolah)

Dalam pencapaian kinerja menekan angka kemiskinan pada tahun 2024 berikut faktor pendukung, penghambat serta strategi pemecahan masalah sebagai evaluasi untuk implementasi kinerja pada tahun berikutnya.

Tabel 3. 6
Faktor Pendukung, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Tujuan 1 Indikator 2 “Tingkat Kemiskinan Kota Cirebon”

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan penurunan harga BBM oleh Pemerintah pusat • Kebijakan pemberian BLT kepada keluarga miskin • Penekanan laju inflasi oleh pemerintah daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya Kinerja Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah • Penanggulangan kemiskinan daerah belum dimanfaatkan data kemiskinan secara terpadu dalam penanggulangan kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan kinerja tim penanggulangan kemiskinan daerah, diantaranya dengan meningkatkan mekanisme FGD yang lebih komprehensif pada rencana aksi penanggulangan kemiskinan • Pemanfaatan data kemiskinan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan • Pemberian program beasiswa Pendidikan untuk Strata 1 atau Pendidikan Tinggi lainnya untuk meningkatkan peluang masyarakat rentan / tidak mampu memiliki akses lebih tinggi pada pekerjaan formal.

Pencapaian Indikator Ke-3 Indeks Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan hidup (IKLH) lazim digunakan untuk mengukur kualitas daya dukung lingkungan pada suatu wilayah, Kota Cirebon yang merupakan satu wilayah perkotaan dan menjadi pusat ekonomi di wilayah sekitarnya menjadikan upaya mempertahankan indeks kualitas lingkungan hidup yang baik menjadi tantangan tersendiri. Pada tahun 2024 Kota Cirebon menargetkan IKLH pada 56,08 poin, dan berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, realisasi pada tahun 2024 adalah 59,20, maka pencapaian indikator ini adalah $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\% =$

$\frac{59,20}{56,80} \times 100\% = 105,56\%$ atau **Melebihi Target**. Jika disandingkan dengan IKLH

Nasional pada tahun 2024 di level 73,07 maka Realisasi Kota Cirebon lebih rendah dari capaian Nasional di kualitas Lingkungan Hidup, kendati hal ini terjadi

karena Kota Cirebon yang di dominasi wilayah perkotaan, namun menjadi catatan penting diperlukanya peningkatan yang serius dalam kebijakan lingkungan hidup

Dalam beberapa tahun terakhir berikut perkembangan indeks kualitas lingkungan hidup di Kota Cirebon

Gambar 3. 6
Indeks Lingkungan Hidup Kota Cirebon 2018-2024



Sumber : DLH Kota Cirebon dan Cirebon Satu Data, di olah

Gambar 3. 7
Penghargaan yang diterima Bank Sampah Mekar Berseri



Penghargaan Anugerah Raksa Prasada Tahun 2024 Yang Bertepatan Dengan Peringatan Hari Cinta Puspa Dan Satwa Nasional (Hcpsn) Tingkat Provinsi Jawa Barat Yang Dilaksanakan Pada Rabu 11 Desember 2024 Bertempat Di Plaza Gedung Sate Kota Bandung, Tiga Sekolah Dari Kota Cirebon Yaitu Sd Negeri Kalijaga Permai, Sd Negeri Pesantren Dan Sd Negeri Bima Telah Mendapatkan Penghargaan Raksa Prasada Kategori Sekolah Berbudaya Lingkungan/Adiwiyata. Selain Itu, Bank Sampah Mekar Berseri Dari Rw.09 Kesunegan Selatan, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk Juga Telah Mendapatkan Penghargaan Raksa Prasada Kategori Bank Sampah Induk Berbasis Masyarakat.

Dalam pencapaian kinerja meningkatkan kualitas lingkungan hidup pada tahun 2024 berikut faktor pendukung, penghambat serta strategi pemecahan masalah sebagai evaluasi untuk implementasi kinerja pada tahun berikutnya.

Tabel 3. 7
Faktor Pendukung, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Tujuan 1 Indikator 3 “Indeks Lingkungan Hidup Kota Cirebon”

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Edukasi dan Komunikasi lingkungan • Peningkatan Ijin Pembuangan Air Limbah • Peningkatan Aksi penurunan Gas Rumah Kaca • Peningkatan Penghijauan baik lahan komersil atau Privat • Peningkatan koordinasi antar stake holder terkait upaya peningkatan kualitas lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kesadaran Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam menjaga lingkungan • Kurangnya sinergitas stake holder dalam upaya menjaga lingkungan • Banyaknya lahan Kritis • banyaknya pemukiman disepanjang sungai 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Regulasi terkait upaya Peningkatan Kualitas Lingkungan • Peningkatan Pengawasan Implementasi Ijin Lingkungan • Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Limbah Domestik dan Usaha Kecil • Peningkatan Tutupan Vegetasi • Peningkatan Kawasan mangrove • Pemulihan lahan galian C

Evaluasi Tujuan 1 “meningkatnya kualitas hidup masyarakat”

Tujuan 1 “Menciptakan Kualitas Hidup Masyarakat” yang ditetapkan dengan pengukuran pada 3 indikator memiliki rata-rata pencapaian **102,13%**. Pencapaian ini menjadi trend positif adanya *impact* dari upaya pembangunan baik secara fisik maupun non fisik oleh Pemerintah Kota Cirebon.

Pencapaian Tujuan 1 “Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat”, merupakan gambaran makro yang dipengaruhi berbagai capaian pada 9 sasaran yang menopang tujuan 1 ini, sehingga analisa faktor yang mendukung, permasalahan serta Strategi pemecahan masalah juga akan terurai secara komprehensif pada setiap sasaran pada Tujuan 1 “Meningkatnya kualitas hidup masyarakat”, uraian penjelasan capaian serta evaluasinya akan di jelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1.1 “Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Literasi Masyarakat”

Tabel 3. 8
Capaian Sasaran 1.1 “Meningkatnya kualitas Pendidikan dan literasi masyarakat” Tahun 2024

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi		Target Akhir RPD (2026)	Capaian Kinerja 2024
					N-1 (2023)	2024		
1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,75	10,37	10,53	11,17	97,95%
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,16	13,16	13,17	13,18	100,07%
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	88	87,75	95,37	11,00	108,38%
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator								102,13%

Sasaran Strategis 1.1 “Meningkatkan akses dan mutu pendidikan” merupakan upaya mendukung Visi Misi Kota Cirebon dari bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebagai tolak ukur pencapaian sasaran ditetapkan dua indikator yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dimana keduanya juga ditetapkan sebagai merupakan Indikator Kinerja Utama Kota Cirebon

Pencapaian Indikator ke-1 dan ke-2 “Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah”

Rata-rata Lama Sekolah “RLS” adalah jumlah rata-rata tahun pendidikan yang telah dijalani oleh penduduk usia 25 tahun ke atas sementara Harapan Lama Sekolah atau HLS adalah perkiraan jumlah tahun sekolah yang diharapkan dapat dijalani oleh anak yang baru memasuki dunia pendidikan dengan asumsi bahwa pola partisipasi sekolah saat ini tetap berlaku di masa depan. Pada Tahun 2024 Kota Cirebon menargetkan RLS berada pada angka 10,75 dan HLS pada angka 13,16 tahun.

Berdasarkan data yang di rilis BPS Kota Cirebon , 2024 bahwa di **Kota Cirebon RLS mencapai angka 10,53 Tahun** yang dapat diartikan bahwa rata-rata penduduk Kota Cirebon yang berusia 25 tahun ke atas rata-rata telah menempuh Pendidikan hingga SMA kelas 1, hal ini **lebih baik daripada RLS Nasional 9,22 tahun** yang berarti penduduk usia 25 tahun keatas rata-rata mencapai Pendidikan kelas 3 SMP dan terdapat sebagian kecil yang dapat menempuh Pendidikan SMA kelas 1. Capaian kinerja atas indikator RLS ini dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{10,53}{10,75} \times 100\% = \mathbf{97,95\%}$$
 atau predikat **Sangat Tinggi**.

Sementara HLS Kota Cirebon pada tahun 2024 mencapai 13,17 yang berarti penduduk Kota Cirebon berusia 7 tahun dapat menikmati Pendidikan hingga jenjang Diploma1 hal ini **tidak jauh berbeda dengan kondisi nasional dengan angka HLS 13,21 Tahun yang berarti** penduduk berusia 7 tahun dapat menikmati Pendidikan hingga jenjang Diploma1. Secara kinerja capaian atas indikator ini dihitung sebagai berikut : $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{10,53}{10,75} \times 100\% = \mathbf{97,95\%}$

Gambar 3. 8

RLS dan HLS 2021-2024 Kota Cirebon



Sumber Data : BPS, 2024

Pencapaian Indikator ke 3 “Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat”

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai upaya pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai

sarana belajar sepanjang hayat guna mencapai budaya literasi di masyarakat. IPLM terdiri dari tujuh unsur utama:

1. Pemerataan layanan perpustakaan
2. Ketercukupan koleksi
3. Ketercukupan tenaga perpustakaan
4. Tingkat kunjungan masyarakat per hari
5. Jumlah perpustakaan berstandar nasional
6. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi atau promosi
7. Jumlah anggota perpustakaan

Pada tahun 2024 Pemerintah Kota Cirebon mendapat nilai IPLM 95,37, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (2023) yaitu 87,75. Berdasarkan target pada tahun 2024 sebesar 88,0 maka capaian kinerja atas IPLM adalah 108,38% atau **Melebihi Target**. Jika disandingkan dengan kondisi Nasional dimana **IPLM Nasional sebesar 73,52** maka capaian **IPLM Kota Cirebon jauh lebih baik dibandingkan IPLM Nasional**

Evaluasi sasaran 1.1 “Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi masyarakat”

Trend positif dalam pencapaian sasaran yang ditunjukkan melalui 3 indikator yang meningkat capaiannya dari tahun ke tahun, menjadi bukti bahwa setiap tahun akses dan mutu pendidikan serta literasi masyarakat di Kota Cirebon semakin baik. Hal ini ditunjang Program-program utama yang mempengaruhi secara langsung sasaran sebagai berikut:

Tabel 3. 9
Capaian Realisasi Anggaran program pendukung sasaran 1.1

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian	Pelaksana
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	119,223,950,493	118,226,647,902.00	99,164%	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1,564,810,868.00	1,563,342,068.00	99,906%	Dinas Pendidikan
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	937,815,620.00	921,163,418.00	98,224%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	726,247,052	725822006	99.941%	Dinas Pendidikan
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			99,31%	

Berdasarkan data capaian kinerja anggaran pada program pendukung diatas, bahwa capaian kinerja anggaran program tersebut hingga 99,31% sementara rata-rata capaian kinerja indikator sasaran mencapai 102,13%, hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja indikator efektif dan efisien dengan selisih 2,82% dengan capaian kinerja anggaran / penyerapan anggaran. Berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalahnya:

Tabel 3. 10
Faktor Pendukung, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 1.1. “Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi masyarakat”

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Indikator 1 : Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Indikator 2 : Harapan Lama Sekolah (HLS)		
Faktor Pendukung : Terlaksananya Program Program yang mendukung Sasaran Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengembangan Kurikulum Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya anak usia putus sekolah di jenjang SMA, berdasarkan penelusuran umumnya diakibatkan karena kenakalan remaja dan faktor ekonomi • Pembatasan kewenangan pada manajemen pendidikan, bahwa Jenjang pendidikan SMA merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi 	Meningkatkan Koordinasi dan sinergitas antara Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Satuan Polisi Pamong Praja dan stake holder terkait urusan Sosial, serta Ketrentaman dan Ketertiban
Indikator 3 “Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat”		

Faktor Pendukung :	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah :
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Akses dan Infrastruktur Perpustakaan • Peningkatan Program Literasi yang Relevan • Kolaborasi dengan Lembaga Pendidikan dan Komunitas • Pemanfaatan Teknologi dan Media Sosial • Komitmen dan Dukungan Pihak Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Kesadaran dan Minat Membaca di Masyarakat • Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya Manusia • Ketimpangan Digitalisasi bagi masyarakat menengah kebawah 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Infrastruktur • Meningkatkan Budaya Membaca melalui Kampanye • Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia • Peningkatan Kerja Sama dengan Sektor Swasta dan Komunitas • Peningkatan Akses Teknologi

Sasaran 1.2 “Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat”

Tabel 3. 11
Capaian Sasaran 1.2 “Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi Masyarakat”
Tahun 2024

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi		Target Akhir RPD (2026)	Capaian Kinerja 2024
					N-1 (2023)	2024		
1.2	Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,18	75,17	75,48	73,03	100,41%
		Prevalensi Balita Stunting	Persen	14	17	13,04	13	106,64%
		Angka Kejadian TB	Per 100 ribu pddk	497	1170	1259	405	53,32%
		Skor Pola Pangan Harapan/PPH	Poin	92	92,8	92,6	88,5	100,7%
Rata Rata Capaian Indikator Kinerja								90,27%

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat merupakan sasaran strategis yang penting bagi Pemerintah Kota Cirebon. Hal ini sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap

individu, sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah Kota Cirebon telah menetapkan strategi "Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan" untuk mencapai sasaran ini. Salah satu program yang diimplementasikan adalah "Program Kampung Siaga", yang bertujuan meningkatkan peran serta masyarakat dalam menangani masalah kesehatan, khususnya terkait ibu hamil, bayi, dan anak balita. Selain itu, upaya penurunan angka stunting juga menjadi fokus, dengan memberikan akses bagi masyarakat untuk memperoleh bahan pangan bergizi yang terjangkau, sehingga anak-anak di Kota Cirebon mendapatkan asupan gizi seimbang sejak usia dini. Sasaran ini ditopang 3 indikator yang menjadi gambaran pencapaian keberhasilan atas sasaran yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Prevalensi Stunting, dan Skor Pola Pangan Harapan. Berikut gambaran capaian tiap indikator tersebut.

Pencapaian Indikator 1 “Usia Harapan Hidup ”

Usia Harapan Hidup secara umum mencerminkan kualitas kesehatan suatu populasi, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, pola hidup, serta kondisi lingkungan. Pemerintah Kota Cirebon menargetkan Usia Harapan Hidup di tahun 2024 adalah 72,77. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Angka Harapan Hidup Kota Cirebon tahun 2024 adalah 75,48 tahun. Dengan pencapaian tersebut Pemerintah Kota Cirebon berhasil melampaui target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja $\frac{R}{T} \times 100\% = \frac{75,48}{75,18} \times 100\% = 100,41\%$ atau **Melebihi Target**, bahkan pencapaian ini **melebihi Usia Harapan Hidup Nasional** yang berada pada angka 73,93 tahun per tahun 2023.

Tabel 3. 12
Perkembangan Usia Harapan Hidup 2014-2024



Sumber data : BPS-Cirebon Satu Data , diolah

Pencapaian Indikator 2 “Prevalensi Stunting”

Prevalensi stunting adalah persentase anak di bawah usia lima tahun yang mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, atau kondisi sosial-ekonomi yang kurang mendukung. Stunting diukur berdasarkan tinggi badan anak dibandingkan dengan standar WHO, di mana anak dengan tinggi badan lebih dari -2 standar deviasi dari median standar dianggap mengalami stunting. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan jumlah kasus stunting yang ada di suatu daerah berdasarkan data yang telah dihimpun.

Pemerintah Kota Cirebon memiliki perhatian yang besar terhadap isu ini dengan menekan angka prevalensi stunting serendah-rendahnya, pada tahun 2024 Pemerintah Kota Cirebon menargetkan angka prevalensi stunting sebesar 14%, berdasarkan data yang didapat dari BPS dan Dinas Kesehatan, pada tahun 2024 prevalensi stunting Kota Cirebon adalah 13,04%, maka capaian kinerja adalah

$$\frac{\text{Target} + (\text{Target} - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{14\% + (14\% - 13,04\%)}{14\%} \times 100\% = 106,64\% \text{ atau } \mathbf{Melebihi}$$

Target, kondisi prevalensi stunting Kota Cirebon dengan angka 13,04% ini lebih baik dibandingkan kondisi nasional yang Menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi stunting nasional sebesar 21,5 persen.

Gambar 3. 9
Data Prevalensi Stunting 2014-2024



Sumber data : BPS-Cirebon Satu Data 2024, diolah

Pencapaian Indikator 3 “Angka Kejadian TB”

Angka kejadian Tuberkulosis (TB) pada tahun 2023 tercatat sebesar 1.170 per 100 ribu penduduk. Angka ini menunjukkan beban kesehatan yang cukup signifikan dalam masyarakat. Pada tahun 2024, target yang ditetapkan adalah penurunan hingga 495 per 100 ribu penduduk, yang mencerminkan komitmen untuk menekan penyebaran penyakit tersebut. Namun, data realisasi pada tahun 2024 justru menunjukkan kenaikan angka kejadian menjadi 1.259 per 100 ribu penduduk. Hal ini menandakan bahwa strategi yang diterapkan untuk mencapai target kemungkinan belum optimal. Beberapa faktor penyebab yang mungkin memengaruhi kegagalan pencapaian target yaitu ketidakpatuhan pengobatan, kurangnya edukasi masyarakat, serta kendala pada sistem kesehatan. TB merupakan salah satu penyakit menular yang dapat menyebabkan komplikasi serius hingga kematian jika tidak tertangani dengan baik, sehingga tingginya angka kejadian TB bisa menurunkan angka harapan hidup di masyarakat.

Meningkatnya angka kejadian Tuberkulosis (TB) dari tahun 2023 hingga 2024 erat kaitannya dengan upaya penemuan dan pelacakan kasus yang dilakukan secara intensif. Kota Cirebon menjadi kota dengan capaian temuan kasus TB tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Salah satu penyebab tingginya temuan kasus TB di Kota Cirebon karena banyak pasien TB dari wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan) dirujuk ke fasilitas kesehatan di Kota Cirebon yaitu RSD Gunung Jati. Hal ini menyebabkan angka kejadian TB terlihat tinggi dibandingkan daerah lain. Tingginya temuan kasus TB ini juga mengidentifikasi bahwa adanya keberhasilan dalam mendeteksi lebih banyak kasus yang sebelumnya mungkin tidak dilaporkan atau tidak terdiagnosis.

Semakin banyak kasus yang ditemukan, penanganan dan pengobatan dapat dilakukan lebih dini, sehingga risiko penularan dalam komunitas dapat diminimalkan. Langkah ini selaras dengan tujuan Eliminasi TB 2030 yang bertujuan untuk menekan angka kejadian TB secara signifikan. Penemuan kasus yang tinggi menjadi landasan penting untuk mencapai target tersebut, karena memungkinkan pemberian pengobatan yang tepat kepada pasien sekaligus mencegah terjadinya komplikasi yang lebih berat.

Merujuk pada target pada tahun 2023 Dengan pencapaian tersebut Pemerintah Kota Cirebon berhasil melampaui target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja $\frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\% = \frac{497 - (1259 - 497)}{497} \times 100\% = 53,32\%$. Capaian ini tidak relevan diperbandingkan dengan kondisi nasional.

Pencapaian Indikator 4 “Skor Pola Pangan Harapan”

Skor **Pola Pangan Harapan (PPH)** adalah indikator yang digunakan untuk menilai keseimbangan dan keberagaman konsumsi pangan masyarakat. Skor ini mencerminkan sejauh mana pola konsumsi pangan suatu daerah sesuai dengan standar gizi yang dianjurkan, guna mencapai kesehatan dan ketahanan pangan yang optimal.

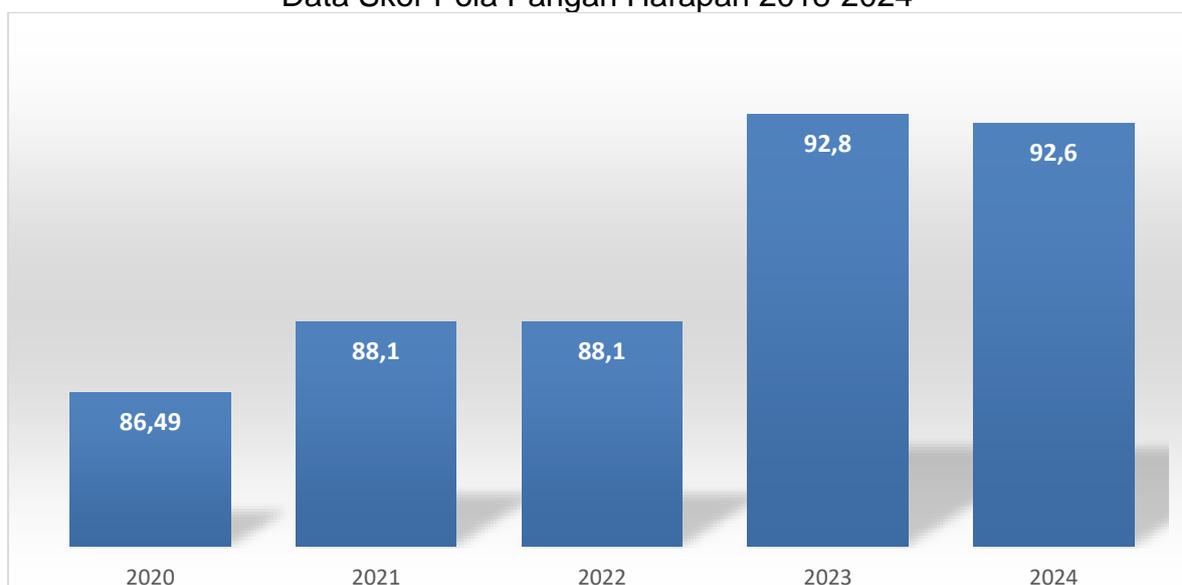
PPH dinilai berdasarkan komposisi berbagai kelompok pangan, seperti:

- Karbohidrat (beras, umbi-umbian)
- Protein hewani (daging, ikan, telur)
- Protein nabati (kacang-kacangan)
- Sayur dan buah
- Lemak dan minyak
- Gula
- Lainnya (rempah-rempah, minuman, dll.)

Semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan suatu wilayah, semakin tinggi skor PPH-nya. Skor ideal yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian adalah **100**, yang mencerminkan pola pangan yang optimal.

Pemerintah Kota Cirebon menargetkan Skor PPH pada tahun 2024 yaitu 88,1, pada tahun 2024 realisasi berdasarkan perhitungan Survey Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2024 Skor PPH Kota Cirebon mencapai 92,6%, maka capaian kinerja adalah $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = \frac{92,6\%}{88,1\%} \times 100\% = 105,11\%$ atau **Melebihi Target**. Jika dibandingkan dengan Nasional yang mencapai skor PPH 94,1 per-tahun 2023 maka **Pemerintah Kota Cirebon sedikit lebih rendah dari capaian nasional**.

Gambar 3. 10
Data Skor Pola Pangan Harapan 2018-2024



Sumber Data : Cirebon Satu Data , 2025

Evaluasi Sasaran 1.2 “Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi Masyarakat”

Sasaran meningkatnya Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi Masyarakat” memiliki pencapaian **90,27%** atau **Sangat Tinggi**, melalui berbagai upaya peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat tergambar dalam program-program pendukung sasaran strategis ini, sebagai berikut:

Tabel 3. 13
Capaian Realisasi Program Anggaran Pendukung Sasaran 1.2

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian	Pelaksana
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	83,405,797,680.00	77,592,614,792.00	93.030%	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1,647,719,950.00	1,629,081,950.00	98.869%	Dinas Kesehatan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	604,473,825.00	577,788,875.00	95.585%	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2,446,423,650.00	2,388,768,900.00	97.643%	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN	563,988,009.00	556,476,350.00	98.668%	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (DKP3)
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	113,871,862.00	94,666,512.00	83.134%	DKP3
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	125,648,650.00	115,555,650.00	91.967%	DKP3
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	108,417,096.00	101,218,386.00	93.360%	DKP3
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1,048,706,122.00	1,035,497,222.00	98.740%	DKP3
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN'	108,862,962.00	93,325,562.00	85.728%	DKP3

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian	Pelaksana
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1,061,619,970.00	1,026,994,150.00	96.738%	DKP3
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	123,814,650.00	117,822,450.00	95.160%	DKP3
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	95,401,130.00	83,858,000.00	87.900%	DKP3
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	54,737,430.00	54,477,000.00	99.524%	DKP3
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			94.004%	

Gambar 3. 11
Kota Cirebon Masuk Empat Besar Verifikasi Penilaian Lapangan Masyarakat Hidup Sehat



Pemerintah Kota Cirebon Masuk Dalam Empat Besar Verifikasi Penilaian Lapangan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Gernas). Ketiga Kota Lainnya Adalah Kabupaten Subang, Kota Bandung, Kota Tasikmalaya. (cirebonkota.go.id, 2024)

Dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat di Kota Cirebon, dilakukan berbagai upaya strategis yang mencakup akses layanan kesehatan, pola konsumsi gizi seimbang, serta edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Berbagai upaya tersebut melibatkan berbagai Perangkat Daerah, beberapa program *cross cutting* yang ikut mempengaruhi kualitas kesehatan diantaranya adalah program lingkup sanitasi dan rumah layak huni yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Dinas Prumahan Rakta dan Kawanam Pemukiman Kota Cirebon.

Berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalahnya:

Tabel 3. 14
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 1.2 “Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi Masyarakat” Tahun 2024

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Indikator 1 - Indikator 3		
<p>Faktor Pendukung : Terlaksananya Program Program yang mendukung Sasaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan • Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman • Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan • Kesadaran Masyarakat akan Pendidikan cukup tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih belum tercapainya Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) karena Faktor sosial, budaya dan agama yang mempengaruhi persepsi masyarakat, sehingga imunisasi belum dianggap penting sebagai investasi masa depan pertumbuhan seorang anak. • Mobilitas penduduk yang tinggi sehingga menyulitkan pelaksanaan sweeping dan Drop Out Follow Up (DOFU) yaitu melengkapi imunisasi bagi sasaran yang belum lengkap status imunisasi dasarnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan komitmen dan dukungan Pemerintah Kota Cirebon dalam pencapaian program kesehatan terutama dalam pencapaian target IDL yang berpengaruh secara langsung terhadap indikator AHH. • Meningkatkan akselerasi DOFU (Drop Out Follow Up) melalui kegiatan Inovasi dengan melakukan sweeping dan mendatangi serta memobilisasi sasaran yang belum pernah mendapatkan imunisasi dasar. • Meningkatkan Koordinasi dan sinergitas antara Pemerintah Kota Cirebon dan Pemerintah Daerah Provinsi di bidang kesehatan khususnya dalam Implementasi IDL.
Indikator 4 “Skor Pola Pangan Harapan”		
<p>Faktor Pendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan pangan yang beragam dan cukup • Infrastruktur distribusi pangan yang baik, termasuk jalan, pasar, sehingga memungkinkan masyarakat mendapatkan pangan yang berkualitas dan cukup 	<p>Faktor Penghambat</p> <p>Kebiasaan konsumsi masyarakat yang cenderung mengutamakan makanan cepat saji atau kurang memperhatikan keberagaman gizi dalam konsumsi pangan dapat menghambat pencapaian pola pangan yang ideal</p>	<p>Strategi Pemecahan Masalah :</p> <p>Sosialisasi tentang pentingnya gizi seimbang, pola makan bergizi, serta cara memasak dan mengonsumsi pangan sehat yang sesuai dengan Pola Pangan Harapan</p>

Sasaran 1.3 “Meningkatnya Kemampuan Masyarakat dalam Pemenuhan Kebutuhan Hidup”

Tabel 3. 15
Capaian Sasaran 1.3 “Meningkatnya Kemampuan Masyarakat dalam Pemenuhan Kebutuhan Hidup” Tahun 2024

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi		Target Akhir RPD (2026)	Capaian Kinerja 2024
					N-1 (2023)	2024		
1.3	Meningkatnya Kemampuan Masyarakat dalam Pemenuhan Kebutuhan Hidup	Pengeluaran Perkapita	Ribu	12.550	12.506	12.869	13.000	102,54%
		Tingkat Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Jangkauan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen	100%	-	99,78		99,78%

Sasaran 1.3 “Meningkatnya Kemampuan Masyarakat dalam Pemenuhan Kebutuhan Hidup” menjadi salah satu tolok ukur dalam mewujudkan kinerja Tujuan Meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sasaran ini di gambarkan dalam dua indikator yaitu Pengeluaran Perkapita Tingkat Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Jangkauan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Pencapaian indikator ke 1 yaitu Pengeluaran Per Kapita:

Pengeluaran per kapita merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur rata-rata jumlah uang yang dikeluarkan oleh setiap individu dalam suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam periode tertentu (biasanya dalam satu tahun). Indikator ini sering digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan daya beli penduduk. Pengukuran pengeluaran per kapita dilakukan oleh BPS. Pada tahun 2024 Pemerintah Kota Cirebon menargetkan pengeluaran per kapita (ribu/tahun) sebesar 12550 sesuai target pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024, sementara pengeluaran per kapita pada

tahun 2024 adalah 12.869 yang dapat diartikan pengeluaran perkapita di Kota Cirebon sebesar 1.451.870 perbulan, sehingga capaian kinerja adalah $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = \frac{12.869}{12.550} \times 100\% = 106,64\%$ **102,54%** atau **Melebihi Target**. Jika disandingkan dengan rata-rata pengeluaran per kapita secara nasional yang berada pada 12.341 (ribu/tahun) atau 1.028.416,67 per bulan berdasarkan data BPS rilis November 2024 [\[Metode Baru\] Pengeluaran per Kapita Disesuaikan - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia](#), maka capaian **Kota Cirebon lebih baik dari rata-rata nasional**. Pengeluaran per kapita ini dapat menjadi salah satu indikator untuk menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat di Kota Cirebon, kendati cenderung lebih baik dari rata-rata nasional namun upaya peningkatan kesejahteraan tetap menjadi urgensi serta diperlukan analisis yang komprehensif dengan melihat indikator-indikator pembangun kesejahteraan yang lain

Gambar 3. 12
Data Pengeluaran Per kapita 2020-2024



Sumber : BPS Kota Cirebon – Cirebon Satu data 2019-2024 , diolah

Pencapaian indikator ke 2 yaitu Tingkat Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Jangkauan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Tingkat Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Dasar mengacu pada sejauh mana masyarakat memiliki akses terhadap layanan esensial seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan air bersih. Indikator ini digunakan

untuk menilai kesejahteraan dasar penduduk dalam suatu wilayah. Sementara itu, mengukur seberapa luas kelompok rentan dan membutuhkan layanan kesejahteraan sosial telah

mendapatkan bantuan dan perlindungan dari pemerintah atau lembaga sosial. Indikator ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara, terutama yang berada dalam kelompok rentan, dapat hidup dengan layak.

Gambar 3. 13
Peresmian Gedung Rahayu Sebagai Pusat Kesejahteraan Sosial sebagai pusat pelayanan Pemerlu Kesejahteraan Sosial



Sumber:: (cirebonkota.go.id, 2024

Berikut beberapa alasan mengapa indikator ini harus menjadi prioritas:

- **Menjamin Hak Dasar Warga Negara**

Setiap individu berhak mendapatkan kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam memberikan layanan tersebut.

- **Mengurangi Ketimpangan Sosial**

Jika akses terhadap kebutuhan dasar dan jangkauan sosial terhadap PPKS rendah, maka ketimpangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin akan semakin lebar. Hal ini dapat memicu konflik sosial dan memperburuk kemiskinan struktural.

- **Mencegah Masalah Sosial yang Lebih Besar**

Kurangnya perhatian terhadap kelompok PPKS dapat menyebabkan berbagai masalah seperti meningkatnya jumlah anak jalanan, pengangguran, kriminalitas, dan kesehatan masyarakat yang buruk.

- **Mendukung Pembangunan Berkelanjutan**

Indikator ini berkaitan erat dengan **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)**, terutama dalam aspek pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan yang layak, dan pengurangan ketimpangan sosial.

Menimbang urgensi indikator ini, Pemerintah Kota Cirebon menargetkan 100% atas Tingkat Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Jangkauan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pada tahun 2024 berdasarkan pendataan oleh Dinas Sosial Kota Cirebon, indikator ini tercapai 99,78%, dari data **174.554 Orang**, ada sekitar **174.178 Orang** yang terlayani, berdasarkan hal tersebut maka capaian kinerja atas indikator ini adalah $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = \frac{99,78}{100} \times 100\% = 99,78\%$ atau **Sangat Baik**, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 16
Data Target Dan Realisasi Penerima Bantuan Sosial Kota Cirebon Tahun 2024

NO	JENIS BANTUAN	TARGET	REALISASI
1	PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)	11.855	11.780
2	BANTUAN PEMERINTAH NON TUNAI (BPNT/PROGRAM SEMBAKO)	35.732	35.431
3	PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)	126.967	126.967
JUMLAH		174.554	174.178
PROSENTASE			99,78%

Evaluasi sasaran 1.3 “Meningkatnya Kemampuan Masyarakat dalam Pemenuhan Kebutuhan Hidup”

Trend positif dalam pencapaian sasaran yang ditunjukkan melalui 2 indikator yaitu pengeluaran perkapita dan Tingkat Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Jangkauan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), menjadi gambaran bahwa upaya dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup telah cukup berhasil. Sasaran 1.3 ini didukung oleh Program sebagai berikut:

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian	Pelaksana
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	222,947,000.00	222,947,000.00	100.000 %	Dinas Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	885,745,718.00	782,118,229.00	88.301%	Dinas Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	565,514,807.00	558,571,757.00	98.772%	Dinas Sosial

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian	Pelaksana
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	352,666,796	352,456,646.00	99.940%	Dinas Sosial
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	5,975,838,460.00	5,535,892,525.00	92.638%	Asisten Pemerintahan dan Kesra
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1,570,795,380.00	734,240,142.00	46.743%	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			87.732%	

Dalam pencapaian Sasaran 1.3 “Meningkatnya Kemampuan Masyarakat dalam Pemenuhan Kebutuhan Hidup”, didukung langsung oleh program program sebagaimana disebutkan diatas, namun sesungguhnya beberapa program dan kegiatan secara cross cutting ikut mempengaruhi upaya dalam mencapai sasaran 1.3 ini, diantaranya Program yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pada masyarakat rentan atau PPKS seperti program yang mencakup jaminan kesehatan masyarakat, Pendidikan, serta fasilitasi pada UMKM.

Upaya terhadap pencapaian sasaran 1.3 ini didorong serta menemui kendala berbagai faktor, berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalahnya:

Tabel Faktor Pendukung, Faktor Penghambat dan Pemecahan Masalah Sasaran 1.3

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Indikator 1 :- Pengeluaran Perkapita		
<ul style="list-style-type: none"> Pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa. <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya investasi dan UMKM. Peningkatan upah minimum (UMK). Stabilitas pasokan barang kebutuhan pokok. <ul style="list-style-type: none"> Adanya kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> Ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat. <ul style="list-style-type: none"> Ketergantungan pada sektor tertentu (perdagangan & pariwisata). Lapangan kerja formal terbatas. Kenaikan harga bahan pokok akibat 	<ul style="list-style-type: none"> Diversifikasi ekonomi dengan pengembangan industri kreatif dan digital. Peningkatan pelatihan keterampilan tenaga kerja. Insentif bagi pelaku usaha lokal. Subsidi pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
subsidi dan bantuan sosial.	inflasi. - Ketergantungan pada pasokan luar daerah. - Fluktuasi harga BBM dan transportasi. • Kemacetan dan biaya transportasi yang meningkat. - Infrastruktur yang masih perlu ditingkatkan di beberapa kawasan.	- Peningkatan kapasitas layanan kesehatan berbasis teknologi (telemedicine). - Kampanye pentingnya pendidikan tinggi untuk meningkatkan daya saing • Edukasi literasi keuangan dan pengelolaan keuangan rumah tangga.
Indikator 4 “Skor Pola Pangan Harapan”		
Faktor Pendukung : • Ketersediaan pangan yang beragam dan cukup • Infrastruktur distribusi pangan yang baik, termasuk jalan, pasar, sehingga memungkinkan masyarakat mendapatkan pangan yang berkualitas dan cukup	Faktor Penghambat Kebiasaan konsumsi masyarakat yang cenderung mengutamakan makanan cepat saji atau kurang memperhatikan keberagaman gizi dalam konsumsi pangan dapat menghambat pencapaian pola pangan yang ideal	Strategi Pemecahan Masalah : Sosialisasi tentang pentingnya gizi seimbang, pola makan bergizi, serta cara memasak dan mengonsumsi pangan sehat yang sesuai dengan Pola Pangan Harapan

Sasaran 1.4 “Terkendalnya Jumlah Penduduk”

Tabel 3. 17
Capaian Sasaran 1.4 “Terkendalnya jumlah penduduk” Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi		Target Akhir RPD (2026)	Capaian Kinerja 2024
					N-1 (2023)	2024		
1.4	Terkendalnya Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Person	0,98	0,71	1,22	0,94	75,51%

Terwujudnya Tujuan 1 pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Cirebon 2024-2026. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat diyakini sangat dipengaruhi dengan faktor jumlah penduduk, jumlah penduduk yang tidak terkendali menjadi kendala dalam proses pembangunan sehingga diperlukannya pengendalian penduduk. Sasaran yang sangat strategis dalam pembangunan ini di ukur dengan sebuah indikator kinerja yaitu laju pertumbuhan penduduk.

Pencapaian Indikator “Laju Pertumbuhan Penduduk”

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kota Cirebon menargetkan Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) pada poin 0,98. Berdasarkan perhitungan LPP tahun 2024 yang dengan metode geometrik, LPP Kota Cirebon pada tahun 2024 adalah 1,22, didapat dari rumus laju pertumbuhan penduduk metode geometrik $r = \left(\frac{P_t}{P_0}\right)^{1/t} - 1$, dengan keterangan r =Laju pertumbuhan penduduk, P_t =Penduduk pada tahun t atau tahun 2024 yaitu 356.629, P_0 = Penduduk tahun dasar atau tahun 2023 yaitu 352.347, dan t =jangka waktu (sebagai pembandingan maka 2024-2023=1), sehingga dihasilkan $r = \left(\frac{356.629}{352.347}\right)^{1/1} - 1 = 0,0122$ atau 1,22%, sehingga pencapaian kinerja indikator ini adalah $\frac{T-(R-T)}{T} \times 100 \% = \frac{0,98-(1,22-0,98)}{0,98} \times 100 \% = 75,51\%$ atau dengan predikat pencapaian kinerja **Tinggi**.

Evaluasi Sasaran 1.4 “Laju Pertumbuhan Penduduk”



Kota Cirebon Kembali Menorehkan Prestasi Gemilang Dengan Meraih Penghargaan Juara Harapan II Dalam Lomba Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2wkss) Tingkat Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun 2024 (cirebonkota.go.id)

Pencapaian sasaran dengan satu indikator ini tak lepas dari suksesnya program yang telah dilaksanakan oleh Dinas pengampu urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana salah satunya adalah program pembinaan keluarga berencana yang salah satu aktivitas utamanya mendorong

pengendalian penduduk cukup berhasil dilaksanakan, bahkan ikut mendorong Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKKS), dimana program keluarga berencana sasaran utamanya adalah memberikan kesadaran dan wawasan bagi para Wanita atau Ibu dalam berkeluarga. Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKKS) Berikut Program yang mendukung pencapaian sasaran ini adalah:

Tabel 3. 18
Capaian Realisasi Anggaran Sasaran 1.4 “Laju Pertumbuhan Penduduk”

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian	Pelaksana
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	348,599,143.00	295,597,169.00	84.796%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1,847,339,699.00	1,371,646,912.00	74.250%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	190,420,176,00	163,691,176.00	85.963%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	107,291,725.00	103,746,725.00	96.696%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	515,508,492.00	452,338,492.00	87.746%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	10,240,000.00	10,240,000.00	100.000%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			88.242%	

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya kami telah melakukan analisa terhadap keberhasilan atau pendukung pencapaian sasaran, kendala serta strategi pemecahan masalah tersebut. Berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalahnya:

Tabel 3. 19
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 1.4 “Laju Pertumbuhan Penduduk” Tahun 2024

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 1.4: Terkendalinya jumlah penduduk		
<ul style="list-style-type: none"> Penguatan peran lintas sektor/bidang serta skpd yang terkait Penguatan program Keluarga Berencana Meningkatnya Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKKS) 	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pembinaan/ sosialisasi/ advokasi metode kontrasepsi program kb Kurangnya kesadaran masyarakat tentang program KB 	<ul style="list-style-type: none"> Terus berupaya meningkatkan jumlah Kampung KB meningkatkan jumlah kampung KB dari awal tahun 2019 terbentuk 8 kampung KB, tahun 2020 menjadi 12 kampung KB dan pada tahun 2021 diharapkan bertambah menjadi 14 Kampung KB. Melaksanakan sosialisasi secara virtual serta melalui pamphlet pamflet terkait pengendalian penduduk dan keluarga berencana, salah satunya saat ini melalui Instagram resmi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sasaran 1.5 “Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Olahraga”

Tabel 3. 20
Capaian Sasaran 1.5 “Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Olahraga”

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi		Target Akhir RPD (2026)	Capaian Kinerja 2024
					N-1 (2023)	2024		
1.5	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Olahraga	Angka Partisipasi Masyarakat Olahraga	Persen	54,00		55,00	56,00	101,85%
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan Pemuda terbina	Persen	65,00		66,07	75,00	101,65%

Sasaran Strategis 1.5 Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Olahraga, merupakan sasaran pada RPD Kota Cirebon Tahun 2024-2026 yang mendukung Tujuan 1 “Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat”, dua indikator dalam sasaran tersebut ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Cirebon.

Pencapaian Indikator ke-1 “Angka Partisipasi Masyarakat Olahraga”

Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Pemuda dan Olah Raga berupaya untuk meningkatkan Angka Partisipasi Masyarakat dalam Olahraga (APMO) pada tahun 2024 melalui Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cirebon 2024-2026 dengan menjadikan IKU dalam sasaran Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Olahraga melalui berbagai kegiatan olahraga diantaranya yaitu festival Olahraga rekreasi, senam kebugaran jasmani, *Car Free Day* (CFD) dan kegiatan *event/kejuaraan* olahraga lainnya (POPKOTA).

Dengan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan, diharapkan angka partisipasi Kesehatan dan kesejahteraan Masyarakat secara keseluruhan. Adapun capaian indikator ke-1 angka partisipasi Masyarakat olahraga pada tahun 2024 sebesar 55,00 persen dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 54,00 persen dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang berolahraga 3 x seminggu}}{\text{Total sampling}} \times 100 \% = \frac{44}{80} \times 100 \% = 55\%$$

Masyarakat yang berolahraga di Kawasan bima sebanyak 400 orang per bulan, dari 400 orang tersebut di tetapkan sampling sebanyak 20% yaitu 80 orang dari hasil kuisisioner yang disebar. Dari total 80 orang tersebut sebanyak 44 orang melakukan aktivitas fisik/ olahraga dalam seminggu tiga kali. Dari hasil data tersebut ditetapkan sebagai Angka Partisipasi Masyarakat Olahraga. Sehingga pencapaian kinerja indikator ini adalah $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \% = \frac{55}{54} \times 100 \% = 102 \%$ atau **Melebihi**

Target.

Pencapaian Indikator ke-2 “Persentase Organisasi Kemasyarakatan Pemuda terbina”

Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) terbina adalah kelompok pemuda yang tergabung dalam organisasi yang diakui oleh pemerintah atau Lembaga tertentu dengan tujuan untuk membina, mendidik dan mengarahkan mereka agar berkontribusi secara positif bagi Masyarakat. OKP terbina biasanya

berada dibawah pembinaan Kementerian, Dinas atau Lembaga/ organisasi keagamaan dan sosial lainnya.

Berikut beberapa Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang aktif dan dibina Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Cirebon diantaranya:

1. Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kota Cirebon.
2. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Cirebon.
3. Karang Taruna Kota Cirebon.
4. Gerakan Pemuda Anshor Kota Cirebon.
5. Pemuda Muhammadiyah Kota Cirebon.
6. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Cirebon.
7. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Cirebon.
8. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Cirebon.
9. Satuan Relawan Indonesia Raya (SATRIA).
10. Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM).
11. Pemuda Demokrat Indonesia (PDI).

Pemerintah Kota Cirebon, melalui Dinas Pemuda dan Olah Raga berperan aktif dalam membina dan memfasilitasi kegiatan OKP. Selain itu, Pemerintah Kota Cirebon mendorong pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui alokasi anggaran dalam APBD, guna meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan dan kemajuan Kota Cirebon. Adapun capaian sasaran dengan indikator Persentase Organisasi Kemasyarakatan Pemuda terbina pada tahun 2024 sebesar 66,07% dari target sebesar 65,00%. Sehingga pencapaian kinerja indikator ini adalah $\frac{Realisasi}{Target} \times 100 \% = \frac{66,07}{65,00} \times 100 \% = 101,65 \%$ atau **Melebihi Target**.

Nilai tersebut didapat dari total organisasi pemuda yang ada di Kota Cirebon sebanyak 56 organisasi, dimana 37 OKP yang terbina dan 19 OKP yang belum terbina. Pencapaian tersebut cukup maksimal dikarenakan pembinaan kegiatan kepemudaan yang rutin mengadakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, peningkatan daya saing wirausaha muda pemula dan pemuda kader serta menyediakan pelatihan-pelatihan bagi kaum muda khususnya pelatihan kewirausahaan disamping pembinaan dan sosialisasi bahaya NAPZA dan pergaulan bebas dan dilakukan setiap tahunnya serta bekerjasama dan berkolaborasi dengan Komite

Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Cirebon. Berikut adalah daftar OKP di Kota Cirebon, diantaranya:

Tabel 3. 21
Daftar Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Kota Cirebon

NO	NAMA ORGANISASI	ALAMAT	NAMA KETUA	PERIODE	SKP
1	Angkatan Muda Islam Indonesia (AMII)	Jl. Gn. Agung II D. 10 No. 109 Cirebon	Euis Sugiawaty, A.Md.	2021-2024	BLM ADA
2	Angkatan Muda Ka'bah (AM KA'BAH)	Jl. Evakuasi No. 13 Cirebon	Kusmayadi	MANDAT	BLM ADA
3	Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI)	Jl. Siliwangi No. 15 Cirebon	Andri Sulistio	2018-2023	BLM ADA
4	Angkatan Muda Satuan Karya Ulama Indonesia (AMSI)	Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 42 Cirebon	Rony Iryadi, M.Kes		
5	Angkatan Muda Siliwangi (AMS)	Jl. Gn. Merapi I No. 02 Cirebon	Alimudin	2021-2026	BLM ADA
6	Badan Kordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI)	Jl. Kalijaga Komp. Masjid Al-Falah Lemahwungkuk Cirebon	Umar Stanis Clau	2019-2023	BLM ADA
7	Baladhika Karya	Jl. Siliwangi No. 15 Cirebon	H.M. Suyono	2020-2025	22-12-2020
8	Banteng Muda Indonesia (BMI)		Imam Yahya, S.Fil.I	2018-2022	29-04-2021
9	Barisan Muda Kosgoro 1957 (BM KOSGORO 1957)	Jl. Ciremai Raya Cirebon	Erry Yudhistira Ramadhan, SH		
10	Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN)	Jl. Slamet Riyadi No. 25 Cirebon	Syarif Maulana	2017-2023	BLM ADA
11	Buah Batu Corps (BBC)	Griya Sunyaragi Permai Kec. Kesambi Cirebon	R. Jarum, SE	2021-2026	BLM ADA
12	Fatayat Nahdlatul Ulama (FATAYAT NU)	Jl. Garuda No. 1 Cirebon	Tuti Alawiyah, S.Sos.I., M.Pd.I.	2019-2024	BLM ADA
13	Forum Silaturahmi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (FSPRMI)		Khoirul Anwar, S.Pd.I		
14	Gema Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (GEMA MKGR)	Jl. Siliwangi No. 15 Cirebon	Mohamad Soleh	2021-2023	BLM ADA
15	Generasi Muda Demokrat (GM DEMOKRAT)	Jl. Siliwangi Gg. Kramat I No. 10 Cirebon	R. M. Handaruji, S.Sos.		
16	Generasi Muda Forum Komunikasi Penerus		Agoes Darodjat		

NO	NAMA ORGANISASI	ALAMAT	NAMA KETUA	PERIODE	SKP
	Pejuang Kemerdekaan (GM FKPPK)				
17	Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI - Polri (GM FKPPi)	Jl. Raya Kesambi No. 124 Cirebon	M. Dany Jaelani, S.Sos	PERPANJANGAN	11-5-2015
18	Generasi Muda Kosgoro (GM KOSGORO)	Jl. Perjuangan No. 32 Cirebon	H. Khotibul Umam, M, Ud, MA	2019-2023	11-02-2021
19	Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI)	Jl. Evakuasi No. 13 Cirebon	Abdul Qodir Jaelani	2020-2025	BLM ADA
20	Generasi Muda Persatuan (GM PERSATUAN)	Jl. Evakuasi No. 13 Cirebon	Yayat Hadiyanto	2021-2024	BLM ADA
21	Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI)	Jl. Sonokeling V Blok T No. 120 Griya Sunyaragi Permai Kel. Karyamulya Kec. Kesambi Kota Cirebon	Dika Agung Wahyudi	2024-2026	B.200.1.4.4/POL DAGRIOR MAS/2024
22	Gerakan Pemuda Ansor (GP ANSOR)	Jl. Garuda No. 1 Cirebon	Abdul Sholeh, S.Pd., M.Pd.	2022-2026	BLM ADA
23	Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK)	Jl. Evakuasi No. 13 Cirebon	Tunggal Dewanant o	2019-2024	BLM ADA
24	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)	Jembar Agung Majasem RT. 003 RW. 014 Kel. Karyamulya Kec. Kesambi Kota Cirebon(Jl. Swakelola (Sebelah SMAN 5) Majasem)	Dian Tardiansyah	2024-2025	BLM ADA
25	Hizbul Wathan (HW)	Jl. Syarif Abdurahman No. 49 Cirebon	Fatimah Ahmad, S.Ag.	2020-2025	29-04-2021
26	Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)	Jl. Pilang Raya Gg. Lamtoro No. 2 Sukapura Cirebon	Jehan Nur Yudha	2020-2021	09-10-2005
27	Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU)	Jl. Garuda No. 1 Cirebon	Salman Mubarak	2022-2024	BLM ADA
28	Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM)	Jl. Pilang Raya Gg. Lamtoro No. 2 Sukapura Cirebon	Anisa Atla Dewi Saputri	2020-2022	29-04-2021

NO	NAMA ORGANISASI	ALAMAT	NAMA KETUA	PERIODE	SKP
29	Ikatan Putra Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU)	Jl. Arya Kemuning	Maghrisul Akhiroh Syam	2023-2025	BLM ADA
30	Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)	Jl. Perjuangan Majasem Komp. Masjid Sabilul Huda Cirebon	Diki Wibowo	2023-2025	BLM ADA
31	Komando Inti (KOTI) Mahatidana Pemuda Pancasila	Jl. Saleh No. 3 Cirebon	Tommy Agoestha	2019-2021	BLM ADA
32	Korps Himpunan Mahasiswa Indonesia Wati (KORPS HMI WATI)	Jl. Swakelola (Sebelah SMAN 5) Majasem	Siti Annisa A.		
33	Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KORPS PMII PUTRI)		Al Fina		
34	Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (Orda ICMI)		Ryal Alghifari, M.Pd.	2024-2029	BLM ADA
35	Nasyiatul Aisyiyah (NASYIYAH)	Jl. Pilang Raya Gg. Lamtoro No. 2 Sukapura Cirebon	Ria Yulianti T, S.ST., M.Kes.	2016-2020	BLM ADA
36	Pemuda Demokrat Indonesia (PDI)		Lukman Nul Hakim, S.Pd.I., M.Si.	2020-2025	B/200.1.4.4/118/PDNOK/2024
37	Pemuda Katholik	Jl. Jend. Sudirman Cirebon	Yohanes Bosco Sugianto		
38	Pemuda Kiara		Ade Nuryadi	2021-2023	BLM ADA
39	Pemuda Muhammadiyah	Jl. Pilang Raya Gg. Lamtoro No. 2 Sukapura Cirebon	Dien Yani Arief	2020-2024	29-04-2021
40	Pemuda Muslimin Indonesia (PMI)		Drs. H. Syaeful Badar, MA.		
41	Pemuda Panca Dharma (PPD)	Jl. Kesambi Raya Cirebon	Ayip Syarif H., S.H.	2021-2026	BLM ADA
42	Pemuda Panca Marga (PPM)	Jl. Dr. Cipto MK / Ged. HD Machmud Pasha Cirebon	Deden Karyana/Ratwiyatno	2019-2023/ PERPA NJANG AN	DICABUT SEMEN TARA
43	Pemuda Pancasila (PP)	Jl. Saleh No. 3 Cirebon	Heri Hermawan	2019-2023	16-11-2020

NO	NAMA ORGANISASI	ALAMAT	NAMA KETUA	PERIODE	SKP
44	Pemuda Penerus Amanat Proklamasi Republik Indonesia (PPAPRI)		Ryan Andri Novandi	2021-2024	BLM ADA
45	Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)	Jl. Perjuangan Majasem Cirebon	Jamaludin Bachtiar	2024-2025	BLM ADA
46	Purna Paskibraka Indonesia (PPI)		Alfas Muharomi	2016-2021	BLM ADA
47	Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM)	Jl. Samadikun	Jafarudin, SE	2019-2024	BLM ADA
48	Satuan Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila	Jl. Raya Kesambi Kec. Kesambi Cirebon	Risya Marsha, S.IP.	2020-2022	16-11-2020
49	Wira Karya Indonesia (WKI)	Jl. Siliwangi No. 15 Cirebon	R. Agung Mintardja	2020-2025	BLM ADA
50	Satria		Munadi, ST	2018-2023	BLM ADA
51	Sarinah		Dwi Zuvaniastri Solehati		
52	Garda Pemuda Nasdem	Jl. Merdeka Cirebon	Imam Reza Hakiki	2020-2024	BLM ADA
53	XTC Indonesia		M. Alfiannas	2023-2028	BLM ADA
54	Srikandi PP	Jl. Saleh No. 3 Cirebon	Hj. Fifi Sopiah		16-11-2020
55	Tapak Suci Muhammadiyah	Jl. Pilang Raya Gg. Lamtoro No. 2 Sukapura Cirebon	Lilik A. Darmawan, M.Pd.	2020-2025	BLM ADA
56	Pagar Nusa NU	Jl. Garuda No. 1 Cirebon	A. Bakhrulluthfi		

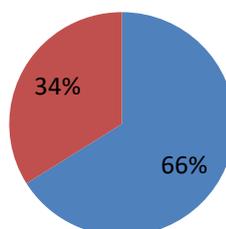
Tabel 3. 22
Persentase Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Terbina Tahun 2024

NO	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Terbina/Aktif	37	66,07%
2	Belum Terbina/Pasif	19	33,93%
Total		56	100,00%

Gambar 3. 14
Persentase OKP Terbina Tahun 2024

Organisasi Pemuda

■ Terbina/Aktif ■ Belum Terbina/Pasif



Untuk pencapaian kinerja, tujuan dan sasaran dinas tidaklah mudah. Dalam perjalanan terdapat kendala – kendala yang menghambat pelaksanaan tugas dinas. Namun demikian, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala tersebut, meminimalisasi risiko, sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Evaluasi Sasaran 1.5 “Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Olahraga”

Berdasarkan pencapaian sasaran yang ditunjukkan melalui 2 (dua) indikator menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Kota Cirebon mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian sasaran yang ditunjukkan dengan dua indikator diatas sudah menunjukkan pencapaian yang sangat baik yaitu rata rata pencapaian 101,75%, sasaran ini didukung oleh beberapa program sebagai berikut:

Tabel 3. 23
Capaian Realisasi Anggaran Program pendukung

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian	Pelaksana
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	705,810,011.00	688,651,505.00	97.569%	Dinas Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	11,522,121,958.00	11,388,296,760.00	98.839%	Dinas Pemuda dan Olahraga

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian	Pelaksana
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	562,883,650.00	561,185,294.00	99.698%	Dinas Pemuda dan Olahraga
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			98.70%	

Seyogyanya Program telah berhasil di implementasikan namun perlu melakukan inovasi dan perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalahnya:

Tabel 3. 24

Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 1.5 “Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Olahraga”

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 1.5 : Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Olahraga		
Dukungan tenaga SP3OR (Sarjana Pendamping penggerak pembangunan olahraga) dari Provinsi Jawa Barat	Motivasi keinginan masyarakat untuk berolahraga sebagai pola hidup sehat cenderung rendah	Sosialisasi dalam rangka peningkatan motivasi akan pentingnya olahraga sebagai gaya hidup sehat
	Keterbatasan sarana prasarana olahraga yang di miliki pada setiap wilayah	sentralisasi/pemusatan pelaksanaan kegiatan olahraga
Koordinasi dan konsultasi dengan Induk Organisasi (KNPI)	Program kegiatan OKP belum berjalan maksimal dikarenakan masih dalam pelaksana pemilu 2024	Melakukan Komunikasi secara intens dengan OKP yang terbina
Mengikuti agenda program kerja organisasi	Masih adanya OKP yang belum tertib administrasi	Melaksanakan diskusi kepemudaan
	Masa khidmah OKP terlalu pendek sehingga menjadi kendala bagi ketua OKP yang baru	
Mengkoordinasikan organisasi tersebut untuk melaksanakan regenarasi melalui musyawarah sesuai AD/ART	Masih adanya beberapa OKP yang belum melaksanakan regenarasi/musyawah sesuai Ad/ART	Melakukan pendekatan serta menghimbau untuk melaksanakan regenarasi/musyawah sesuai Ad/ART

Sasaran 1.6 “Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan dan Perlindungan Anak”

Tabel 3. 25
Capaian Sasaran 1.6 “Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan dan Perlindungan Anak” Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi		Target Akhir RPD (2026)	Capaian Kinerja 2024
					N-1 (2023)	2024		
1.6	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender/IPG	Poin	94,47	94,91	95,55	94,58	101,15%
		Indeks Pemberdayaan Gender/IDG	Poin	78,70	78,07	77,03	79,16	98,16%
		Jumlah Skor Evaluasi Kota Layak Anak (Poin)	Poin	550	510,58	638,52	600	116,09%
Rata-rata Capaian Indikator kinerja								105,13%

Meningkatnya pengarusutamaan Gender menjadi penunjang Pemerintah Kota Cirebon, hal ini sebagai upaya mewujudkan kualitas sumber daya manusia khususnya dari segi persoalan gender untuk lebih baik dan terus meningkat dari tahun-ketahunnya. Sudah lazim isu gender dikaitkan dengan kualitas sumber daya manusia sebuah masyarakat yang beradab, bahkan dalam skala nasional hingga internasional persoalan gender menjadi isu yang cukup strategis. Meningkatnya pengarusutamaan gender diukur dalam dua indikator yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Indeks Pemberdayaan Gender menggambarkan kesetaraan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan gender dalam bidang ekonomi sedangkan Indeks Pembangunan Gender menggambarkan *gap* atau kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan wanita.

Pencapaian Indikator ke-1 “Indeks Pembangunan Gender (IPG)”

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pencapaian pembangunan manusia (dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi) telah merata antara laki-laki dan perempuan.

IPG dikembangkan oleh **United Nations Development Programme (UNDP)** sebagai bagian dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tetapi dengan mempertimbangkan kesenjangan gender dalam indikator-indikator utama. Kota Cirebon menargetkan IPG sebagai upaya mendorong pemberdayaan perempuan, urgensi penerapan IPG menjadi indikator diantaranya untuk mendorong kebijakan inklusif, meningkatkan partisipasi Perempuan dalam Perekonomian, meningkatkan kesejahteraan sosial Menekan Ketimpangan Sosial. Kesenjangan gender yang tinggi dapat memicu ketidakstabilan sosial dan konflik. Dengan menerapkan IPG dalam perencanaan kota, kebijakan dapat dirancang untuk memastikan akses yang adil bagi semua gender.

Pada tahun 2024 realisasi IPG di ambil berdasarkan data terkini yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga yang melakukan rilis Berita Resmi Statistik. Data tersebut tetap dapat digunakan sebagai gambaran perkembangan pemberdayaan gender tahun 2024 dengan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah 95,55 meningkat 1,09 dibanding tahun sebelumnya yaitu 94,46 maka pencapaian kinerja adalah $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = \frac{95,55}{94,46} \times 100\% = 101,15\%$ atau **Melebihi Target**. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan point yang tinggi ini karena didukung kesetaraan pembangunan manusia laki-laki dan perempuan, peningkatan kesetaraan ini didorong oleh meningkatnya jumlah perempuan yang mengakses pendidikan dengan layak di Kota Cirebon serta kesetaraan ekonomi yang memberikan akses ekonomi dengan terbuka pada perempuan. Jika disandingkan dengan Nasional Indeks Pembangunan Gender Kota Cirebon yang berjumlah 95,5 **lebih tinggi dari Nasional** dengan jumlah **91,85**.

Pencapaian Indikator ke-2 "Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)"

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perempuan berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi dan politik di suatu wilayah. Indeks ini dikembangkan oleh **United Nations Development Programme (UNDP)** untuk melengkapi Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan fokus pada **keseimbangan kekuasaan dan pengambilan keputusan** antara laki-laki dan perempuan.

Secara umum IDG mengukur tiga aspek utama :

1. Politik → Diukur dari persentase kursi yang ditempati perempuan di parlemen atau pemerintahan daerah.

2. Partisipasi Ekonomi dan Pengambilan Keputusan → Diukur dari persentase perempuan dalam posisi manajerial, profesional, dan teknis di dunia kerja.
3. Penguasaan Sumber Daya Ekonomi → Diukur dari pendapatan yang diperoleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki.

Semakin tinggi nilai IDG (mendekati 1), semakin besar keterwakilan dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai sektor kehidupan.

Indeks Pemberdayaan Gender yang dirilis BPS pada tahun 2024 adalah 77,03 poin, jika dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sebesar 78,70 maka pencapaian kinerja indikator Indeks Pembangunan Gender = $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = \frac{77,03}{78,70} \times 100\% = 97,88\%$, atau Sangat Tinggi. Indeks Pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh akses dasar yaitu Pendidikan dan kesehatan. Terbukanya kesempatan pada pekerjaan yang dapat diakses perempuan juga mempengaruhi rendah atau tingginya Indeks Pemberdayaan Gender. Pencapaian Kota Cirebon dalam indeks pemberdayaan Gender cukup tinggi dan berada di atas Indeks Pemberdayaan Gender Nasional yang memiliki Indeks dengan nilai 76,90 meski demikian masih perlu upaya perbaikan serta perencanaan strategis dalam meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender sebagai bagian dari keberpihakan gender pada Perempuan.

Pencapaian Indikator ke-3 " Jumlah Skor Evaluasi Kota Layak Anak"

Hasil Evaluasi Skor Kota Layak Anak pada tahun 2024 adalah sebesar 638,52 poin berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 26
Hasil Evaluasi Skor Kota Layak Anak Kota Cirebon Tahun 2024

No	Program	Skor Evaluasi
1.	Kelembagaan	95,89
2.	Klaster I : Hak Sipil dan Kebebasan	43,08
3.	Klaster II : Lingkungan Keluarga dan Pengasuh Alternatif	97,00
4.	Klaster III : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	146,00
5.	Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	78,00
6.	Klaster V : Perlindungan Khusus	124,30
7.	Penyelenggaraan KLA di Kecamatan dan Desa/Kelurahan	54,25
Jumlah		638,52

Dari rincian diatas indikator Skor Evaluasi Kota Layak Anak pencapaian pada tahun 2024 adalah 638,52 meningkat sebesar 127,94 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tahun 2023 yakni 510,58 poin. Sehingga pada tahun 2024 ini terdapat peningkatan kategori Kota Layak Anak yang sebelumnya Pratama pada tahun 2023 menjadi Madya pada tahun 2024, maka pencapaian kinerja adalah $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = \frac{638,52}{550} \times 100\% = 116,09\%$ atau **Melebihi Target**.

Peningkatan Skor Evaluasi Kota Layak Anak ini dipengaruhi oleh aspek kesehatan dasar dan kesejahteraan yang meningkat baik dalam persalinan di fasilitas kesehatan, status gizi balita, pemberian makan pada bayi dan anak (PMBA) usia dibawah 2 tahun, fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak, lingkungan sehat serta Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Meski demikian masih ada upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk meningkatkan Skor Evaluasi Kota Layak Anak pada aspek Hak Sipil dan Kebebasan, karena masih rendahnya jumlah anak yang diregistrasi dan yang memiliki Kutipan Akta Kelahiran serta keterbatasan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA).

Evaluasi terhadap capaian sasaran 1.6 “Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan dan Perlindungan Anak”

Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan dan Perlindungan Anak, mencapai **105,13%**. Angka ini menunjukkan bahwa target yang telah ditetapkan tidak hanya terpenuhi, tetapi juga terlampaui secara signifikan.



Pelaksanaan Evaluasi Akhir Program P2wkss Di Kantor Kecamatan Lemahwungkuk, Senin (9/12/2024). -Dedi Haryadi-Radarcirebon.Com

Keberhasilan ini mencerminkan peningkatan keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan, baik di sektor ekonomi, sosial, maupun perlindungan anak. Hal ini dapat dikaitkan dengan berbagai kebijakan dan program yang mendorong kesetaraan gender, peningkatan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta penguatan peran mereka dalam pengambilan keputusan. Meningkatnya peran perempuan Pencapaian sasaran yang ditunjukkan dengan 3

(tiga) indikator diatas sudah menunjukkan pencapaian yang Melebihi Target yaitu dengan rata-rata pencapaian **105,13%**, pencapaian sasaran ini didukung oleh program sebagai berikut:

Tabel 3. 27
capaian realisasi anggaran program pendukung sasaran 1.6

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	26.739.600,00	22.766.900,00	15,33%
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	36.764.500,00	30.113.300,00	17,58%
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	206.399.300,00	193.332.100,00	93,66%
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.793.446.936,00	1.688.471.500,00	94,14%
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	160.298.100,00	64.111.000,00	39,99%
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	74.952.398,00	66.284.750,00	88,43%
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	84.664.800,00	59.145.000,00	69,85%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran Sasaran 1.6			79.022%

Berdasarkan data diatas bahwa rata-rata pencapaian kinerja indikator **105,13%** sedangkan capaian penyerapan anggaran 79.022%, sehingga pencapaian kinerja sasaran ini telah efektif dan efisien. Sebagai upaya mempertahankan kinerja yang sudah dicapai kami melakukan analisa terhadap kendala, serta upaya atau strategi pemecahan masalah terkait sasaran 1.6 ini. Berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalahnya :

Tabel 3. 28 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 1.6 “Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan dan Perlindungan Anak”

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 1.6 Meningkatkan Peran Perempuan dalam Pembangunan dan Perlindungan Anak		
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat, pentingnya pendidikan, kewirausahaan dan pengelolaan keuangan keluarga • Meningkatkan partisipasi perempuan sebagai calon legislatif dan anggota legislative perempuan, meningkatnya jumlah perempuan sebagai ASN, ASN yang menduduki jabatan struktural pada triwulan 2 tahun 2024 sebanyak 164 perempuan dari total jabatan struktural 455 (36,04) di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon (perempuan sebagai manajer/pekerja profesional), manajemen pengelolaan keuangan keluarga • Sistem Evaluasi KLA sebelumnya telah dilakukan setiap tahun dengan perubahan-perubahan pada aplikasi Evaluasi Mandiri KLA • Beberapa Indikator KLA Sudah menjadi target Kinerja pada 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya peran keluarga dalam menerapkan pola hidup sehat, masih ada budaya di masyarakat keberlanjutan pendidikan diprioritaskan kepada anak laki-laki, masih kurangnya jiwa entrepreneur/wirausaha pada masyarakat masih ada di masyarakat yang pola hidupnya konsumtif dan kurangnya manajemen keuangan keluarga • Masih ada kurangnya kepercayaan diri perempuan dalam menduduki posisi sebagai manajer/jabatan strategis, masih kurangnya motivasi perempuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi • Belum optimalnya koordinasi lintas sektor/program dari tingkat pusat hingga daerah • Kurangnya pemahaman stakeholder terhadap substansi Evaluasi KLA • Kurang maksimalnya koordinasi dan sinkronisasi kepada seluruh anggota Gugus Tugas KLA dikarenakan cepatnya turnover (mutasi) jabatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan inovasi Pelatihan atlet serta pembinaan yang menyesuaikan dengan kondisi pandemic, diantaranya menmpertketat protocol kesehatan atau untuk pertemuan organisasi pemuda dapat memanfaatkan teknologi komunikasi. • Meningkatkan sarana dan prasarana untuk fasilitasi kegiatan pelatihan atlet serta kepemudaan, diantaranya dengan memaksimalkan kerjasama dengan pihak swasta atau G to B. • Menyelenggarakan berbagai event kepemudaan yang positif dan mendukung kreatifitas pemuda • Meningkatkan Komunikasi Informasi Edukasi(KIE), Koordinasi, Kolaborasi, sinergitas dengan lintas sektor dan stake holders terkait • Sosialisasi dan advokasi komponen KLA kepada stakeholder baik internal (di Kota Cirebon sendiri) dan eksternal (Kementrian PPPA dan Kab.Kota lain) • Pemetaan instrumen Evaluasi KLA berdasarkan stakeholder terkait dari Klaster, Indikator hingga Pertanyaan. • Penguatan koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder terkait melalui

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 1.6 Meningkatkan Peran Perempuan dalam Pembangunan dan Perlindungan Anak		
beberapa perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> Dukungan para stakeholder terhadap proses Evaluasi KLA Atas advokasi yang disampaikan oleh daerah Kab/Kota di Tahun 2023, KemenPPPA memberikan jeda dalam penyelenggaraan Evaluasi Kota Layak Anak (KLA) seperti halnya penilai Kabupaten Kota Sehat (KKS) dan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 	personil Gugus Tugas KLA <ul style="list-style-type: none"> Kurang optimalnya pemanfaatan Rapat Koordinasi Gugus Tugas KLA dalam mendorong stakeholder terkait untuk melengkapi instrumen yang sudah dibagikan Perubahan jadwal yang terlambat diinfokan sehingga kurang dapat diimplementasikan dalam strategi pengumpulan data dukung 	metode desk door to door ke stakeholder terkait yang mengampu poin-poin krusial dalam pelaksanaan Evaluasi Mandiri KLA <ul style="list-style-type: none"> Menetapkan PIC pada tiap-tiap stakeholder terkait yang mengampu poin-poin krusial dalam pelaksanaan Evaluasi Mandiri KLA Mempergiat koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder terkait melalui metode desk door to door ke stakeholder terkait yang mengampu poin-poin krusial dalam pelaksanaan Evaluasi Mandiri KLA

Sasaran 1.7 “Menurunnya Dampak Perubahan Iklim”

Tabel 3. 29

Capaian Sasaran 1.7 “Menurunnya Dampak Perubahan Iklim” Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi		Target Akhir RPD (2026)	Capaian Kinerja 2024
					N-1 (2023)	2024		
1.7	Menurunnya Dampak Perubahan Iklim	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	7,26	7,25	7,99	7,96	110,05%
Capaian rata-rata kinerja Indikator								110,05%

Menurunnya Dampak Perubahan Iklim menjadi sasaran strategis Pemerintah Kota Cirebon sebagaimana tertuang pada RPD Kota Cirebon 2024-2026, hal ini merupakan upaya mendukung Misi ke-1 Kota Cirebon sebagai tolak ukur pencapaian sasaran indikator yaitu Indeks Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang

ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional Pemerintah Indonesia berkomitmen di dalam penurunan tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) nasional sudah diperbaharui, yaitu 31,89% dari sebelumnya 29% di bawah tingkat emisi GRK *Business-As-Usual* (BaU) pada tahun 2030 untuk skenario *unconditional* dan sampai dengan 43,20% dari sebelumnya 41% di bawah tingkat emisi BaU untuk skenario *conditional* sebagaimana dalam NDC, peta jalan mitigasi dan adaptasi dan strategi Jangka Panjang untuk Perjanjian Rendah Karbon dan Kompatibel dengan Paris untuk 2050 (LTSLCCR 2050). Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota memiliki kewajiban untuk menyusun inventarisasi GRK, termasuk Kota Cirebon. Upaya tindak lanjut dilakukan dengan penyusunan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Kota Cirebon Tahun 2024. Inventarisasi GRK Kota Cirebon ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terhadap sumber-sumber emisi GRK berdasarkan data aktivitas tahun 2022. Kemudian, data inventarisasi GRK Tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan hasil inventarisasi GRK 5 tahun terakhir dari Tahun 2019.

Besaran emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kota Cirebon tahun 2019-2023 mengalami fluktuatif, dimana emisi terendah dihasilkan pada tahun 2020 sebesar 285,34 Gg CO₂eq dan emisi tertinggi pada tahun 2023 sebesar 310,16 Gg CO₂eq. Pada tahun 2020 terjadi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang disebabkan adanya pandemic COVID sehingga ada kebijakan untuk pembatasan kegiatan masyarakat. Emisi gas Rumah Kaca (GRK) Kota Cirebon tahun 2023 mencapai 310,16 Gg CO₂eq, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kota Cirebon mengalami pertumbuhan sebesar 6,81 Gg CO₂eq atau terjadi pertumbuhan 0,65% per tahun. Tren kenaikan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan emisi di sektor energi, limbah, dan pertanian.

Pencapaian Indikator “Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca”

Penelitian atas Gas Emisi Rumah Kaca pada tahun 2024 dilakukan dengan mengambil sampel pada akhir 2023, hal ini karena proses penelitian dan pengambilan sampel membutuhkan waktu yang lama, namun data sampel tersebut diambil dalam kurun waktu series sehingga relevan dijadikan gambaran kondisi pada tahun 2024. Berdasarkan hasil emisi GRK Kota Cirebon dengan tahun data

tahun 2019-2024. Capaian Penurunan emisi dari kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023 adalah sebesar 2.410.076,08 ton CO₂eq, sehingga capaian penurunan emisi akumulatif hingga Tahun 2023 adalah 9.802.395,19 ton CO₂eq, atau sebesar 7,25%. Capaian ini masih di bawah target skenario mitigasi yang seharusnya sebesar 7,87% pada Tahun 2024.

Tabel 3. 30
Kontribusi Capaian Penurunan Emisi GRK Kota Cirebon Tahun 2019-2024

No	Sektor	ton CO ₂ eq								
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Energi	468.194	500.537,19	1.062,02	539,57	-	28.880,15	632.394	244.250	34.951
2	Transportasi	70.360	3.841,8	15.058	48.461,8	1.954	3.956,2	-	162.690	29.089,10
3	Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Limbah	2.629,87	75.840,11	3.280,45	11.887,99	10,68	4.231,42	469.769,36	62.240	11.999,80
5	Pertanian	69.330	33.374	4.723	56.815	63,81	7.347,84	11.912,79	3.670	6.249,50
TOTAL		610.513,87	613.593,1	24.123,47	117.704,36	2.028,49	44.415,61	1.114.076,15	65.910	93.620

Sumber : Provinsi Jawa Barat PEP RAD GRK, 2016-2024 diolah

Diketahui bahwa Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kota Cirebon pada tahun 2024 mengalami kenaikan yakni sebesar 0,74% dengan capaian sebesar 7,99% dibandingkan tahun 2023 dengan capaian sebesar 7,25%. Maka pencapaian indikator Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca adalah

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{7,99}{7,26} \times 100\% = 110,05\%, \text{ atau } \mathbf{Baik \text{ dalam } \text{pencapaian Target.}}$$

Hasil analisis kategori kunci emisi GRK Kota Cirebon di dominasi oleh penggunaan energi diantaranya sub-sektor transportasi (52,46%), kemudian sektor energi pada sub-sektor industri (12,90%), sektor energi pada sub-sektor rumah tangga (11,83%) sektor limbah pada sub-sektor limbah cair domestik (11,32%) dan sektor limbah sub-sektor Penimbunan Sampah di TPA (Managed Solid Waste Disposal Site/SWDS (8,59%). Kelima kategori sumber tersebut telah menyumbangkan 97,10% dari total emisi di Kota Cirebon.

Tabel 3. 31
Key Category Analysis (KCA) Kota Cirebon Tahun 2023

Kategori Sumber	Emission (Gg CO _{2e})	%	Kumulatif (%)
Transport	162,29	52,46	52,46
Manufacturing Industries and Construction	40,00	12,90	65,35
Residentials	36,69	11,83	77,18
CH ₄ Domestic Waste Water	35,12	11,32	88,51
CH ₄ Pembuangan Akhir Sampah Padat	26,64	8,59	97,10

Sumber: Perhitungan CRF Kota Cirebon, diolah

Evaluasi terhadap capaian sasaran 1.7 “Menurunnya Dampak Perubahan Iklim”

Gambar 3. 15

Kota Cirebon, Berhasil Meraih Penghargaan Program Kampung Iklim Kategori Madya



Pencapaian Pada tahun 2024, capaian kinerja sasaran *Menurunnya Dampak Perubahan Iklim* mencapai **101,52%**, menunjukkan bahwa target yang telah ditetapkan berhasil dicapai dan sedikit melampaui ekspektasi.

Kota Cirebon, Berhasil Meraih Penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) Kategori Madya Dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Klhk). Penghargaan Tersebut Diserahkan Pada Kamis (10/10/2024) Di Kantor Klhk Dan Diterima Langsung Oleh Dinas Lingkungan Hidup (Dlh) Kota Cirebon Sebagai Perwakilan Pemerintah Daerah (BisnisCirebon.com)

Pencapaian ini mencerminkan efektivitas berbagai upaya yang telah dilakukan dalam

pengendalian dampak perubahan iklim, termasuk program penghijauan, pengelolaan sampah berkelanjutan, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menerapkan kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Namun, tantangan masih ada, seperti perlunya

penguatan infrastruktur hijau dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. Dalam pencapaian tersebut di dorong pencapaian program sebagai berikut:

Tabel 3. 32
Capaian Anggaran Program pendukung sasaran 1.7

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian	Pelaksana
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	50,000,000.00	49,364,000.00	98.728%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	691,607,322.00	161,754,374.00	23.388%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2,862,854,567.00	2,726,458,454.00	95.236%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	149,999,346.00	149,998,596.00	99.999%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Program Pengembangan Permukiman	18,074,531,783.00	17,111,527,602.00	94.672%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Program Penataan Bangunan Gedung	6,147,861,300.00	4,940,936,300.00	80.368%	
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	22,702,324,776.00	21,499,446,252.00	94.702%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	305,500,000.00	157,744,900.00	51.635%	Dinas Perhubungan
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	439,050,645.00	396,970,444.00	90.416%	

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian	Pelaksana
Program Pengembangan Perumahan	270,206,540.00	122,574,750.000	45.363%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh	6,229,394,376.00	6,149,355,114.00	98.715%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	2,600,293,032.00	2,478,129,195.00	95.302%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	403,362,719.00	376,048,050.00	93.228%	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	525,702,126.00	520,364,072.00	98.985%	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	120,549,183.00	120,549,183.00	100.000 %	Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	229,546,776.00	225,664,088.00	98.309%	Dinas Lingkungan Hidup
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	119,999,485.00	119,789,310.00	99.825%	Dinas Lingkungan Hidup
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	78,743,106.00	77,628,206.00	98.584%	Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi,	81,172,400.00	2,100,000.00	2.587%	
Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)	204,818,271.00	203,172,212.00	99.196%	Dinas Lingkungan Hidup

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian	Pelaksana
Program Penatagunaan Tanah	1,229,221,401.00	637,719,840.00	51.880%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tatar Ruang
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	6,737,566,148.00	5,447,333,032.00	80.850%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tatar Ruang
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	9,387,736,565.00	9,209,713,098.00	98.104%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tatar Ruang
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2,982,946,628.00	2,982,946,628.00	100.000 %	Dinas Perhubungan
Rata-Rata Capaian Realisasi Program Anggaran			82.920%	

Berdasarkan data diatas bahwa rata-rata pencapaian kinerja indikator **110,05%** sedangkan capaian penyerapan anggaran **82.920%**, sehingga pencapaian kinerja sasaran ini telah efektif dan efisien. Sebagai upaya mempertahankan kinerja yang sudah dicapai kami melakukan analisa terhadap kendala, serta upaya atau strategi pemecahan masalah terkait sasaran 1.7 ini. Berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalahnya:

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 1.7 “Menurunnya Dampak Perubahan Iklim”		
<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakanya kegiatan monitoring terhadap emisi Gas Rumah Kaca Terlaksananya program pendukung yang relevan untuk mendukung pencapaian sasaran. Peningkatan kesadaran pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap emisi Gas Rumah Kaca Koordinasi dan kolaborasi dengan 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan limbah sehingga menimbulkan pencemaran yang belum sepenuhnya terkendali, khususnya limbah rumah tangga Telah diupayakan peningkatan transportasi umum dengan adanya BRT Kota Cirebon, namun kesadaran penggunaan transportasi umum masih rendah. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan koordinasi antar <i>stakeholder</i>, swasta, komunitas dan masyarakat untuk melakukan kolaborasi program yang berdampak pada lingkungan hidup dan penurunan Gas Emisi Rumah Kaca. Mengalokasikan lahan untuk difungsikan kawasan lindung atau area hijau diantaranya dengan memanfaatkan jalur pada jaringan jalan dan utilitas sebagai sarana penyediaan jalur hijau, melakukan pengaturan kepadatan bangunan dan memulihkan

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 1.7 “Menurunnya Dampak Perubahan Iklim”		
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah pusat serta NGO baik dari Nasional maupun internasional terkait dukungan pendanaan aksi mitigasi yang akan dilakukan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH). • Tidak adanya Dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK). 	<p>lahan yang telah beralih fungsi menjadi fungsi RTH.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan Projek CRIC (<i>Project Climate Relillience Inclusives Cities</i>) yang sedang berjalan untuk merencanakan program/ aksi-aksi daerah dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dan bagaimana mendapatkan supporting anggaran dari Pemerintah Pusat maupun NGO baik dari Daerah maupun Internasional.

Sasaran 1.8 “Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal”

Tabel 3. 33
Capaian Sasaran 1.8 “Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal” Tahun 2024

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi		Target Akhir RPD (2026)	Capaian Kinerja 2024
					N-1 (2023)	2024		
1.8	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	Persentase pelestarian obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya	Per sen	76,50	76,47	77,45	70,68	101,24%

Pemerintah Kota Cirebon terus berupaya mewujudkan pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan daerah untuk tetap hidup dan tumbuh di tengah arus globalisasi. Sasaran “Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal” dengan Indikator: Persentase Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya” ditetapkan dalam rangka mendukung tujuan Pemerintah Kota Cirebon. Pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal menjadi strategis mengingat pada Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026.

Pencapaian Indikator “Persentase pelestarian obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya”

Pelestarian objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya merupakan aspek penting dalam menjaga identitas, sejarah, serta kearifan lokal suatu daerah. Sebagai kota dengan warisan budaya yang kaya, Kota Cirebon memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Oleh karena itu, indikator Persentase Pelestarian Obyek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya menjadi ukuran penting dalam menilai sejauh mana upaya pelestarian tersebut telah dilakukan.

Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Cirebon menetapkan target capaian indikator ini sebesar 76,50%. Perhitungan persentase pelestarian dilakukan dengan menggabungkan dua data utama, yaitu jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan dan jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan.

Tabel 3. 34

Rekap Data Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang Dilestarikan

NO	DATA PEMAJUAN KEBUDAYAAN, MELIPUTI	JUMLAH	PELESTARIAN	
			Yang Dilestarikan	Presentase
1	2	3	4	5
1.	TRADISI LISAN	31	30	97
2.	MANUSKRIP	23	10	43
3.	ADAT ISTIADAT	34	24	71
4.	RITUS	20	16	80
5.	PENGETAHUAN TRADISIONAL	58	48	83
6.	TEKNOLOGI TRADISIONAL	11	11	100
7.	SENI	32	30	94
8.	BAHASA	7	7	100
9.	PERMAINAN RAKYAT	25	13	52
10.	OLAHRAGA TRADISIONAL	9	9	100
		250	198	79,20

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2024 diolah

Berdasarkan Tabel 3.31, dari total 250 objek pemajuan kebudayaan, sebanyak 198 objek telah dilestarikan dengan persentase 79,20%. Tradisi lisan memiliki tingkat pelestarian tertinggi (97%), diikuti oleh bahasa, olahraga tradisional, dan teknologi tradisional yang mencapai 100%. Sementara itu, kategori dengan tingkat pelestarian lebih rendah adalah manuskrip (43%) dan permainan rakyat (52%). Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan di Kota Cirebon telah berjalan baik, meskipun masih ada beberapa kategori yang perlu mendapatkan perhatian lebih agar warisan budaya tetap terjaga.

Tabel 3. 35
Data Cagar Budaya Yang Dimanfaatkan Tahun 2024

NO	NAMA OBYEK	ALAMAT			Kepemilikan
		Jalan	Kelurahan	Kecamatan	
PERLINDUNGAN SANGAT KETAT					
1	Gedung Balai Kota	Siliwangi	Sukapura	Kejaksan	pemerintah
2	Gedung Negara / Kersidenan	Siliwangi	Kesenden	Kejaksan	pemerintah
3	Pendopo Kabupaten Cirebon	Kartini	Kejaksan	Kejaksan	pemerintah
4	Bank Indonesia	Yos Sudarso	LMWK	LMWK	pemerintah
5	Bank Mandiri (eks.BDN)	Kantor	LMWK	LMWK	BUMN
6	Masjid (At Thyah) Merah Panjunan	Pekarungan	Panjunan	LMWK	masyarakat
7	Masjid Agung Sang Cipta Rasa	Kasepuhan	Kasepuhan	LMWK	masyarakat
8	Masjid Baitul Karim (Pesambangan)	Kampung pekalangan	Pekalangan	Pekalipan	masyarakat
9	Klenteng Talang	Talang No. 2	LMWK	LMWK	masyarakat
10	Klenteng Winaon	Winaon	Pekalipan	Pekalipan	masyarakat
11	Vihara Dewi Welas Asih	Kantor No. 2	Panjunan	LMWK	masyarakat
12	Gereja Bala Keselamatan	Sukalila Utara	Kejaksan	Kejaksan	masyarakat
13	Gereja Katolik Santo Yusup	Yos Sudarso	LMWK	LMWK	masyarakat
14	Stasiun Kereta Api Kejaksan	Siliwangi	Kesenden	Kejaksan	BUMN
15	Stasiun Kereta Api Parujakan	Nyimas Gandasari	Pekalangan	Pekalipan	BUMN
16	Pabrik Es Sari Petojo	Mayor Sastra Atmaja	LMWK	LMWK	BUMD
17	Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon	Kesambi no 38	Kesambi	Kesambi	pemerintah

NO	NAMA OBYEK	ALAMAT			Kepemilikan
		Jalan	Kelurahan	Kecamatan	
18	SD Negeri Pulasaren	Pulasaren	Pulasaren	Pekalipan	pemerintah
19	Gudang Bank BNI (BNI Syariah)	Sisingamangaraja	Panjunan	LMWK	BUMN
20	Patilasan/Taman Kera Kalijaga	Pramuka	Kalijaga	Harjamukti	masyarakat
21	Makam Syekh Maulana Maghribi	Astagarib Utara	Pekalangan	Pekalipan	masyarakat
22	Makam Tumenggung Arya Wiracula	Sukalila Utara	Kejaksan	Kejaksan	masyarakat
PERLINDUNGAN KETAT					
23	Gedung PT. Cipta Niaga	Niaga	LMWK	LMWK	BUMN
24	Gedung SMP Negeri 14	Kebumen	LMWK	LMWK	pemerintah
25	Gedung Kantor Pos Besar	Yos Sudarso	LMWK	LMWK	BUMN
26	Gedung SMP Negeri 16	Kebumen	LMWK	LMWK	pemerintah
27	Gedung SMP Negeri 15	Pasuketan	LMWK	LMWK	pemerintah
28	SPK & AKPER Depkes	KS. Tubun	Kejaksan	Kejaksan	pemerintah
29	Makam Syekh Lemah Abang	Kampung Kemlaten	Harjamukti	Harjamukti	masyarakat
PERLINDUNGAN CUKUP KETAT					
30	Menara PDAM Jalan Tuparev	Perujakan	Pekalangan	Pekalipan	pemerintah
31	Masjid Agung At Taqwa	Kartini	Kejaksan	Kejaksan	masyarakat
32	SD Negeri Kebon Baru	Veteran	Kebon Baru	Kejaksan	pemerintah
33	Gedung SMP Negeri 1	Siliwangi	Sukapura	Kejaksan	pemerintah
34	L P Klas I Kesambi	Kesambi	Kesambi	Kesambi	pemerintah
35	Kawasan Keraton Kasepuhan	Kasepuhan	LMWK	LMWK	Keraton Kasepuhan
	- Keraton Kasepuhan				
	- Eks. Keraton Pakungwati				
36	Kawasan Keraton Kanoman	Kampung Kanoman	LMWK	LMWK	Keraton Kanoman
	- Keraton Kanoman				
	- Eks. Keraton Kaprabonan				
37	Kawasan Kraton Kacirebonan	Pulasaren	Pulasaren	Pekalipan	Keraton Kacirbonan

NO	NAMA OBYEK	ALAMAT			Kepemilikan
		Jalan	Kelurahan	Kecamatan	
38	Kawasan Gua Sunyaragi	Sunyaragi	Sunyaragi	Kesambi	Keraton Kasepuhan
	- Gua Sunyaragi				
	- Pasanggrahan Sunyaragi				
39	Kawasan Etnis Arab (Panjunan)	Panjunan	Panjunan	Kejaksan	Masyarakat
	- Koridor Jalan Panjunan				
	- Sampel Bangunan Pertokoan				
40	Kawasan Etnis Cina (Pecinan)	Lemahwungkuk	LMWK	LMWK	Masyarakat
	- Koridor Jalan Lemahwungkuk				
	- Sampel Bangunan Pertokoan				
41	Situs Kejawan	Yos Sudarso	Pegambiran	Harjamukti	masyarakat
42	Gereja Kristen Pasundan Jemaat Cirebon	Kebumen	LMWK	LMWK	Masyarakat
43	Makam Pangeran Sipat Lurung	Pangeran drajat	Drajat	Drajat	masyarakat
44	Petilasan Pangeran Drajat	Pangeran Drajat	Drajat	Kesambi	masyarakat
45	Makam Pangeran Suryanegara	Jend.Sudirman	Harjamukti	Harjamukti	masyarakat
46	Makam Pangeran Sapu Jagat	Jagasatru	Jagasatru	Pekalipan	masyarakat
47	Tajug Pejlagrahan	Mayor sastraatmadja	Kasepuhan	Lemahwungkuk	masyarakat
48	Masjid P. Kejaksan	Pamitran	Kejaksan	Kejaksan	masyarakat
49	Masjid Jagabaya	Karanggetas No.191	Pekalangan	Pekalipan	masyarakat
50	Gedung B A T	Merdeka	Panjunan	LMWK	swasta
51	Situs Pedati Gede	Pekalangan	Pekalangan	Pekalipan	masyarakat
52	Kereta Singabarong	Jl.Kasepuhan No.43	Kasepuhan	Lemahwungkuk	keraton
53	Kereta Paksinagaliman Keraton Kanoman	Jl. Kanoman No.40	Lemahwungkuk	Lemahwungkuk	keraton

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2024 diolah

Berdasarkan tabel diatas, persentase jumlah cagar budaya yang dilestarikan dapat dihitung melalui rumus: $\frac{\text{Jumlah Cagar Budaya yang Dilestaiikan}}{\text{Jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan}} \times 100\% = \frac{53}{70} \times 100\% = 75,7\%$. Dengan demikian, tingkat pelestarian objek pemajuan kebudayaan di Kota Cirebon mencapai 79,2% pada tahun 2024.

Dengan mengambil rata-rata dari kedua nilai tersebut, diperoleh angka capaian indikator Persentase pelestarian obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya sebagai berikut: $\frac{75,7\%+79,2\%}{2} \times 100\% = 77,45\%$

Dengan capaian sebesar **77,45%**, indikator ini berhasil melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2024. Jika dihitung berdasarkan rasio **realisasi terhadap target**, maka pencapaiannya adalah: $\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% = \frac{77,45}{76,50} \times 100\% = 101,24\%$

Hasil ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian kebudayaan dan cagar budaya di Kota Cirebon telah berjalan dengan baik dan melampaui ekspektasi yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Cirebon dalam menjaga warisan budaya sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan dan penguatan identitas daerah.

Evaluasi Pencapaian Sasaran 1.8 : Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan local

Keberlanjutan upaya pelestarian ini menjadi krusial dalam memperkuat daya tarik budaya Kota Cirebon, tidak hanya bagi masyarakat lokal tetapi juga bagi wisatawan dan pelaku budaya. Dengan mempertahankan serta meningkatkan program pelestarian dan pengembangan kebudayaan, Kota Cirebon dapat terus menjadi pusat kebudayaan yang berdaya saing serta memperkuat identitas lokal dalam arus modernisasi. Dalam mendukung pencapaian indikator Tujuan/Sasaran "Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal" tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan program-program sebagai berikut:

Tabel 3. 36
Capaian Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1.8

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
Program Pengembangan Kebudayaan	1,605,573,628.00	1,603,618,603.00	99.878%
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	179,852,063.00	174,931,238.00	97.264%
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	839,363,736.00	833,537,736.00	99.306%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			98.816%

Pencapaian Sasaran “Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal” tergambarkan dari rata-rata pencapaian sebagai alat ukur yaitu sebesar 101,24% atau **Melebihi Target**. Berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalahnya :

Tabel 3.22

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
<ul style="list-style-type: none"> Dilakukan koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholders kebudayaan (Pemerintah Pusat, Provinsi, Pelaku Budaya/Masyarakat) dalam upaya pemajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya 	<ul style="list-style-type: none"> Pengaruh globalisasi dan modernisasi saat ini menyebabkan regenerasi sulit dilakukan, dimana generasi muda lebih tertarik untuk mempelajari budaya luar daripada budaya daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Terus melakukan upaya pemajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya, melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
	<ul style="list-style-type: none"> Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam melestarikan kebudayaan dan cagar budaya 	<ul style="list-style-type: none"> Melibatkan masyarakat, khususnya generasi muda untuk terus berperan aktif dalam upaya pemajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya

Sasaran 1.9 “Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka”

Tabel 3. 37

Capaian Sasaran 1.9 “Menurunnya tingkat pengangguran terbuka” Tahun 2024

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi		Target Akhir RPD (2026)	Capaian Kinerja 2024
					N-1 (2023)	2024		
1.9	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	7,65	7,66	6,29	9,50	117,8%

Menurunnya Tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang digunakan untuk mengetahui berapa banyak penduduk umur kerja yang sedang mencari pekerjaan. TPT dihitung dengan membandingkan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah Angkatan kerja..

Pencapaian Indikator “Tingkat Pengangguran Terbuka”

Pada tahun 2024 Pemerintah Kota Cirebon menargetkan indikator “Tingkat Pengangguran Terbuka” adalah 7,65% sesuai dengan Rencana *Pembangunan Daerah 2024-2026* dan memperoleh realisasi sebesar 6,29% (*Sumber data BPS Kota Cirebon*). Hal ini menunjukkan bahwa adanya penurunan dari realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar 7,66%. Namun dapat dibandingkan data Tingkat Pengangguran Terbuka antara Kota Cirebon dengan regional Jawa Barat yaitu:

Tabel 3. 38

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka antara Kota Cirebon dengan regional Jawa Barat

No	Kota Cirebon	Tahun			Ket
		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	8.42	7.66	6.29	
No	Jawa Barat	Tahun			Ket
		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	7.89	7.44	6.75	

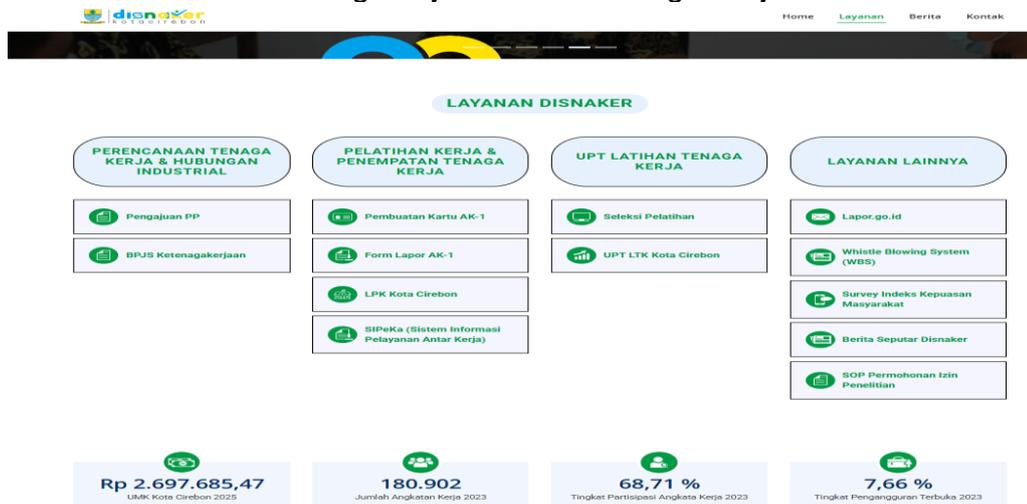
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan data realisasi tersebut pencapaian kinerja atas indikator tingkat pengangguran terbuka adalah $\frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\% = \frac{7,65 - (6,29 - 7,65)}{7,65} \times 100\% = 117,8\%$ atau **Melebihi Target**, jika dibandingkan dengan Regional Provinsi Jawa Barat pun dengan tingkat pengangguran terbuka 6.75% dan Kota Cirebon 6.29% maka Kota Cirebon memiliki kondisi tingkat pengangguran yang lebih rendah atau berarti lebih baik daripada rata-rata di Jawa Barat.

Evaluasi Sasaran 1.9 “Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka”

Realisasi indikator Tingkat Penurunan Terbuka mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, salah satu penyebabnya adalah Pendidikan dan Pelatihan berorientasi pada penempatan kerja. Dalam rangka Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka. Dalam upaya menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan pelayanan ketenagakerjaan, inovasi merupakan hal yang harus dilakukan untuk memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan pelayanan, salah satu inovasi yang memanfaatkan teknologi informasi adalah:

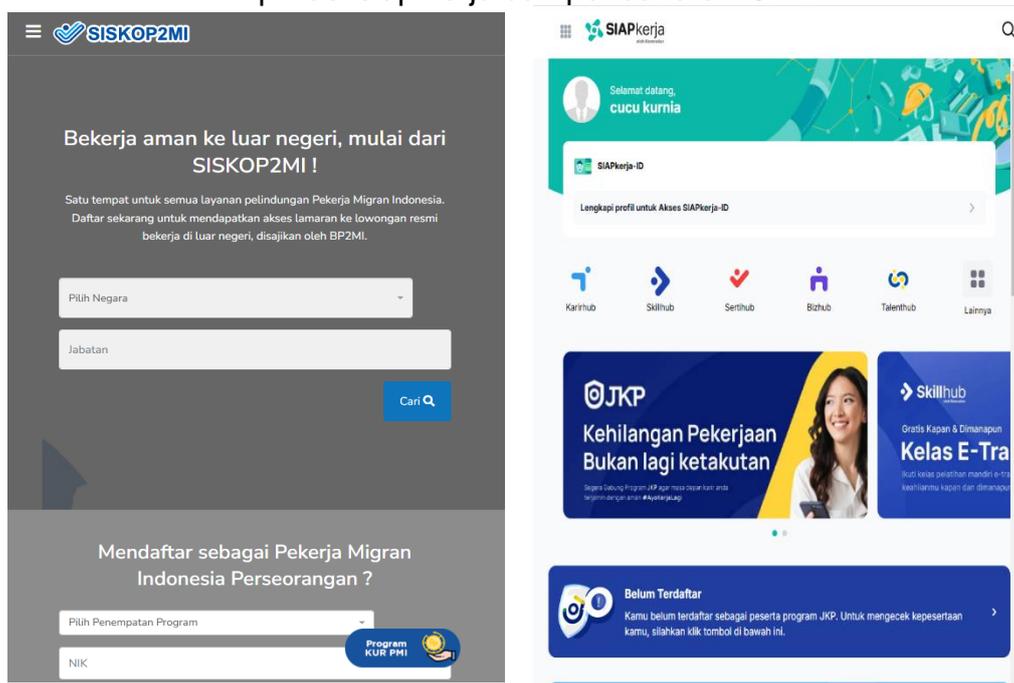
Gambar 3. 16
Sistem Informasi Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon



Sumber: disnaker.cirebonkota.go.id

Selain itu untuk mempertahankan tingkat pelayanan bagi para pencari kerja yang ingin bekerja ke luar negeri atau sering disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI), dengan aplikasi dari kementerian ketenagakerjaan Republik Indonesia seperti siap.kerja dan pendaftaran.cpmi.

Gambar 3. 17
Aplikasi siap.kerja dan pendaftaran CPMI



Sumber: Disnaker 2024

Target TPT Pada tahun 2024 sebesar 8,01%, diharapkan menurun pada tahun 2025 menjadi 7,88%, hingga menjadi 7,76% pada tahun 2026. Tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang digunakan untuk mengetahui berapa banyak penduduk umur kerja yang sedang mencari pekerjaan. TPT dihitung dengan membandingkan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah Angkatan kerja. Perkembangan TPT Kota Cirebon dalam 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 39
Perkembangan TPT Kota Cirebon dalam 5 Tahun Terakhir

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	9,04	10,97	10,53	8,42	7,66

Sumber data BPS Kota Cirebon

Berdasarkan data di atas, TPT di Kota Cirebon pada tahun 2021 mencapai 10,53 persen. Adanya wabah Covid-19 sangat mempengaruhi penduduk untuk beraktivitas secara ekonomi, sehingga berdampak pada penghasilan dan pemenuhan kebutuhan keluarga. Dampak adanya pandemi Covid-19 di bidang ketenagakerjaan, antara lain adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), perusahaan tidak dapat memproduksi, dan pembatasan aktivitas ekonomi karena adanya pembatasan mobilitas penduduk.

Pemerintah Kota Cirebon telah melaksanakan berbagai program lintas sektor serta bekerja sama dengan masyarakat maupun pihak swasta, beberapa program yang menunjang secara langsung sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 40
Capaian Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1.9

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2,550,801,868.00	581,491,779.00	22.796%
Program Penempatan Tenaga Kerja	344,997,572.00	332,264,972.00	96.309%
Program Perencanaan Tenaga Kerja	58,999,407.00	58,014,550.00	98.331%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			72.479%

Sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dalam sasaran penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka, berikut adalah hal-hal yang mendukung sasaran, kendala serta strategi pemecahan masalah.

Tabel 3. 41
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 1.9 "Menurunnya tingkat Pengangguran Terbuka" Tahun 2024

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
<ul style="list-style-type: none"> Program Pelatihan dan Pendidikan Vokasi Pendidikan dan Pelatihan berorientasi pada penempatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Kota Cirebon Peningkatan Jumlah BKK di Kota Cirebon Pembinaan Perusahaan terkait tata kelola yang layak di Kota Cirebon 	<ul style="list-style-type: none"> Kompetensi kerja yang belum sesuai dengan kebutuhan lapangan usaha Jenis pelatihan yang tersedia kurang dibutuhkan oleh dunia usaha 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi

Tujuan 2 : “Meningkatnya Pertumbuhan Potensi, Kapasitas, dan Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi Daerah”

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Cirebon untuk tahun perencanaan 2024-2026, salah satu tujuannya adalah “Meningkatkan Potensi, Kapasitas dan Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi Daerah” Tujuan ini merupakan arahan untuk meningkatkan daya saing pembangunan daerah melalui peningkatan potensi kontribusi pertumbuhan ekonomi daerah.

Sebagai tolak ukur dalam mewujudkan tujuan ini, ditetapkan 1 tujuan dan 2 sasaran yang akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3. 42
Tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Potensi, Kapasitas, dan Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi Daerah

NO	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi		Target Akhir RPD (2026)	Capaian Kinerja 2024
					N-1 (2023)	2024		
1	Meningkatnya Pertumbuhan Potensi, Kapasitas, dan Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	4,49	5,01	5,02	5,29	111,8%

Tujuan “Meningkatnya Pertumbuhan Potensi, Kapasitas, dan Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi Daerah” diukur dengan sebuah Indikator : “Laju Pertumbuhan Ekonomi”. Indeks ini relevan menjadi tolak ukur dalam menilai secara umum kapabilitas dan manajemen Pemerintahan di suatu Instansi karena cakupan faktor dalam pengukuran pertumbuhan ekonomi di Kota Cirebon. Salah satu tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi nasional atau daerah adalah tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan ekonomi. Tanpa adanya pertumbuhan ekonomi maka pembangunan ekonomi suatu daerah/wilayah kurang bermakna (Meier, 1995). Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di

Kabupaten/Kota Ciayumajakuning terlihat cukup bervariasi. Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2020 di Kawasan Ciayumajakuning adalah Kabupaten Majalengka dengan LPE mencapai 0,86 persen sementara 3 daerah lain termasuk Kota Cirebon LPE-nya negatif. Tahun 2021, ketika semua daerah di wilayah Ciayumajakuning mengalami pertumbuhan ekonomi yang membaik, LPE Kabupaten Majalengka tetap yang tertinggi dibandingkan 4 daerah lain termasuk Kota Cirebon. Meskipun LPE Kabupaten Majalengka Tahun 2021 dan 2022 paling tinggi dibandingkan daerah lain di wilayah Ciayumajakuning, akan tetapi kenaikan LPE diraih Kota Cirebon pada Tahun 2024 yaitu naik menjadi 5,02% dari capaian tahun sebelumnya yaitu 5,01%.

Pencapaian Indikator “Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)”

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan indikator utama dalam mengukur perkembangan ekonomi suatu daerah dalam periode tertentu. Indikator ini mencerminkan tingkat kenaikan atau penurunan produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dan digunakan sebagai parameter utama dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi. Di Kota Cirebon indikator ini memiliki urgensi sebagai tolak ukur kondisi ekonomi di Kota Cirebon, untuk menunjukkan sejauh mana kebijakan ekonomi daerah berhasil meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kota Cirebon menargetkan Indikator tujuan tersebut adalah 4,49% dan memperoleh capaian sebesar 5,02% Hal ini menunjukkan bahwa adanya perubahan realiasi dari tahun sebelumnya yaitu 5.01%. berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja indikator LPE adalah $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\% =$

$$\frac{5,02\%}{4,49\%} \times 100\% = 111,8\%, \text{ atau } \mathbf{Melebihi Target.}$$

Perbandingan Indikator Makro Pembangunan Kota Cirebon Berdasarkan Target RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 dan Target RPD Kota Cirebon Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

Tabel 3. 43
Perbandingan Target RPD Provinsi Jawa Barat dan Kota Cirebon 2024-2026

NO	RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026				RPD Kota Cirebon 2024-2026			
	Indikator Pembangunan	Target			Indikator Pembangunan	Target		
		2024	2025	2026		2024	2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,42	5,68	5,54	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	4,49	5,08	5,29

Sumber Bappeda Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat mencapai realisasi LPE sebesar 4,95% sementara Kota Cirebon sebesar 5,02% Hal ini menunjukkan bahwa adanya percepatan yang lebih baik dari pertumbuhan ekonomi di Kota Cirebon dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat .

Evaluasi Indikator Tujuan ” Meningkatkan potensi, kapasitas dan kontribusi pertumbuhan ekonomi daerah”

Pada tahun terbaru, **LPE Kota Cirebon mencapai 5,02%**, lebih tinggi dibandingkan dengan **Provinsi Jawa Barat yang berada di angka 4,95%**. Capaian ini menunjukkan bahwa Kota Cirebon memiliki dinamika ekonomi yang lebih kuat dibandingkan rata-rata provinsi. Pertumbuhan ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk meningkatnya sektor perdagangan dan jasa, sektor lapangan usaha serta kebijakan pemerintah yang mendukung investasi dan pengembangan UMKM. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Kota Cirebon mampu menjaga stabilitas dan daya saing ekonominya. Ke depan, diperlukan strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, seperti memperkuat infrastruktur, meningkatkan kualitas tenaga kerja, serta memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal guna menjaga tren positif ini

Sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dalam sasaran 2.1, berikut adalah hal-hal yang mendukung sasaran, kendala serta strategi pemecahan masalah :

Tabel 3. 44
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Tujuan 2

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Peran terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Cirebon pada tahun 2024 berasal dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor yang mencapai 27,31 persen, kemudian peran terbesar kedua adalah lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan dengan peran sebesar 15,14 persen. Kemudian disusul lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 10,86 persen.	Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut lapangan usaha di Kota Cirebon sektor Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pengadaan listrik dan gas; serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	Program pelatihan yang disesuaikan berdasarkan lapangan usaha.
PDRB juga mengalami kenaikan dari 28,8 triliun rupiah menjadi 30,5 triliun rupiah. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh bertambahnya produksi barang dan jasa di hampir seluruh lapangan usaha.		

Sasaran 2.1 “Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan”

Sasaran 2.1 Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan merupakan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 yang di tetapkan pada Tahun 2023. Sasaran ini mempunyai beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 3. 45
Capaian Sasaran 2.1. “Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan”
Tahun 2024

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi		Target Akhir RPD (2026)	Capaian Kinerja 2024
					N-1 (2023)	2024		
2.1.	Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan	Kontribusi PDRB dari Sektor Industri (ADHB)	Persen	10,87	10,44	10,09	11,82	92,82%
		Kontribusi PDRB dari Sektor Pariwisata (ADHB) (Persen)	Persen	5,60	5,59	5,72	5,98	102,14%
		Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan (ADHB)	Persen	30,46	28,77	27,31	32,10	89,66%
		Kontribusi PDRB dari Sektor Pertanian dan Perikanan (ADHB)	Persen	0,34	0,34	0,32	0,34	94,12%
Rata-rata Pencapaian Kinerja								94,69%

Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan menjadi sasaran strategis Pemerintah Kota Cirebon sebagaimana tertuang di RPD Kota Cirebon 2024-2026, hal ini merupakan upaya meningkatkan ekonomi di Kota Cirebon. Sebagai tolak ukur pencapain dari sasaran tersebut adalah memiliki empat indikator, diantaranya :

1. Kontribusi PDRB dari Sektor Industri (ADHB) ;
2. Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan (ADHB) ;
3. Kontribusi PDRB dari Sektor Pariwisata (ADHB) dan ;
4. Kontribusi PDRB dari Sektor Pertanian dan Perikanan (ADHB) ;

Ke empat indikator tersebut menjadi faktor pendorong dari sasaran “Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan” dan menjadi sebuah gambaran bagaimana peran dari indikator tersebut berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomis inklusif, karena memuat data pengukuran kontribusi produksi dari beberapa sektor tersebut.

Pencapaian Indikator “Sasaran Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan”

Pemerintah Kota Cirebon berupaya meningkatkan pengembangan ekonomi berkelanjutan melalui indikator PDRB dari sektor Industri, Perdagangan, Pariwisata dan Pertanian Perikanan sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026. Pengembangan ekonomi berkelanjutan di Kota Cirebon menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya mengutamakan aspek keuntungan jangka pendek, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Kota Cirebon memiliki potensi besar di sektor industri, perdagangan, pariwisata, serta pertanian dan perikanan yang perlu dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan.

1. **Industri:** Cirebon memiliki sektor industri yang berkembang, terutama dalam industri pengolahan makanan, tekstil, dan manufaktur. Meningkatkan sektor industri dengan memperhatikan efisiensi energi, ramah lingkungan, dan peningkatan produktivitas dapat menjadi kunci dalam memajukan perekonomian kota ini.
2. **Perdagangan:** Sebagai kota yang terletak strategis di jalur transportasi, Cirebon menjadi pusat perdagangan yang penting di wilayah Jawa Barat. Peningkatan akses pasar, promosi produk lokal, dan penggunaan teknologi digital dapat mendorong keberlanjutan sektor perdagangan.
3. **Pariwisata:** Kota Cirebon memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata dengan kekayaan budaya, sejarah, dan alamnya. Mengembangkan pariwisata yang berbasis pada keberlanjutan, seperti ekowisata, dapat memberikan dampak positif jangka panjang, tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga untuk pelestarian budaya dan alam.
4. **Pertanian dan Perikanan:** Cirebon juga dikenal dengan sektor pertanian dan perikananannya, dengan produksi komoditas unggulan seperti padi, sayuran, dan ikan. Mengoptimalkan pertanian dan perikanan dengan teknologi yang ramah lingkungan dan praktik pertanian berkelanjutan dapat mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani serta nelayan.

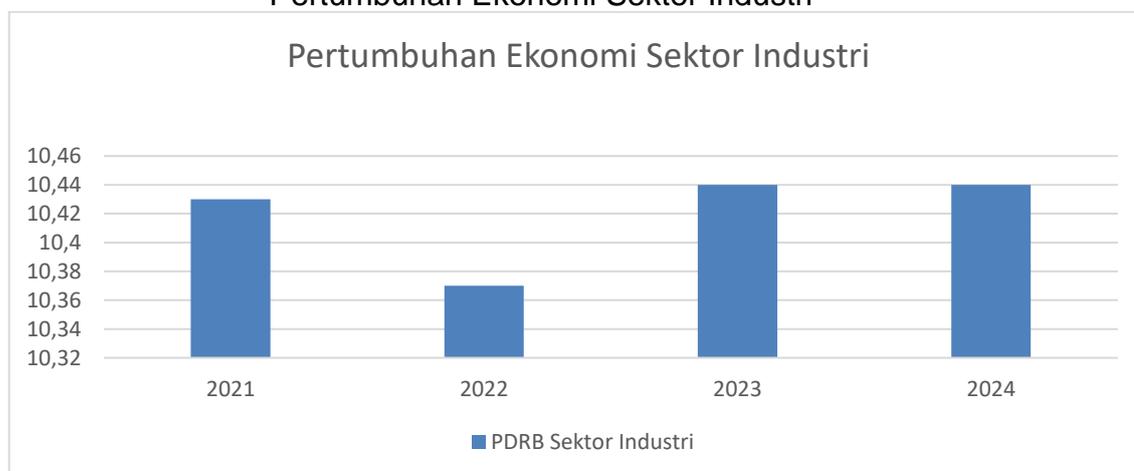
Dalam konteks ini, penting untuk mengukur dan memantau perkembangan sektor-sektor tersebut melalui indikator-indikator yang relevan, seperti produktivitas sektor industri, pertumbuhan volume perdagangan, jumlah wisatawan, dan hasil pertanian/perikanan yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan teori pembangunan berkelanjutan yang dikemukakan oleh Brundtland Report (1987), yang menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhinya. Pentingnya pemantauan dan

pengukuran indikator-indikator tersebut akan membantu Pemerintah Kota Cirebon untuk mengambil kebijakan yang lebih terfokus dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan menciptakan ekonomi yang berkelanjutan, pada tahun 2024 secara umum pencapaian pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon cukup baik dengan capaian ke 4 (empat) indikator pencapaian PDRB sebagai berikut

1. Kontribusi PDRB dari Sektor Industri (ADHB)

PDRB sektor industri menargetkan 10,87 sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 dan mencapai target sebesar 10,09%, hal ini menunjukkan bahwa adanya perubahan dari hasil tahun sebelumnya yaitu 10,44%, salah satu penyebab turunnya hasil realisasi dari tahun sebelumnya adalah Belum tersedianya regulasi tentang Pembangunan Industri Kota. Jika dibandingkan tahun tahun sebelumnya pertumbuhan ekonomi pada sektor industri di Kota Cirebon ini dalam 3 tahun terakhir terus mengalami perubahan karena didominasi oleh aktivitas industri di Kota Cirebon. Berikut grafik pertumbuhan ekonomi di Kota Cirebon melalui Sektor Industri:

Gambar 3. 18
Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri



Sumber : BPS-Cirebon Satu Data 2025, diolah

Berdasarkan data diatas maka Pencapaian indikator tersebut dalam tahun 2024 adalah : $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = \frac{10,09\%}{10,87\%} \times 100\% = 92,82\%$, atau **Sangat Baik**

2. Kontribusi PDRB dari Sektor Pariwisata (ADHB) ;

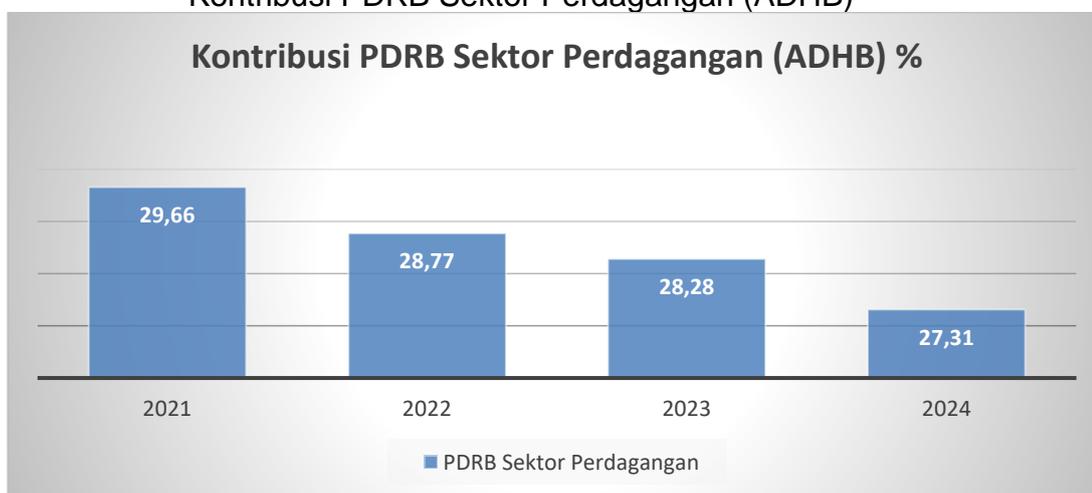
Peningkatan ekonomi pada Sektor Pariwisata yang di ukur melalui pertumbuhan kontribusi PDRB mencapai realisasi sebesar 5,72% dari target 5,60% yang telah di tetapkan, meningkatnya peran pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif menjadi indikator yang mendukung sasaran ini. PDRB sektor pariwisata lazim dijadikan sebuah gambaran bagaimana peran

pariwisata berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomis inklusif, karena memuat data pengukuran kontribusi produksi dari sektor pariwisata yang tumbuh cukup signifikan pada tahun 2024, kendati pada kondisi tahun 2019-2021 sempat mengalami penurunan, sehingga stimulus kenaikan PDRB pada sektor ini mempengaruhi secara signifikan dalam persentase pertumbuhannya, selain itu sektor akomodasi mengalami kenaikan, selain kondisi pandemi yang semakin membaik dan berkurangnya Pembatasan Skala Besar, sektor akomodasi yang di dominasi oleh penginapan/hotel juga tumbuh pesat seiring pulihnya ekonomi di Kota Cirebon pada tahun 2024. Pencapaian kinerja atas indikator ini adalah $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = \frac{5,722\%}{5,60\%} \times 100\% = 102,14\%$, atau **Melebihi Target**.

3. Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan (ADHB)

Peningkatan PDRB dari Sektor Perdagangan berdasarkan data data BPS dalam rilis resmi PDRB Kota Cirebon tahun 2024 adalah 27,37% dari target 30,46%. Salah satu penyebab tidak signifikannya PDRB dari sektor perdagangan secara persentase terhadap total PDRB, karena pada tahun 2023 Kota Cirebon telah mulai pulih dari pandemi dan hampir seluruh sektor mengalami pertumbuhan sebesar 3,55%, kenaikan kontribusi atas sektor lain di luar sektor perdagangan mempengaruhi persentase kontribusi sektor perdagangan, secara pertumbuhan sesungguhnya PDRB sektor perdagangan mengalami kenaikan *Menurut Lapangan Usaha di Kota Cirebon (miliar rupiah)* tahun 2023 sebesar 8.136 dan tahun 2024 sebesar 8.340. Secara umum pertumbuhan ekonomi menunjukkan pencapaian yang positif di Kota Cirebon. dalam beberapa tahu terakhir berikut perkembangan PDRB sektor Perdagagn (ADHB)

Gambar 3. 19
Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan (ADHB)



4. Kontribusi PDRB dari Sektor Pertanian dan Perikanan (ADHB) ;

Kontribusi PDRB dari Sektor Pertanian dan Perikanan (ADHB) pertanian dan perikanan mencapai realisasi sebesar 0,25% dari target 0,34% yang telah ditetapkan, hasil ini mengalami perubahan pada tahun sebelumnya yaitu 0,32%. salah satu penyebab nya adalah Perubahan cuaca yang tidak menentu dapat mengancam produksi pertanian dan perikanan, . Peningkatan ekonomi melalui kontribusi dari sektor pertanian dan perikanan dalam 4 (empat) tahun terakhir disajikan pada tabel sebagai berikut:

Gambar 3. 20
Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan (ADHB)



Berdasarkan data di atas maka pencapaian kinerja atas indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{0,25\%}{0,34\%} \times 100\% = 74\%, \text{ atau } \mathbf{Baik}$$

Evaluasi Sasaran “Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan”

Realisasi sasaran Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, salah satu penyebabnya adalah Ketersediaan sumber daya aparatur Motivasi kerja yang tinggi dengan pola kerja yang sistematis , beberapa program yang menunjang secara langsung sasaran ini adalah sebagai berikut :

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	642,481,536.00	575,160,056.00	89.522%

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	642,481,536.00	33,963,000.00	5.286%
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	44,016,180.00	43,213,400.00	98.176%
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2,793,505,830.00	2,213,118,935.00	79.224%
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1,470,986,320.00	1,457,433,766.00	99.079%
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	219,413,936.00	208,887,024.00	95.202%
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	272,927,250.00	256,724,500.00	94.063%
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	219,309,064.00	204,691,364.00	93.335%
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	142,527,400.00	133,774,900.00	93.859%
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	262,736,988.00	203,067,710.00	77.289%
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	70,024,400.00	68,201,400.00	97.397%
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	32,143,585.00	10,000,000.00	31.110%
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	477,620,000.00	471,491,600.00	98.717%
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	106,676,300.00	106,676,300.00	100.000%

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	345,941,264.00	284,524,452.00	82.246%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			87,98%

Sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dalam sasaran 2.1, berikut adalah hal-hal yang mendukung sasaran, kendala serta strategi pemecahan masalah:

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Kontribusi PDRB dari Sektor Industri (ADHB)		
<ul style="list-style-type: none"> • Kewenangan DKUKMPP • Ketersediaan sumber daya aparatur • Motivasi kerja yang tinggi dengan pola kerja yang sistematis • Ketersediaan Anggaran, sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran Terbatas • Belum tersedianya regulasi tentang Pembangunan Industri Kota • Sarana dan prasarana pendukung kegiatan belum memadai Modal Industri Kecil Menengah • Belum meningkatnya kompetensi Industri Kecil Menengah (IKM) • Belum adanya implementasi wirausaha baru dari hasil pelatihan dan bimtek yang telah dilaksanakan • Masih rendahnya inovasi Industri Kecil Menengah dalam menghasilkan produk yang terbaru • Masih rendahnya Industri Kecil Menengah dalam memahami masalah perizinan (NIB, PIRT, BPOM, HAKI dan Sertifikasi Halal) • Desain kemasan produk Industri Kecil Menengah masih banyak yang belum standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan Anggaran yang tersedia • Membuat Regulasi tentang Pembangunan Industri Kota (Dalam Proses Perda) • Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada • Memfasilitasi Industri Kecil Menengah dengan Lembaga Keuangan • Memberikan bimbingan teknis kepada Industri Kecil Menengah • Melakukan kunjungan dan pembinaan secara langsung ke pelaku usaha • Perlu work shop dan narasumber dibidang pengembangan dan kualitas produk • Sosialisasi perizinan (NIB, PIRT, BPOM, HAKI, dan Sertifikasi Halal) • Bantuan fasilitasi dan teknis pengemasan produk • Perlu pengembangan jejaring promosi/pemasaran ke luar daerah dan menggiatkan promosi online via internet • Sosialisasi teknologi tepat guna sederhana untuk para pelaku usaha

	<ul style="list-style-type: none"> • Industri Kecil Menengah belum banyak memanfaatkan media sosial dan internet untuk pemasaran promosi produk • Mutu produk Industri Kecil Menengah masih banyak yang belum memenuhi standar. 	
Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan (ADHB)		
<ul style="list-style-type: none"> • Kewenangan DKUKMPP • Ketersediaan sumber daya aparatur • Motivasi kerja yang tinggi dengan pola kerja yang sistematis • Ketersediaan Anggaran, sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya SDM • Kurangnya pemahaman pelaku usaha yang siap berorientasi ekspor • Kurangnya promosi produk-produk unggulan yang berorientasi ekspor • Kurangnya publikasi harga barang kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Cirebon 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengusulkan tenaga/SDM untuk di Bidang Perdagangan • Melaksanakan kegiatan pembinaan pelaku usaha ekspor Kota Cirebon • Melaksanakan kegiatan pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri berpotensi ekspor pada tahun yang akan datang • Melaksanakan pemantauan harga dan publikasi setiap hari kerja (Senin s/d Jumat) melalui surat kabar, dan Instagram. Melaksanakan Mall UKM Klemprakan yang berkoodinasi dan sinergi dengan Bulog, BJB, Apindo, dan Pengusaha dagang lainnya dengan tujuan pengendalian harga barang kebutuhan pokok di pasar Kota Cirebon.
Kontribusi PDRB dari Sektor Pertanian dan Perikanan (ADHB)		
Inovasi teknologi dalam alat pertanian, teknik budidaya, serta pengolahan hasil perikanan mampu meningkatkan efisiensi dan hasil produksi	Perubahan cuaca yang tidak menentu dapat mengancam produksi pertanian dan perikanan	Diversifikasi produk untuk mengurangi risiko kegagalan panen akibat perubahan iklim atau serangan hama
Kontribusi PDRB dari Sektor Pariwisata (ADHB)		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Aksesibilitas 2. Akomodasi 3. Fasilitas 4. Infrastruktur pendukung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Infrastruktur yang Kurang Memadai 2. Sumber Daya Pariwisata 3. Promosi dan Pemasaran 4. Kualitas Pelayanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Infrastruktur Pariwisata 2. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata 3. Peningkatan Promosi dan Pemasaran 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan

Sasaran 2.2 “Meningkatnya Investasi Penanaman Modal”

Tabel 3. 46

Capaian Sasaran 2.2 “Meningkatnya investasi penanaman modal” Tahun 2024

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi		Target Akhir RPD (2026)	Capaian Kinerja 2024
					N-1 (2023)	2024		
2.2.	Meningkatnya investasi penanaman modal	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Persen	4,68	-	4,75	6,36	101,50%

Sasaran strategis 2.2 “Meningkatnya Investasi Penanaman Modal” merupakan upaya mendukung Kota Cirebon dari bidang investasi penanaman modal. Sebagai tolak ukur pencapaian sasaran ditetapkan satu indikator yaitu Persentase peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN. Investasi tersebut terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA). Mayoritas investasi PMDN berasal dari pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), sementara PMA lebih berfokus pada industri besar. Sektor unggulan di Kota Cirebon meliputi industri makanan, perdagangan besar makanan dan minuman, serta kuliner.

Pencapaian Indikator “Persentase Peningkatan Realisasi Investasi PMA dan PMDN”

Nilai investasi yang masuk ke Kota Cirebon dari tahun ke tahun mengalami perkembangan fluktuatif, kendati fluktuatif namun pertumbuhan investasi di Kota Cirebon cukup positif, dalam beberapa tahun kebelakang klimaks arus investasi terjadi pada tahun 2022 dengan nilai investasi yang tercatat mencapai 6.595.330.510.285, hal ini menyiratkan kondisi ekonomi yang membaik pasca penanganan pandemi. Pada tahun-tahun berikutnya nilai investasi cenderung menurun karena klimaks arus investasi telah terjadi, namun hal ini bukan berarti menunjukkan kondisi arus investasi yang buruk, nilai investasi tahunan Kota Cirebon selalu mencapai target investasi skala regional.

Berdasarkan Teori Pertumbuhan Ekonomi (*Solow-Swan Model*), Model ini menyatakan bahwa investasi dalam modal fisik (seperti infrastruktur dan pabrik) serta modal manusia (seperti pendidikan dan keterampilan tenaga kerja) berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam konteks daerah, investasi yang masuk akan meningkatkan akumulasi modal, yang pada akhirnya

mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dalam beberapa tahun ke depan. Maka secara umum investasi memberikan dampak secara jangka panjang sekitar 5-10 tahun. Berdasarkan hal tersebut analisis terhadap pertambahan nilai investasi lebih relevan jika di hitung nilai pertumbuhan secara kumulatif, dalam hal ini dapat di hitung dalam 10 tahun terakhir. Data Investasi 10 tahun terakhir di Kota Cirebon:

Tabel 3. 47

Nilai Pertumbuhan Kumulatif Kota Cirebon dalam 10 Tahun Terakhir

No	Tahun	PMA		PMDN		JUMLAH		Target	
		Jml Invs.	Nilai Investasi	Jml Invs.	Nilai Investasi	Jml Invs.	Nilai Investasi		
1	2014		791.200.000.000,00				791.200.000.000,00		
2	2015		1.387.000.000.000				1.387.000.000.000,00		
3	2016		500.000.000.000,00		13.566.542.000.000,00		14.066.542.000.000,00		
4	2017		7.900.000.000.000		18.029.087.000.000,00		25.929.087.000.000,00		
5	2018	3	27.000.000.000	640	1.593.337.839.071	643	1.620.337.839.071	500 Milyar	
6	2019	0	0	427	312.540.898.947	427	312.540.898.947	500 Milyar	
7	2020	0	0	291	409.940.338.459	291	409.940.338.459	500 Milyar	
8	2021	5	47.981.800.000	2170	2.085.091.255.707	2175	2.133.073.055.707	1.800 Milyar	
9	2022	36	1.430.164.421.483	5972	5.165.166.088.802	6008	6.595.330.510.285	1.900 Milyar	
10	2023	25	269.700.542.972	5.830	3.993.070.410.085	5.855	4.262.770.953.057	2.000 Milyar	
		TOTAL 10 TAHUN (TIME SERIES)						57.507.822.595.526	
	2024	42	581.817.432.773	10695	2.149.369.560.021	10737	2.731.186.992.794	2.100 Milyar	

Sumber Profil data statistik Kota Cirebon 2018 – OSS RBA 2025, diolah

Data diatas menunjukkan bahwa selama 10 tahun terakhir Kota Cirebon memiliki total investasi masuk sebesar **57.507.822.595.526** , dengan target kenaikan 4,68% di tahun berikutnya maka di targetkan investasi masuk berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 (RPD 2024-2026) adalah 2.691.366.097.470,62 atau sekitar 2,6 Triliyun, selisih 0,5 triliyun atau lebih optimis daripada target Pemerintah Provinsi yaitu 2,1 Triliun. Pada tahun 2024 arus investasi menunjukkan angka yang positif yaitu 2.731.186.992.794 atau 4,75% nilai tambah dari total investasi selama 10 tahun terakhir. Pencapaian kinerja atas indikator ini melebihi target tahun 2024 dalam RPD 2024-2026 maupun target

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan capaian kinerja indikator

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{4,75\%}{4,68\%} \times 100\% = 101,50\%, \text{ atau } \mathbf{Melebihi Target}.$$

Evaluasi Sasaran 2.2 “Meningkatnya investasi penanaman modal Meningkatnya investasi penanaman modal”

<p style="text-align: center;">Gambar 3. 21 Realisasi Investasi Kota Cirebon Capai Rp.1,97 Triliun dengan dominasi UMKM</p> 	<p><i>Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon Mencatat Realisasi Investasi Mencapai Rp1,97 Triliun Hingga Oktober 2024. Angka Ini Jauh Melampaui Target Awal Yang Ditetapkan Sebesar Rp860 Miliar, Mencerminkan Pertumbuhan Positif Dalam Iklim Investasi Daerah Tersebut. (bisnis.com, 2024)</i></p>
---	--

Kendati tingkat pencapaian telah melebihi target namun hal ini menjadi tantangan pada tahun berikutnya supaya tetap dapat dipertahankan bahkan meningkat, beberapa program yang mendukung capaian Sasaran 2.2 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 48
Capaian Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2.2

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian	Pelaksana
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	402.375.540	332.288.776	82,58%	DPMPPTSP
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	241.745.384	205.225.784	84,89%	DPMPPTSP
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	154.583.524	138.143.184	86,37%	DPMPPTSP
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	329.546.846	321.722.996	97,63%	DPMPPTSP
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	240.307.620	212.562.100	88,45%	DPMPPTSP
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			87,98%	

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, telah dilakukan analisa terhadap keberhasilan atau pendukung pencapaian sasaran, kendala serta strategi pemecahan masalah tersebut. Berikut adalah faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi pemecahan masalahnya:

Gambar 3. 22
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 2.2 “Meningkatnya investasi penanaman modal” Tahun 2024

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya kemudahan percepatan ▪ Kemudahan dalam proses perizinan ▪ Kota Cirebon sebagai transit ▪ Kota Cirebon bagian dari kawasan segitiga rebana 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaku usaha dalam penginputan tidak valid ▪ Kurangnya pengawasan terhadap perusahaan yang sudah terbit perizinannya ▪ Pelaku usaha dalam proses penginputan pengurusan perizinan berulang/<i>double</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya pengawasan terhadap pelaku usaha yang modal usahanya tidak sesuai ▪ Dilakukan pengawasan secara rutin dan berkala

Tujuan 3 : “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berwibawa”

Penyusunan tujuan dan sasaran Pembangunan jangka menengah Kota Cirebon juga memperhatikan perkembangan kondisi yang ada agar dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang responsif terhadap dinamika pembangunan yang terjadi. Selain muatan visi – misi dan arah pembangunan, isu – isu strategis menjadi salah satu pertimbangan dalam perumusan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kota Cirebon. Dengan memperhatikan visi – misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD, dapat dirumuskan tujuan RPD Kota Cirebon Tahun 2024-2026. Terdapat tiga tujuan yang ditetapkan sebagai tujuan pembangunan jangka menengah Kota Cirebon tahun perencanaan 2024-2026 salah satunya yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berwibawa”.

Tabel 3. 49
Capaian Kinerja Tujuan 3 “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berwibawa”

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi		Target Akhir RPD (2026)	Capaian Kinerja 2024
					N-1 (2023)	2024		
3.	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang berwibawa	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	74,00	-	84,13	72,50	113,69%

Tujuan “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berwibawa” diukur dengan sebuah indikator : “Indeks Reformasi Birokrasi (RB)”. Pada tahun 2023 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) telah menerbitkan PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, yang mengamanatkan upaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) harus sepenuhnya memberikan manfaat yang nyata dan berdampak secara langsung kepada masyarakat. Hal ini merupakan hasil dari evaluasi pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi sebelumnya yang memuat 8 dimensi proses yang dianggap belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat.

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) terbagi menjadi 2 (dua) yakni pelaksanaan RB General yang merupakan strategi pelaksanaan RB dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan RB Tematik yang merupakan strategi pelaksanaan RB yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda Program Pembangunan Nasional dan Daerah.

Pencapaian Indikator Tujuan “Indeks Reformasi Birokrasi

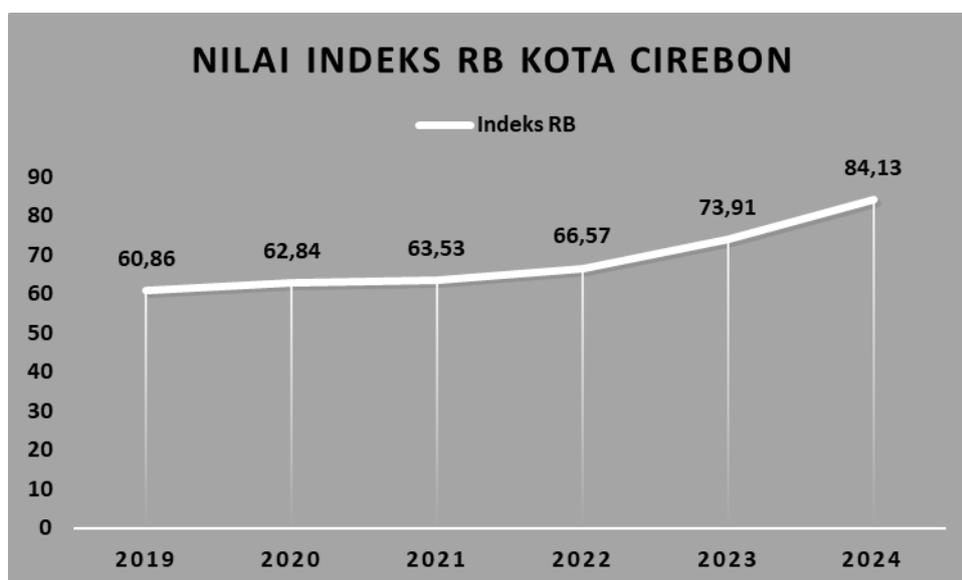
Pada Tahun 2024 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan indeks reformasi birokrasi pada poin 74. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Reformasi Birokrasi Kota Cirebon mendapatkan poin sebesar 84,13, Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 50
Rincian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Cirebon 2024

Komponen Penilaian	Bobot	2024
RB General	100,00	75,74
RB Tematik	20,00	8,39
Indeks Reformasi Birokrasi (RB General+RB Tematik)	120,00	84,13

Dengan poin Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 84,13 maka pencapaian indikator kinerja pada tahun 2024 tersebut adalah $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = \frac{84,13}{74} \times 100\% = 113,69\%$, dengan predikat pencapaian **Memuaskan**. Berikut capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Cirebon tahun 2019-2024:

Gambar 3. 23
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Cirebon tahun 2019- 2024



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Cirebon (2024)

Evaluasi Tujuan “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berwibawa”

Pencapaian indikator dari tujuan “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berwibawa”, merupakan hasil dari semangat melakukan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Kota Cirebon, dapat dilihat dari pencapaian Indeks RB tahun 2024 sebesar 84,13 dengan predikat A dari target 74 poin. Dibandingkan pencapaian Indeks RB tahun sebelumnya sebesar 73,91 dengan predikat BB, hal ini menunjukkan bahwa terdapat kenaikan poin yang cukup signifikan yakni sebesar 10,13 poin pada tahun 2024.

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, telah dilakukan analisa terhadap keberhasilan atau pendukung pencapaian tujuan, kendala serta strategi pemecahan masalah tersebut. Berikut adalah faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi pemecahan masalahnya :

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komitmen pimpinan yang tinggi terhadap reformasi birokrasi ▪ Sistem monitoring dan evaluasi yang telah diterapkan dengan baik ▪ Partisipasi aktif dari ASN dalam penerapan kebijakan ▪ Fokus pada peningkatan layanan publik yang berbasis teknologi ▪ Adanya kebijakan pendukung dari pemerintah pusat dalam implementasi RB Tematik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih terdapat resistensi dari beberapa pegawai dalam menerapkan perubahan ▪ Jenis pelatihan yang tersedia kurang dibutuhkan oleh dunia usaha ▪ Keterbatasan infrastruktur digital dan anggaran dalam mendukung transformasi layanan publik ▪ Kurangnya pemahaman masyarakat terkait layanan berbasis teknologi ▪ Hambatan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung implementasi inovasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya monitoring terhadap Perangkat Daerah ▪ Meningkatkan sosialisasi dan pelatihan bagi ASN terkait perubahan yang diterapkan ▪ Mengoptimalkan koordinasi dan sinergi antar instansi dengan mekanisme komunikasi yang lebih efektif ▪ Penguatan sistem rekrutmen dan pengembangan SDM yang berbasis kompetensi ▪ Edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan layanan berbasis teknologi melalui kampanye publik ▪ Penyesuaian regulasi yang lebih fleksibel guna mendukung inovasi pelayanan

Untuk menunjang tujuan “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berwibawa”, telah ditetapkan 5 sasaran yang sinergis, dimana setiap sasaran pengukuran, analisa dan evaluasinya akan diuraikan satu persatu secara rinci sebagai berikut :

Sasaran 3.1 “Meningkatnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik”

Tabel 3. 51

Capaian Sasaran 2.2 “Meningkatnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik” Tahun 2024

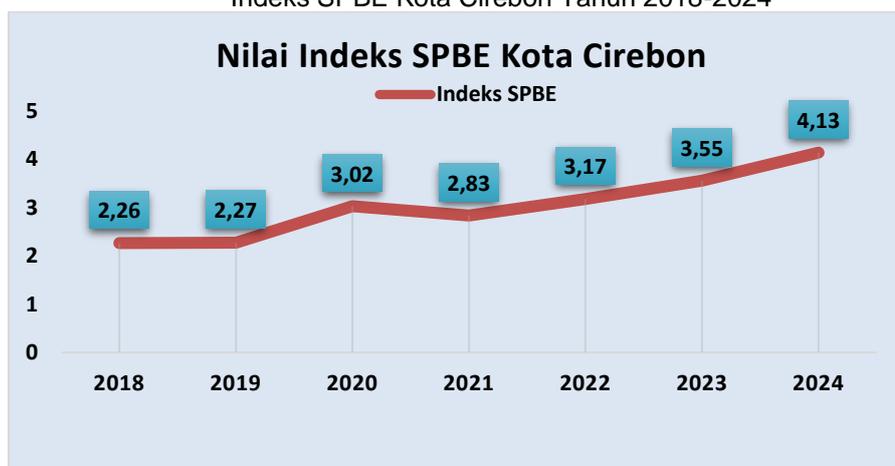
NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi		Target Akhir RPD (2026)	Capaian Kinerja 2024
					N-1 (2023)	2024		
3.1	Meningkatnya pelayanan publik berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,56	3,55	4,13	3,40	116,01%

Sasaran “Meningkatnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik” sangat relevan dijadikan sasaran karena pemerintahan berbasis elektronik atau dikenal dengan istilah *e-government* merupakan bagian dari sebuah manajemen pemerintahan di Kota Cirebon hal ini seiring untuk mendukung tujuan ke tiga dari Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berwibawa”.

Pencapaian Indikator “Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)”

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah sistem yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik. SPBE mencakup berbagai aspek, seperti *e-Government*, digitalisasi data, layanan online, serta keamanan informasi dalam administrasi pemerintahan. Pada Tahun 2024 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan nilai SPBE sebesar 3,56. Upaya penguatan nilai SPBE pada tahun 2024 berdampak positif bagi Pemerintah Daerah Kota Cirebon, berdasarkan hasil evaluasi SPBE tahun 2024 mendapat nilai 4,13. Dengan menyandingkan realisasi pada tahun 2023 dengan target maka pencapaian indikator ini adalah : $\frac{4,13}{3,56} \times 100\% = 116,01\%$ atau **Melebihi Target**.

Berikut merupakan nilai indeks (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) SPBE Kota Cirebon:

Gambar 3. 24
Indeks SPBE Kota Cirebon Tahun 2018-2024

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Kota Cirebon

Evaluasi sasaran 3.1 “Meningkatnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik”

Pencapaian sasaran “Meningkatnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik” dengan satu indikator diatas, memiliki rata – rata pencapaian 114,72% berada pada predikat **Melebihi Target**. Kendati tingkat pencapaian telah melebihi target namun hal ini menjadi tantangan pada tahun berikutnya supaya tetap dapat dipertahankan bahkan meningkat, beberapa program yang mendukung capaian Sasaran 3.1 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 52
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3.1

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian	Pelaksana
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	3.388.304.358	3.043.366.094	89,82%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	3.197.164.490	2.924.424.874	91,47%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	398.877.203	322.691.185	80,90%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	782.211.735	744.300.735	95,15%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Rata-Rata Capaian Realisasi Program Anggaran			89,34%	

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, telah dilakukan analisa terhadap keberhasilan atau pendukung pencapaian sasaran, kendala serta strategi pemecahan masalah tersebut. Berikut adalah faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi pemecahan masalahnya:

Tabel 3. 53
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran sasaran 3.1 “Meningkatnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik”

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi antar SKPD untuk mengumpulkan eviden yang ditentukan ▪ Perangkat daerah yang memanfaatkan TIK dalam menyelenggarakan layanan publik dan administrasi Pemerintahan ▪ Koordinasi antar SKPD ▪ Komitmen Pimpinan ▪ Keselarasan dengan arsitektur SPBE Nasional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurang maksimalnya program yang ada di SKPD kadangkala hanya sebatas untuk pemenuhan eviden saja ▪ Keterlambatan pengumpulan evidence dari Perangkat Daerah ▪ Evidence dari Perangkat Daerah tidak sesuai kriteria yang diharuskan ▪ Masih rendahnya kesadaran SKPD dalam penerapan manajemen SPBE 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dengan SKPD dan Tim Koordinasi SPBE untuk membuat timeline kegiatan evaluasi SPBE ▪ Perlunya komitmen pimpinan dalam menyikapi pemenuhan dokumen/evidence SPBE sesuai dengan lingkup masing – masing coordinator ▪ Penerapan manajemen SPBE secara bertahap ▪ Mempersiapkan penyusunan arsitektur SPBE

Sasaran 3.2 “Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah”

Tabel 3. 54
Capaian Sasaran 3.2 “Meningkatnya tindak lanjut hasil kelitbangan dan inovasi daerah” Tahun 2024

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi		Target Akhir RPD (2026)	Capaian Kinerja 2024
					N-1 (2023)	2024		
1.	Meningkatnya tindak lanjut hasil kelitbangan dan inovasi daerah	Persentase hasil kelitbangan yang diserahkan untuk dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dan/atau stakeholder	Persen	71,00	-	71,43	72,00	100,61%

Sasaran “Meningkatnya tindak lanjut hasil kelitbangan dan inovasi daerah” diukur melalui satu indikator berupa “Persentase hasil kelitbangan yang diserahkan untuk dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dan/atau *stakeholder*”. Indikator ini menjadi tolak ukur dalam pencapaian kinerja Tujuan ke-3 Kota Cirebon sebagaimana yang tercantum dalam RKPD Tahun 2024, yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berwibawa.”

Pencapaian Indikator “Persentase hasil kelitbangan yang diserahkan untuk dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dan/atau *stakeholder*”

Berdasarkan hasil kelitbangan yang telah dilakukan, disusun rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dalam perencanaan dan implementasi program pembangunan di Kota Cirebon. Rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan daerah, mempercepat pencapaian target pembangunan, serta memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan berbasis data dan kebutuhan aktual masyarakat. Agar rekomendasi ini memiliki dampak yang signifikan, urgensi penerapannya sebagai indikator kinerja daerah sangat penting. Dengan menjadikan hasil kelitbangan sebagai tolok ukur, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan bersifat objektif, terukur, dan berorientasi pada solusi nyata bagi tantangan yang dihadapi Kota Cirebon

Pemerintah Kota Cirebon pada tahun 2024 telah menetapkan target indikator persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti sebagai bahan kebijakan daerah sebesar 71%. Berdasarkan perhitungan BAPPELITBANGDA, realisasi indikator tersebut pada tahun 2024 mencapai 71,43%. Capaian ini telah memenuhi target yang ditetapkan, yaitu 71%. Jika dihitung berdasarkan formula kinerja, maka pencapaian indikator ini adalah $\frac{R}{T} \times 100\% = \frac{71,43}{71,00} \times 100\% = 100,61\%$ yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan.

Evaluasi sasaran 3.2 “Meningkatnya tindak lanjut hasil kelitbangan dan inovasi daerah”

Sasaran meningkatnya tindak lanjut hasil kelitbangan dan inovasi daerah pada tahun 2024 memiliki pencapaian 100,61% atau **Melebihi Target**. Hal ini ditunjang program utama yang mempengaruhi secara langsung sasaran sebagai berikut:

Tabel 3. 55
Realisasi Program Anggaran yang mendukung sasaran 3.2

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	734,721,716.00	692,327,305.00	94.23%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			94.23%

Meskipun demikian, pencapaian di tahun-tahun berikutnya akan menjadi tantangan, mengingat indikator “persentase rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil kelitbangan yang diserahkan kepada Perangkat Daerah dan/atau pemangku kepentingan” baru dimasukkan dalam RPD pada tahun 2024. Dengan belum adanya rekam jejak sebelumnya, indikator ini justru telah melampaui target akhir yang ditetapkan dalam RPD tahun 2026 sebesar 71,00%. Berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalah pada pencapaian kinerja sasaran 3.2:

Tabel 3. 56
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 3.2 “Meningkatnya Penerapan Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah”

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan tim kelitbangan yang terdiri dari akademisi dan SDM internal bidang Sudah adanya pejabat fungsional peneliti Anggaran yang tersedia yang mencukupi untuk kegiatan kelitbangan Adanya pegawai baru di bidang litbang dari PPPK 	<ul style="list-style-type: none"> Efisiensi anggaran yang menyebabkan beberapa kajian tidak dapat dilaksanakan Masih terbatasnya jumlah fungsional peneliti yang sesuai kepakaran kajian Hasil rekomendasi dari kajian belum optimal atau dijadikan bahan kegiatan usulan perencanaan Pegawai baru masih perlu beradaptasi dengan alur kerja Litbang 	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukan skala prioritas kajian yang akan dilaksanakan dan dibutuhkan oleh Perangkat Daerah Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan oleh Tim Kelitbangan dibantu oleh Fungsional Peneliti, Analis Kebijakan, dan Analis Litbang Akan dilaksanakan FGD/Rapat koordinasi yang melibatkan Perangkat Daerah, terkait hasil kegiatan pada tahun berjalan. Membantu pegawai baru untuk beradaptasi dengan baik dengan kegiatan kelitbangan

Sasaran 3.3 “Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Pemerintahan”

Tabel 3. 57

Capaian Sasaran 3.3 “Meningkatnya dukungan penyelenggaraan pemerintahan”

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi		Target Akhir RPD (2026)	Capaian Kinerja 2024
					N-1 (2023)	2024		
3.3	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	Poin	71,00	68,56	69,04	72,00	97,24%
		Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	WDP/WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	82	86,16	86,59	84,00	105,60%
		Tingkat Maturitas SPIP	Poin	3,00	3,00	3,074	3,140	102,47%
		Indeks Perencanaan Pembangunan	Poin	95,58	-	97,94	99,10	102,47%
		Indeks Profesionalitas ASN	Poin	70,00	60,42	78,75	75,00	112,5%
Capaian rata-rata kinerja Indikator								103,38%

Sasaran strategis 3.3 “Meningkatnya dukungan penyelenggaraan pemerintahan” merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan ke-3 Kota Cirebon, yakni meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berwibawa. Sasaran ini mencakup langkah-langkah dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas pemerintahan, yang mencakup optimalisasi sumber daya, kebijakan, dan layanan publik berbasis inovasi serta transparansi. Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut, ditetapkan enam indikator utama, yaitu:

1. Nilai SAKIP;
2. Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah;
3. Indeks Kepuasan Masyarakat;
4. Tingkat Maturitas SPIP;
5. Indeks Perencanaan Pembangunan;
6. Indeks Profesionalitas ASN

Keenam indikator ini juga menjadi bagian dari Indikator Kinerja Utama Kota Cirebon. Berikut adalah pencapaian masing-masing indikator tersebut.

Pencapaian indikator ke-1 Nilai SAKIP

Indikator kinerja “Nilai SAKIP” menjadi indikator pertama dalam sasaran “Meningkatnya dukungan penyelenggaraan pemerintahan.” Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Cirebon memperoleh nilai 69,04, yang masuk dalam kategori capaian sangat tinggi. Sebagai perwujudan atas akuntabilitas kinerja yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon, telah dirilis pada bulan oktober tahun 2024 Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2024. Hasil penilaian evaluasi tersebut jika dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya secara umum adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 58
Perbandingan Nilai Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 dan Tahun 2024

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
a. Perencanaan Kinerja	30	23,98	24,01
b. Pengukuran Kinerja	30	17,88	18,01
c. Pelaporan Kinerja	15	10,27	10,37
d. Evaluasi Kinerja	25	16,43	16,62
Nilai Hasil Evaluasi	100	68,56	69,04
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Sumber: LHE Atas Implementasi SAKIP pada Pemerintah Kota Cirebon 2024.

Berdasarkan data diatas, tingkat akuntabilitas Pemerintah Kota Cirebon pada tahun 2024 mencapai nilai 69,04, meningkat sebesar 0,48 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatatkan nilai 68,56. Capaian ini memperoleh predikat B (Baik), yang menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Cirebon sudah berada pada level baik dengan sistem yang mendukung manajemen kinerja, meskipun masih memerlukan beberapa perbaikan. Nilai SAKIP Kota Cirebon berada di atas rata-rata nilai SAKIP pemkab/pemkot tahun 2024 nasional sebesar 64,23. Implementasi SAKIP yang optimal membuat anggaran dan perencanaan berjalan selaras.

SAKIP juga dapat mendorong pencapaian pembangunan melalui perencanaan, anggaran, dan kinerja yang selaras dan tepat. Setidaknya dalam kurun waktu lima tahun terakhir, SAKIP memberi kontribusi terhadap akselerasi agenda pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan. SAKIP memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus berdampak bagi masyarakat. Salah satu faktor utama yang mendorong pencapaian ini adalah penerapan konsep manajemen kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon. Sebagai bentuk dukungan terhadap konsep tersebut, sistem informasi E-SAKIP Kota Cirebon juga telah dikembangkan dan disempurnakan.

Gambar 3. 25
Halaman dashboard sistem informasi E-SAKIP Kota Cirebon



Melalui laman <https://esakip.cirebonkota.go.id/>, sistem SAKIP dapat diakses secara rinci untuk setiap komponennya, memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi sebagai bentuk transparansi kinerja instansi pemerintah. Selain itu, tersedia pula tiga buku saku yang berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon, yaitu:

1. BUKU SAKTI (Buku Saku Sistem Akuntabilitas Kinerja Terintegrasi)
2. BUKTI PRESTASI (Buku Sakti Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Terintegrasi)
3. PINTAR BER-AKHLAK (Pedoman Instruksi Penerapan Budaya Kerja Ber-AKHLAK)

Nilai SAKIP Kota Cirebon berada di atas rata-rata nilai SAKIP pemkab/pemkot tahun 2024 nasional sebesar 64,23 dengan selisih 4,81. Implementasi SAKIP yang

optimal membuat anggaran dan perencanaan berjalan selaras. SAKIP juga dapat mendorong pencapaian pembangunan melalui perencanaan, anggaran, dan kinerja yang selaras dan tepat. Setidaknya dalam kurun waktu lima tahun terakhir, SAKIP memberi kontribusi terhadap akselerasi agenda pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan. SAKIP memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus berdampak bagi masyarakat.

Pencapaian indikator ke-2 “Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah”

Pada Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan opini BPK dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penilaian atas capaian WTP menggunakan data dari tahun sebelumnya (tahun n-1), karena hasil pemeriksaan BPK selalu mengoreksi laporan tahun sebelumnya. Dengan demikian, data pencapaian tahun 2024 mengacu pada hasil pemeriksaan tahun 2023. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Pemerintah Daerah Kota Cirebon berhasil mempertahankan opini WTP.

Merujuk pada target yang telah ditetapkan maka Pemerintah Daerah Kota Cirebon berhasil mencapai realisasi 100% dan kembali meraih opini WTP dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023. Prestasi ini menandai keberhasilan Kota Cirebon dalam memperoleh opini WTP untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2016. Berikut adalah dokumentasi Penerimaan Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Cirebon, Agus Mulyadi:

Gambar 3. 26
Pemerintah Kota Cirebon meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
ke-8 kali secara berturut-turut



Sumber: <https://cireboners.id/>

Pencapaian indikator ke-3 “Indeks Kepuasan Masyarakat”

Pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon pada tahun 2024 secara umum menunjukkan kualitas yang baik. Hal ini tercermin dari nilai rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 86,59, yang masuk dalam kategori B (Baik), dengan total responden sebanyak 9.771 orang. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga berhasil melampaui target yang ditetapkan, dengan capaian kinerja sebesar $\frac{R}{T} \times 100\% = \frac{86,59}{82,00} \times 100\% = 105,60\%$ atau **Melebihi Target**.

Tren pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara kepada masyarakat, serta kinerja penyelenggara pelayanan publik, menunjukkan tingkat kepuasan yang terus meningkat. Grafik berikut menggambarkan perkembangan tren kepuasan penerima layanan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

Gambar 3. 27
Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Cirebon Tahun 2019-2024



Sumber: Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Kota Cirebon Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2019 hingga 2024 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

Pencapaian indikator ke-4 “Tingkat Maturitas SPIP”

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2024, yang disusun sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI), menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Cirebon telah memenuhi karakteristik Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan

Manajemen Risiko Indeks pada **Level 3 (Terdefinisi)**. Penilaian ini sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D), yang mengindikasikan bahwa organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik serta strategi pencapaian kinerja telah relevan dan terintegrasi. Rincian nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Kota Cirebon dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. 59
Hasil Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada
Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2024

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor	Nilai
Penetapan Tujuan			
Kualitas Sasaran Strategis	50,00%	3	1,500
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50,00%	3	1,500
Sub Jumlah Penetapan Tujuan	100.00%		3,000
Bobot Penetapan Tujuan	40.00%		1,200
Struktur dan Proses			
Lingkungan Pengendalian	30.00%	3,000	0,900
Penilaian Risiko	20.00%	2,979	0,596
Kegiatan Pengendalian	25.00%	3,000	0,750
Informasi dan Komunikasi	10.00%	3,000	0,300
Pemantauan	15.00%	3,000	0,450
Sub Jumlah Struktur dan Proses	100.00%		2,996
Bobot Struktur dan Proses	30.00%		0,899
Pencapaian Tujuan			
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi			
Capaian Outcome	20.00%	3	0,600
Capaian Output	10.000/0	3	0,300
Keandalan Pelaporan Keuangan			
Opini Laporan Keuangan	25.00%	4	1,000
Pengamanan atas Aset Negara			
Catatan Pengamanan Aset	25.00%	3	0,750
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan			
Temuan Ketaatan — BPK	20.00%	3	0,600
Sub Jumlah Pencapaian Tujuan	100.00%		3,250
Bobot Pencapaian Tujuan	30.00%		0,975
Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP			3,074

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2024

Merujuk pada tabel di atas Capaian Tingkat Maturitas SPIP Kota Cirebon tahun 2024 yang memperoleh nilai 3.074 menunjukkan kualitas organisasi yang mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik serta strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi. Dengan pencapaian tersebut Pemerintah Kota Cirebon berhasil melampaui target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja $\frac{R}{T} \times 100\% = \frac{3,074}{3} \times 100\% = 102,47\%$ atau **Melebihi Target**. Pencapaian ini merupakan hasil kerjasama berbagai pihak, mulai dari Tim SPIP dari Inspektorat, para Perangkat Daerah Kota Cirebon yang menjadi sample penilaian, dan Tim Penilai dari BPKP yang membantu proses pengumpulan data hingga akhir.

Pencapaian indikator ke-5 “Indeks Perencanaan Pembangunan”

Capaian Indeks Perencanaan Pembangunan Kota Cirebon pada tahun 2024 sebesar 97,94 mencerminkan kualitas perencanaan pembangunan yang baik. Dengan pencapaian ini, Pemerintah Kota Cirebon berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, dengan capaian kinerja sebesar $\frac{R}{T} \times 100\% = \frac{97,94}{95,58} \times 100\% = 102,47\%$ atau **Melebihi Target**.

Keberhasilan ini didukung oleh regulasi yang menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan, seperti Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur penyusunan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, peran bidang perencanaan yang memiliki mitra perencanaan turut berkontribusi dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan secara lebih terarah dan terkoordinasi. Ketersediaan dokumen pendukung, seperti RPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta dokumen lainnya, menjadi faktor penting dalam memastikan perencanaan dan implementasi program pembangunan sesuai target. Capaian ini mencerminkan efektivitas dan kualitas penyusunan perencanaan pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon serta menjadi tolok ukur untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas perencanaan di tahun-tahun mendatang.

Pencapaian indikator ke-6 “Indeks Profesionalitas ASN”

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN) merupakan indikator statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas jabatan. Di Kota Cirebon, pengukuran ini menjadi instrumen penting dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur guna memastikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Pada tahun 2024, capaian Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon mencapai **78,75 poin**. Nilai ini melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu 70,00, dengan capaian kinerja sebesar $\frac{R}{T} \times 100\% = \frac{78,75}{70,00} \times 100\% = 112,50\%$. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas ASN, terutama dalam aspek kualifikasi pendidikan dan kompetensi. Pemerintah Kota Cirebon, melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), telah mengembangkan sistem kepegawaian yang terintegrasi serta melakukan transformasi layanan kepegawaian berbasis digital. Salah satu faktor utama dalam peningkatan profesionalitas ASN adalah penggunaan aplikasi **Dolan Bae (Dokumentasi Pelatihan Berbasis Elektronik)**, yang memungkinkan ASN untuk mengakses dan mendokumentasikan pelatihan secara sistematis dan berbasis digital.

Gambar 3. 28

Dashboard Aplikasi DOLANBAE

NO	PELATIHAN	JENIS	PENYELENGGARA	TGL. PELATIHAN	DURASI	STATUS	AKSI
1.	Perilaku Hidup Sehat Dalam Menunjang Peningkatan Kinerja ASN	Seminar	BPSDM Prov. Kalbar	25-09-2024 s.d 25-09-2024	5 JP	LULUS	
3.	Evaluasi atas Implementasi SAKIP	Pelatihan Teknis	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN	21-10-2024 s.d 25-10-2024	50 JP	LULUS	

Sumber: <https://dianter-bkpsdm.cirebonkota.go.id/>

Meskipun terdapat peningkatan dalam profesionalitas ASN, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, yang belum terpusat sepenuhnya di BKPSDM. Beberapa perangkat daerah masih menyelenggarakan pelatihan secara mandiri, sehingga terjadi ketidaksinkronan dalam pengembangan kompetensi ASN secara menyeluruh.

Sebagai strategi pemecahan masalah, Pemerintah Kota Cirebon melalui BKPSDM berupaya mencari alternatif pembiayaan melalui program pendidikan dan

pelatihan tanpa biaya, baik melalui kerja sama dengan instansi pemerintah pusat, lembaga pelatihan, maupun *platform* pembelajaran daring. Dengan strategi ini, diharapkan seluruh ASN Kota Cirebon dapat memperoleh kesempatan yang setara dalam peningkatan kompetensi, sehingga berdampak pada peningkatan Indeks Profesionalitas ASN di masa mendatang.

Evaluasi Sasaran 3.3 “Meningkatnya dukungan penyelenggaraan pemerintahan”

Tren positif dalam pencapaian sasaran pembangunan terlihat dari enam indikator yang terus meningkat dari tahun ke tahun atau telah mencapai nilai maksimal. Hal ini menjadi bukti bahwa setiap tahun dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kota Cirebon semakin baik. Peningkatan ini didukung oleh berbagai program utama yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian sasaran sebagai berikut:

Tabel 3. 60
Capaian Realisasi Anggaran Program Pendukung Capaian Sasaran 3.3
“Meningkatnya dukungan penyelenggaraan pemerintahan”

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	556,719,728.00	398,288,297.00	71.542%
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	740301000	588162819	79.449%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	298,196,746.00	277,251,436.00	92.976%
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	7,901,721,732.00	7,259,924,595.00	91.878%
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1,679,210,908.00	1,562,801,526.00	93.068%
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3,260,300,192.00	2,725,397,425.00	83.593%
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	10,805,734,464.00	7,818,941,694.00	72.359%
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1,870,641,278.00	1,489,289,712.00	79.614%
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1,716,327,613.00	1,599,075,413.00	93.168%
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	442,281,330.00	384,097,955.00	86.845%
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	118,664,572.00	88,949,722.00	74.959%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			83,586%

Meskipun demikian, mempertahankan dan meningkatkan capaian di tahun-tahun mendatang menjadi tantangan tersendiri. Pada tahun 2024, rata-rata pencapaian indikator dari sasaran 3.3, yaitu "Meningkatnya dukungan penyelenggaraan pemerintahan," mencapai 102,97%. Untuk menjaga dan meningkatkan capaian ini, diperlukan identifikasi faktor pendorong, faktor penghambat, serta strategi penyelesaian permasalahan yang efektif sebagai berikut:

Tabel 3. 61
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 3.3 "Meningkatnya dukungan penyelenggaraan pemerintahan"

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Indikator 1 Nilai SAKIP		
<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan penyempurnaan sistem informasi E-SAKIP Kota Cirebon telah mempermudah pemantauan dan evaluasi kinerja secara lebih efektif. • Penerapan manajemen kinerja terintegrasi sesuai Perwali No. 15 Tahun 2016. • Komitmen pimpinan daerah mendorong transparansi dan akuntabilitas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator kinerja di beberapa perangkat daerah belum sepenuhnya berorientasi hasil. • Evaluasi internal masih perlu diperkuat untuk peningkatan kualitas kinerja. • Tindak lanjut rekomendasi evaluasi sebelumnya belum optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyempurnakan perencanaan kinerja dengan memperjelas indikator serta memastikan keselarasan antara sasaran strategis dan capaian kinerja. • Memperkuat evaluasi internal dengan inspektorat dan sistem berbasis data. • Melakukan monitoring ketat terhadap tindak lanjut rekomendasi evaluasi sebelumnya serta menjadikannya sebagai bagian dari target kinerja perangkat daerah.
Indikator 2 Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah		
<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan dengan baik • SDM yang sesuai dengan kompetensi • Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> • SDM yang tidak sesuai kompetensi • Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) • Ketidapatuhan Pemerintah Daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Memaksimalkan SDM yang ada baik kuantitas maupun kualitas; • Membuat pola desk dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD yang merupakan tahapan yang tidak terpisahkan dari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD); • Komunikasi dan koordinasi dengan Inspektorat khususnya Tim Reviu LKPD;

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian tindaklanjut atas rekomendasi BPK 	<ul style="list-style-type: none"> • Tindaklanjut atas rekomendasi BPK 	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi dan koordinasi dengan SKPD dan BUMD; dan • Komunikasi dan koordinasi dengan Pemda lain terkait isu dan perkembangan pengelolaan keuangan daerah khususnya aspek akuntansi dan pelaporan.
Indikator 3 Indeks Kepuasan Masyarakat		
<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Permenpan 14/2017 dan PERWAL Kota Cirebon 48/2023 yang memberikan standar penilaian pelayanan publik yang jelas dan terstruktur. • Adanya platform SUKMA di Kota Cirebon memudahkan survei dan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara efisien. • Kehadiran tim akselerasi pelayanan publik membantu meningkatkan kualitas pelayanan di berbagai sektor. • Partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan umpan balik terhadap layanan yang diterima mendukung evaluasi dan perbaikan layanan secara berkelanjutan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum semua perangkat daerah menggunakan aplikasi survei digital, sehingga masih ada yang mengandalkan metode manual atau pihak ketiga. • Terdapat perbedaan standar penilaian antara Permenpan RB yang menggunakan 9 unsur dan MCP KPK yang mengacu pada 11 unsur, sehingga diperlukan penyesuaian. • Keterbatasan anggaran menyebabkan alokasi dana untuk pengembangan sistem survei, pelatihan SDM, dan peningkatan fasilitas pelayanan masih belum optimal. • Koordinasi perangkat daerah dalam pengumpulan data dan tindak lanjut hasil survei masih lemah, sehingga proses evaluasi dan perbaikan layanan menjadi kurang efektif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan adopsi teknologi dengan mendorong seluruh perangkat daerah untuk menggunakan platform survei digital yang terintegrasi guna meningkatkan efisiensi dan akurasi data. • Penyelarasan standar penilaian dengan menyesuaikan sistem IKM menggunakan 11 unsur yang direkomendasikan MCP KPK mulai tahun 2025 agar lebih akuntabel. • Penguatan koordinasi dan evaluasi berkala dengan membentuk tim pengelola IKM yang aktif dalam mengoordinasikan pengumpulan, analisis, dan tindak lanjut hasil survei.

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Indikator 4 Tingkat Maturitas SPIP		
<ul style="list-style-type: none"> • Terjaganya komitmen perangkat daerah yang memiliki keterkaitan data-data SPIP meningkat • Peraturan Perundang-undangan • Ketersediaan Aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran • Kurangnya Koordinasi dalam Pemenuhan Dokumen Evidence yang lambat • Aplikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya 	<ul style="list-style-type: none"> • Menambah Anggaran di Perubahan • Melakukan Koordinasi dan Pendampingan dalam pemenuhan Evidence SPIP • Melakukan koordinasi dengan BPKP terkait Aplikasi SPIP apabila mendapatkan kendala
Indikator 5 Indeks Perencanaan Pembangunan		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya aturan yang melandasi (misal Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) 2. Adanya bidang perencanaan yang memiliki mitra perencanaan 3. Ketersediaan Dokumen pendukung (RPD, RKPD, maupun dokumen lainnya) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum baiknya koordinasi antara bidang perencanaan dengan mitra perencanaan 2. Adanya indikator sasaran yang baru sehingga tidak memiliki data awal 3. Adanya beberapa perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan perencanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu ditingkatkan komunikasi antar bidang perencanaan dengan mitra perencanaan 2. Data terkait program dan kegiatan tiap perangkat daerah langsung disampaikan 3. Melakukan penjadwalan ulang terkait kegiatan perencanaan yang berubah
Indikator 6 Indeks Profesionalitas ASN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Daya Manusia 2. Peraturan Perundang-undangan 3. Ketersediaan aplikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran 2. Kesadaran ASN dalam melengkapi data masih kurang terutama untuk pengembangan kompetensi 3. Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan belum satu pintu di BKPSDM masih adanya pelatihan yang dilaksanakan PD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencari alternatif pembiayaan melalui Pendidikan dan pelatihan yang tidak berbayar 2. Koordinasi dan sosialisasi terkait input kelengkapan data 3. Membuat surat edaran terkait penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang dilakukan PD dihimbau dapat mengeluarkan sertifikasi yang ditandatangani oleh kepala PD dan di upload ke aplikasi DOLAN BAE

Sasaran 3.4 “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kewilayahan dan Pemberdayaan Masyarakat”

Tabel 3. 62
Capaian Sasaran 3.4 “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kewilayahan dan Pemberdayaan Masyarakat” Tahun 2024

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi		Target Akhir RPD 2026	Capaian Kinerja 2024
					N-1 (2023)	2024		
3.4	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kewilayahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Kelurahan Cepat Berkembang	Persen	90,91	86,36	90,91	90,91	100%
		Persentase Kelurahan Swasembada	Persen	40,91	40,91	59,09	40,91	144,44%
	Capaian rata-rata kinerja Indikator							122,22%

Sasaran Strategis 3.4 “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kewilayahan dan Pemberdayaan Masyarakat” merupakan bagian dari upaya mendukung Tujuan Ketiga Kota Cirebon, yakni meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berwibawa dalam aspek kesejahteraan masyarakat. Sasaran ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah dengan sejumlah indikator, beberapa di antaranya merupakan sub-indikator yang membangun indikator utama lainnya. Sub-indikator tersebut berada pada tingkat kelurahan, sehingga dalam uraian Laporan Kinerja ini akan dijelaskan indikator pada tingkat kota sebagai bentuk rekapitulasi dari indikator yang tercantum di 22 kelurahan. Berikut adalah indikator tersebut:

1. Persentase Kelurahan Cepat Berkembang
2. Persentase Kelurahan Swasembada

Pencapaian Indikator ke-1 “Persentase Kelurahan Cepat Berkembang”

Tabel 3. 63
Klasifikasi Tingkat Perkembangan Kelurahan pada Setiap Kecamatan

No	Kecamatan	Tingkat Perkembangan	
		Cepat Berkembang	Berkembang
1.	Kejaksan	4	-
2.	Lemahwungkuk	4	-
3.	Harjamukti	3	2
4.	Pekalipan	4	-
5.	Kesambi	5	-
Jumlah		20	2

Sumber: Laman <https://epdeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/> s/d tanggal 03 Januari 2025 (diolah)

Berdasarkan hasil pada Sistem Aplikasi Prodeskel (Profil Desa/Kelurahan), jumlah total kelurahan yang termasuk dalam kategori "Cepat Berkembang" di Kota Cirebon adalah 20 kelurahan dari total 22 kelurahan. Dengan demikian, pada tahun 2024, Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang menargetkan persentase kelurahan cepat berkembang sebesar 90,91 persen telah mencapai target dengan capaian 100%.

Distribusi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pesat kelurahan tidak hanya terkonsentrasi pada satu wilayah, melainkan merata di seluruh Kota Cirebon. Pemerataan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam mengimplementasikan program pembangunan yang inklusif di berbagai sektor. Namun, Pemerintah Kota Cirebon masih dapat meningkatkan perhatian terhadap kelurahan yang belum mencapai kategori cepat berkembang dengan memberikan intervensi berupa peningkatan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.

Pencapaian Indikator ke-2

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap kelurahan diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Salah satunya adalah "Swasembada," yang mencerminkan tingkat kemandirian tinggi dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Berikut adalah tabel distribusi terkait perkembangan kelurahan dalam kategori ini:

Tabel 3. 64

Klasifikasi Swakarya / Swasembada pada Setiap Kelurahan Kota Cirebon

NO	KELURAHAN	INDEKS	KLASIFIKASI
1.	ARGASUNYA	0,67	SWAKARYA
2.	KALIJAGA	0,77	SWAKARYA
3.	HARJAMUKTI	0,77	SWAKARYA
4.	KECAPI	0,74	SWAKARYA
5.	LARANGAN	0,84	SWASEMBADA
6.	PEGAMBIRAN	0,80	SWASEMBADA
7.	KESEPUHAN	0,83	SWASEMBADA
8.	LEMAHWUNGKUK	0,81	SWASEMBADA
9.	PANJUNAN	0,81	SWASEMBADA
10.	JAGASATRU	0,81	SWASEMBADA
11.	PULASAREN	0,80	SWASEMBADA
12.	PEKALIPAN	0,87	SWASEMBADA
13.	PEKALANGAN	0,77	SWAKARYA
14.	KARYAMULYA	0,73	SWAKARYA

15.	SUNYARAGI	0,82	SWASEMBADA
16.	DRAJAT	0,84	SWASEMBADA
17.	KESAMBI	0,82	SWASEMBADA
18.	PEKIRINGAN	0,80	SWASEMBADA
19.	KEJAKSAN	0,82	SWASEMBADA
20.	KEBONBARU	0,78	SWAKARYA
21.	SUKAPURA	0,72	SWAKARYA
22.	KESENDEN	0,73	SWAKARYA
Indeks Rerata		0,79	

Sumber: Laman <https://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/> (2024) data diolah

Berdasarkan data pada Sistem Aplikasi Prodeskel (Profil Desa/Kelurahan), jumlah kelurahan dengan status Swasembada adalah 13 kelurahan, sedangkan Swakarya berjumlah 9 kelurahan. Dengan demikian, persentase Kelurahan Swasembada di Kota Cirebon sebesar 59,09%. Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Cirebon telah menetapkan target indikator persentase Kelurahan Swasembada sebesar 40,91%. Jika dihitung menggunakan rumus capaian kinerja: $\frac{R}{T} \times 100\% = \frac{59,09}{40,91} \times 100\% = 144,44\%$. Maka capaian ini dikategorikan sebagai "Melebihi Target."

Evaluasi Sasaran 3.4 "Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kewilayahan dan Pemberdayaan Masyarakat"

Tingkat pencapaian terhadap sasaran yang ditunjukkan oleh capaian dua indikator pada tahun 2024 cukup signifikan, dengan rata-rata predikat "**Melebihi Target**" sebesar 122,22%. Dalam rangka mendukung kinerja pada sasaran ini, terdapat beberapa program yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian target sebagai berikut:

Tabel 3. 65

Capaian Realisasi Anggaran Program pendukung sasaran 3.4 "Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kewilayahan dan Pemberdayaan Masyarakat"

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
Program Administrasi Pemerintahan Desa	89,999,425.00	16,330,000.00	18.145%
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1,264,526,501.00	1,088,320,123.00	86.065%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan (Kecamatan)	242,135,000.00	195,029,300.00	80.546%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			61.585%

Meskipun capaian indikator menunjukkan hasil yang sangat baik, pencapaian di tahun-tahun berikutnya menjadi tantangan tersendiri. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024, rata-rata capaian indikator dari Sasaran 3.4 "Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kewilayahan dan Pemberdayaan Masyarakat" telah melampaui target akhir yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2026. Oleh karena itu, evaluasi lebih lanjut perlu dilakukan dalam penentuan target pada tahun-tahun mendatang. Berikut adalah faktor pendorong, faktor penghambat, dan strategi pemecahan masalah yang dapat diterapkan:

Tabel 3. 66

Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 3.4 "Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kewilayahan dan Pemberdayaan Masyarakat"

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Indikator 1 Persentase Kelurahan Cepat Berkembang		
Adanya komitmen dari Pimpinan dan Stakeholder terkait untuk memenuhi data yang dibutuhkan dalam EPDESKEKEL.	Adanya operator EPDESKEKEL Kelurahan yang beralih tugas ke Perangkat Daerah lain.	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pembinaan operator baru dan desk pendampingan pengisian data EPDESKEKEL. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan lokal.
Indikator 2 Persentase Kelurahan Swasembada		
Adanya komitmen dari Pimpinan dan Stakeholder terkait untuk memenuhi data yang dibutuhkan dalam PRODESKEKEL.	Adanya operator PRODESKEKEL Kelurahan yang beralih tugas ke Perangkat Daerah lain.	Melakukan pembinaan operator baru dan desk pendampingan pengisian data PRODESKEKEL.

Sasaran 3.5 “Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Stabilitas Politik Daerah”

Tabel 3. 67

Capaian Sasaran 3.5 “Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Stabilitas Politik Daerah” Tahun 2024

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi		Target Akhir RPD	Capaian Kinerja 2024
					N-1 (2023)	2024	2026	
3.5	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Stabilitas Politik Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,50	-	0,77	0,52	154%
		Jumlah Daerah Rawan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Lokasi	12	25	12	8	100%
		Kejadian Konflik Kebangsaan, Nasionalisme dan Antar Umat Beragama	Kasus	0	0	0	0	100%
Capaian rata-rata kinerja Indikator								118%

Sasaran “Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Stabilitas Politik Daerah” merupakan bagian dari upaya mendukung tujuan Kota Cirebon dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berwibawa. Sasaran ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah dengan sejumlah indikator sebagai berikut:

1. Indeks Ketahanan Daerah;
2. Jumlah Daerah Rawan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
3. Kejadian Konflik Kebangsaan, Nasionalisme dan Antar Umat Beragama.

Pencapaian Indikator ke-1 “Indeks Ketahanan Daerah”

Pada tahun 2024, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah melakukan pengecekan terhadap penginputan data Indeks Ketahanan Daerah (IKD) untuk penilaian Indeks Risiko Bencana (IRB) di tingkat kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat. Data ini digunakan untuk menilai sejauh

mana daerah mampu menghadapi dan mengelola risiko bencana dengan baik. Berikut adalah status pengumpulan IKD 2024 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat:

Tabel 3.5.
Status Pengumpulan IKD 2024 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat

KABUPATEN/ KOTA	KETERANGAN	IKD PENGAJUAN	IKD REVIEW
Bogor	Belum Mengumpulkan	-	-
Sukabumi	Mengumpulkan	0,52	0,51
Cianjur	Mengumpulkan	0,80	0,68
Bandung	Mengumpulkan	0,70	0,68
Garut	Belum Mengumpulkan	-	-
Tasikmalaya	Mengumpulkan	0,78	0,64
Ciamis	Mengumpulkan	0,71	0,69
Kuningan	Mengumpulkan	0,65	0,68
Cirebon	Mengumpulkan	0,55	0,55
Majalengka	Mengumpulkan	0,69	0,66
Sumedang	Belum Mengumpulkan	-	-
Indramayu	Mengumpulkan	0,86	0,80
Subang	Mengumpulkan	0,56	0,51
Purwakarta	Mengumpulkan	0,59	0,54
Karawang	Mengumpulkan	0,54	0,48
Bekasi	Mengumpulkan	0,69	0,65
Bandung Barat	Mengumpulkan	0,49	0,49
Pangandaran	Mengumpulkan	0,76	0,70
Kota Bogor	Mengumpulkan	0,80	0,76
Kota Sukabumi	Mengumpulkan	0,63	0,60
Kota Bandung	Mengumpulkan	0,63	0,62
Kota Cirebon	Mengumpulkan	0,79	0,75
Kota Bekasi	Belum Mengumpulkan	-	-
Kota Depok	Mengumpulkan	0,66	0,62
Kota Cimahi	Mengumpulkan	0,78	0,78
Kota Tasikmalaya	Mengumpulkan	0,60	0,52
Kota Banjar	Mengumpulkan	0,58	0,58

Sumber: Surat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor: B-/BNPB/D-I/SS.01.03/12/2024

Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan Indeks Ketahanan Daerah sebesar **0,50 poin** pada tahun 2024. Berdasarkan hasil review data IKD 2024 yang dilakukan oleh BNPB, Kota Cirebon memperoleh nilai **0,75 poin**, menempati peringkat ke-4 dari 27 kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024, maka capaian indikator Indeks Ketahanan Daerah dapat dihitung sebagai berikut: $\frac{R}{T} \times 100\% = \frac{0,75}{0,50} \times 100\% = 150\%$. Dengan demikian, capaian indikator ini masuk dalam kategori "**Melebihi Target**", menunjukkan peningkatan signifikan dalam ketahanan daerah terhadap risiko bencana.

Pencapaian Indikator ke-2 “Jumlah Daerah Rawan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum”

Ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum) merupakan aspek penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Cirebon dalam menjaga ketertiban adalah peredaran minuman beralkohol (Mihol) di beberapa titik rawan. Berdasarkan hasil pemetaan, terdapat 52 titik rawan Trantibum yang mencakup berbagai permasalahan, seperti asusila, keberadaan pengemis, gelandangan, orang terlantar (PGOT), serta peredaran minuman beralkohol. Namun, dalam indikator ini, fokus utama adalah peredaran minuman beralkohol, karena dikategorikan sebagai gangguan dengan tingkat kerawanan tinggi. Untuk mengklasifikasikan tingkat kerawanan, digunakan kategori berikut:

1. Tinggi: Lokasi dengan tingkat gangguan sangat tinggi, memerlukan pengawasan dan intervensi segera.
2. Sedang: Lokasi dengan gangguan moderat, tetap memerlukan tindakan pencegahan agar tidak memburuk.
3. Rendah: Lokasi yang relatif aman, tetapi tetap perlu pemantauan untuk mencegah peningkatan kerawanan.

Sebagai bentuk intervensi, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama stakeholder terkait telah melakukan berbagai langkah strategis untuk menekan jumlah daerah rawan peredaran minuman beralkohol di Kota Cirebon.

Tabel 3. 68

Jumlah daerah rawan peredaran minuman beralkohol di Kota Cirebon

NO	TITIK RAWAN	Kelurahan	KETERANGAN	Jumlah
1	JL. Ahmad Yani (By Pas)	Kelurahan Harjamukti, Kelurahan Larangan, Kelurahan Pegambiran	Minuman Beralkohol	7
2	Jl. Majasem	Kelurahan Karayamulya	Minuman Beralkohol	1
3	Jl. Benteng	Kelurahan Panjunan	Minuman Beralkohol	1
4	Jl. Sisinga mangaraja	Kelurahan Panjunan	Minuman Beralkohol	1
5	Jl. Jagasatru GG. Kohar	Kelurahan Jagasatru	Minuman Beralkohol	2
6.	Jl. Cipto (kawasan CSB)	Kelurahan Pekiringan	Minuman Beralkohol	1
7	Jl. Cipto (Amare)	Kelurahan Pekiringan	Minuman Beralkohol	1
8	Jl. Kartini	Kelurahan Sukapura	Minuman Beralkohol	1
Jumlah				12

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja (2024)

Capaian kinerja dalam pengurangan titik rawan gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat (Trantibum) di Kota Cirebon menunjukkan hasil yang sangat positif. Pada tahun 2023, jumlah titik rawan Trantibum tercatat sebanyak 25 lokasi. Namun, dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, jumlah ini berhasil ditekan menjadi 12 titik pada tahun 2024. Angka tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu 12 titik rawan, sehingga capaian kinerja indikator ini mencapai 100 persen.

Keberhasilan ini merupakan hasil dari langkah-langkah strategis yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Cirebon bersama dengan Satpol PP dan berbagai pihak terkait. Operasi penertiban yang dilakukan secara berkala, pemberlakuan sanksi terhadap pelanggar ketertiban umum, serta sosialisasi kepada masyarakat

mengenai pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan telah berkontribusi dalam menekan angka gangguan Trantibum di daerah rawan. Selain itu, koordinasi yang intensif dengan aparat penegak hukum dan instansi lainnya semakin memperkuat efektivitas pengawasan terhadap potensi gangguan ketertiban.

Pencapaian Indikator ke-3 “Kejadian Konflik Kebangsaan, Nasionalisme dan Antar Umat Beragama”

Pada tahun 2024, Pemerintah Daerah Kota Cirebon menetapkan target **nol kasus** untuk kejadian konflik kebangsaan, nasionalisme, dan antar umat beragama. Target ini cukup tinggi mengingat potensi konflik di Kota Cirebon tidaklah rendah akibat heterogenitas komposisi demografi masyarakatnya. Selain itu, tahun 2024 merupakan tahun politik yang meningkatkan potensi ketegangan sosial, baik akibat perbedaan preferensi politik maupun penyebaran isu-isu sensitif yang dapat memicu konflik.

Meskipun demikian, berdasarkan data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Cirebon, tidak terdapat satu pun kasus konflik kebangsaan, nasionalisme, maupun antar umat beragama yang tercatat sepanjang tahun 2024. Hal ini menunjukkan keberhasilan strategi pencegahan konflik yang diterapkan pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas sosial. Dengan demikian, pencapaian indikator ini mencapai 100%, dengan predikat **"Mencapai Target"**.

Keberhasilan menjaga stabilitas sosial dalam tahun politik ini tidak lepas dari peran aktif berbagai mitra Bakesbangpol Kota Cirebon dalam penyelenggaraan Pilkada. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) menjadi garda terdepan dalam mengawal harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakat. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah doa bersama dan deklarasi damai, yang menghadirkan tokoh lintas agama sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemilihan berlangsung.

Gambar 3. 29 Doa Bersama dan Deklarasi Damai,
Kota Cirebon Komitmen Jaga Pilkada yang Aman dan Kondusif



Sumber: <https://cirebonkota.go.id/>

Kegiatan ini mencerminkan sinergi antara pemerintah daerah dan unsur masyarakat dalam mencegah potensi konflik yang dapat timbul akibat perbedaan pilihan politik.

Selain membangun kesadaran kolektif melalui pendekatan keagamaan, Kesbangpol bersama mitranya juga aktif dalam koordinasi dengan KPU, Bawaslu, serta aparat keamanan guna memastikan seluruh tahapan Pilkada berjalan kondusif. Upaya ini mencakup pengawasan terhadap penyebaran isu-isu sensitif, pemetaan potensi kerawanan, serta penertiban alat peraga kampanye (APK) yang berpotensi menimbulkan gesekan. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, Kota Cirebon berhasil melewati tahun politik tanpa adanya kasus konflik kebangsaan, nasionalisme, maupun antar umat beragama, menunjukkan efektivitas strategi mitigasi yang telah diterapkan.

Evaluasi Sasaran 3.5 “Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Stabilitas Politik Daerah”

Tingkat pencapaian terhadap sasaran yang ditunjukkan dengan tingkat capaian 3 indikator pada tahun 2024 cukup signifikan dengan rata-rata predikat **Melebihi Target** sebesar (118%). Dalam rangka mendukung kinerja pada sasaran ini terdapat beberapa program yang mendukung langsung terhadap pencapaian target sebagai berikut:

Tabel 3. 69

Capaian Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3.5
“Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Stabilitas Politik Daerah”

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban	4,180,284,125.00	3,187,833,241.00	76.259%
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	54,965,800.00	54,490,000.00	99.134%
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	907,115,530.00	798,891,720.00	88.069%
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	20,205,151,996.00	19,958,482,056.00	98.779%
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	978,410,000.00	961,022,900.00	98.223%
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	7,085,956,896.00	6,917,240,440.00	97.619%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	34,525,800.00	16,137,500.00	46.740%
Program Penanggulangan Kebakaran	4,880,518,200.00	4,770,860,978.00	97.753%
Program Penanggulangan Bencana	1,096,094,740.00	982,546,906.00	89.641%
	39,423,023,087.00		
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran Sasaran 3.5			88.024%

Meskipun capaian indikator menunjukkan hasil yang sangat baik, pencapaian di tahun-tahun berikutnya menjadi tantangan tersendiri. Berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalahnya:

Tabel 3. 70 Faktor Pendukung, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 3.5

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Indikator 1 “Indeks Ketahanan Daerah”:		
Adanya Kegiatan monitoring dan evaluasi untuk pengumpulan data dukung	Terdapat beberapa indikator yang belum dipenuhi dikarenakan data belum tersedia	meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar instansi yang memiliki sumber data dukung pengisian indeks ketahanan daerah
Indikator 2 “Jumlah Daerah Rawan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum”:		
Kolaborasi dan koordinasi dengan instansi Pemerintah Daerah dan Instansi Samping dalam mengatasi Gangguan Trantibum di wilayah Kota Cirebon	Kurangnya SDM dalam Satpol PP Kota Cirebon dalam memecahkan gangguan trantibum dan kurangnya pengetahuan daripada masyarakat kota cirebon	Sinergitas dengan instansi Pemerintah Daerah dan Instansi samping berkaitan dengan penertiban Trantibum
Indikator 3 “Kejadian Konflik Kebangsaan, Nasionalisme dan Antar Umat Beragama”		
kolaborasi dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah bersama instansi vertikal, instansi penyelenggara pemilu (KPU dan BAWASLU) dan mitra kesbangpol dari masyarakat (FKUB, FKDM, FPK dan organisasi kemasyarakatan lainnya) dalam penyelenggaraan PILKADA	perbedaan pilihan menjelang pelaksanaan PILKADA tidak menimbulkan konflik di Kota Cirebon	meningkatkan kolaborasi dan koordinasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah bersama instansi vertikal, instansi penyelenggara pemilu (KPU dan BAWASLU) dan mitra kesbangpol dari masyarakat (FKUB, FKDM, FPK dan organisasi kemasyarakatan lainnya) untuk menjaga Stabilitas Politik Daerah

3.3 Akuntabilitas Keuangan-Analisis, Efektivitas dan Efisiensi

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direalisasikan sebesar Rp1.581.403.676.368,00 atau sebesar 91,03 persen dari target yang telah ditetapkan Rp1.737.285.680.512,00. Tabel anggaran dan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 71
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2024

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2024		Realisasi
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Operasi	1.565.881.653.107,00	1.448.287.771.451,00	92,49
Belanja Modal	150.124.346.326,00	127.030.325.736,00	84,62
Belanja Tidak Terduga	21.279.681.079,00	6.085.579.181,00	28,60
JUMLAH	1.737.285.680.512,00	1.581.403.676.368,00	91,03

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon, 2024
(LRA TA 2024 Unaudited)

Secara terperinci, realiasi Belanja daerah adalah sebagai berikut:

3.3.1 Belanja Operasi

Belanja operasi dialokasikan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.565.881.653.107,00. Sedangkan realisasi belanja operasi sebesar 92,49 persen atau sebesar Rp1.448.287.771.451,00. Adapun rincian target dan realisasi belanja operasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 72
Target dan Realisasi Belanja Operasi Kota Cirebon Tahun Anggaran 2024

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2024		Realisasi
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	777.466.978.400,00	717.083.685.121,00	92,23
Belanja Barang dan Jasa	717.290.266.397,00	66.1041.904.199,00	92,16
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	1.900.000.000,00	1.858.030.479,00	97,79
Belanja Hibah	65.059.408.310,00	64.194.151.652,00	98,67
Belanja Bantuan Sosial	4.165.000.000,00	4.110.000.000,00	98,68
JUMLAH	1.565.881.653.107,00	1.448.287.771.451,00	92,49

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon, 2024
(LRA TA 2024 Unaudited)

Belanja Pegawai dialokasikan pada Perubahan APBD sebesar Rp777.466.978.400,00 dan realisasi belanja pegawai sebesar 92,23 persen atau sebesar Rp717.083.685.121,00.

Belanja Barang dan Jasa dialokasikan pada Perubahan APBD sebesar Rp717.290.266.397,00 dan realisasi belanja barang dan jasa sebesar 93,60 persen atau sebesar Rp661.041.904.199,00.

Belanja Subsidi dialokasikan pada Perubahan APBD sebesar Rp1.900.000.000,00 sedangkan realisasi belanja subsidi sebesar 97,79 persen atau sebesar Rp1.858.030.479,00.

Belanja Hibah dialokasikan pada Perubahan APBD sebesar Rp65.059.408.310,00 sedangkan realisasi belanja hibah sebesar 98,67 persen atau sebesar Rp64.194.151.652,00.

Belanja Bantuan Sosial dialokasikan pada Perubahan APBD sebesar Rp4.165.000.000,00 sedangkan realisasi belanja bantuan sosial sebesar 98,68 persen atau sebesar Rp4.110.000.000,00, bantuan sosial tersebut diperuntukkan bagi 151 rumah tidak layak huni dengan nilai yang bervariasi disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah. Adapun penyalurannya melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon.

3.3.2 Belanja Modal

Belanja modal dialokasikan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp150.124.346.326,00 sedangkan realisasi belanja modal sebesar 84,62 persen atau sebesar Rp127.030.325.736,00. Adapun rincian target dan realisasi belanja operasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 73
Target dan Realisasi Belanja Modal Kota Cirebon Tahun Anggaran 2024

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2024		Realisasi
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Modal Tanah	945.000.126,00	457.500.000,00	48,41
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.731.588.935,00	66.965.119.218,00	87,27
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.253.880.474,00	35.762.073.628,00	80,81
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	24.189.911.416,00	19.895.322.040,00	82,25
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.003.965.375,00	3.950.310.850,00	98,66
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	150.124.346.326,00	127.030.325.736,00	84,62

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon, 2024
(LRA TA 2024 Unaudited)

Belanja Modal Tanah dialokasikan pada Perubahan APBD Tahun 2024 sebesar Rp945.000.126,00 dan realisasi belanja modal tanah sebesar 48,41 persen atau sebesar Rp457.500.000,00.

Belanja Modal Peralatan Dan Mesin dialokasikan pada Perubahan APBD Tahun 2024 sebesar Rp76.731.588.935,00 sedangkan realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar 87,27 persen atau sebesar Rp66.965.119.218,00.

Belanja Modal Bangunan Dan Gedung dialokasikan pada Perubahan APBD Tahun 2024 sebesar Rp47.745.280.474,00, sedangkan realisasi belanja modal gedung dan bangunan sebesar 80,81 persen atau sebesar Rp35.762.073.628,00.

Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan dialokasikan pada Perubahan APBD Tahun 2024 sebesar Rp24.189.911.416,00 sedangkan realisasi sebesar 82,25 persen atau sebesar Rp19.895.322.040,00.

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dialokasikan pada Perubahan APBD sebesar Rp4.003.965.375,00, sedangkan realisasi belanja aset tetap lainnya sebesar 98,66 persen atau sebesar Rp3.950.310.850,00.

3.3.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dialokasikan pada Perubahan APBD Tahun 2024 sebesar Rp21.279.681.079,00 dan direalisasikan sebesar Rp6.085.579.181,00 atau sebesar 28,60 persen.

Belanja Tidak Terduga direalisasikan antara lain untuk:

1. Pengembalian Sisa Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2015-2021 Tahap 10 Tahun Anggaran 2024
2. Belanja Bantuan sosial untuk orang terlantar alam perjalanan (OTDP) tahap 1 Tahun 2024
3. Pengembalian Sisa Dana Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2015-2021 Tahap 11 Tahun Anggaran 2024
4. Pengembalian Sisa Dana Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2015-2021 Tahap 12 Tahun Anggaran 2024
5. Pengembalian Sisa Dana Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2015-2021 Tahap 13 Tahun Anggaran 2024
6. Pengembalian Sisa Dana Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2015-2021 Tahap 14 Tahun Anggaran 2024

7. Pengembalian Sisa Dana Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2015-2021 Tahap 15 Tahun Anggaran 2024
8. Restitusi atas Kelebihan pembayaran SPPT PBB An. PT. Bank Mandiri dengan NOP 32.74.020.004.011.0074.0
9. Belanja Bantuan sosial untuk orang terlantar dalam perjalanan (OTDP) tahap II Tahun 2024
10. Pengembalian Sisa Dana Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2015-2021 Tahap 16 Tahun Anggaran 2024
11. Pengembalian Sisa Dana Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2015-2021 Tahap 17 Tahun Anggaran 2024
12. Pengembalian Sisa Dana Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2015-2021 Tahap 18 Tahun Anggaran 2024
13. Belanja Bantuan Sosial Rumah Ambruk Tahap I Tahun 2024
14. Pengembalian Sisa Dana Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2015-2021 Tahap 19 Tahun Anggaran 2024
15. Pengembalian Sisa Dana Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2015-2021 Tahap 20 Tahun Anggaran 2024
16. Belanja Bantuan Sosial Rumah Ambruk Tahap II Tahun 2024
17. Pengembalian Sisa Dana Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2015-2021 Tahap 21 Tahun Anggaran 2024
18. Pengembalian Sisa Dana Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2015-2021 Tahap 22 Tahun Anggaran 2024
19. Restitusi atas Kesalahan Pembayaran Pajak Restoran a.n Dinas Kesehatan Kota Cirebon dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWD): P.2.002432.02.001.

Berdasarkan data-data diatas menunjukkan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direalisasikan sebesar Rp1.581.403.676.368,00 dari target yang telah ditetapkan Rp1.737.285.680.512,00. Dengan demikian realisasi anggaran Pemerintah daerah Kota Cirebon pada tahun 2024 cukup tinggi yaitu 91,03%. Jika disandingkan dengan rata-rata pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang memiliki rata-rata capaian kinerja 102,65% maka kinerja dapat disimpulkan cukup efektif dan efisien.

3.4 Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran

Dalam rangka mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pun, kami analisa hal tersebut dengan menyandingkan data pencapaian kinerja pada setiap sasaran dalam RPD dengan realisasi anggaran dari seluruh program yang menopang pencapaian sasaran tersebut dimana efisien jika capaian kinerja lebih besar dibanding realisasi anggaran, sebagai berikut:

Tabel 3. 74
Data Analisis Efisiensi Pencapaian Kinerja dan Penggunaan Sumber Daya
(Anggaran) Tahun 2024

NO	Tujuan/ Sasaran	Jumlah Indikator	Tahun 2024		
			Presentase Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran (%)	Rata-Rata Realisasi Program Anggaran (%)	Selisih Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
1	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat	3	102.13%		
1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi masyarakat	3	102.13%	99.31%	3.82%
1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Cirebon	4	90.27%	94.004%	-3.74%
1.3	Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup	2	101.16%	87.732%	13.43%
1.4	Terkendalinya Jumlah Penduduk	1	75.51%	88.242%	-12.73%
1.5	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Olahraga	2	101.75%	76.25%	25.5%
1.6	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dan perlindungan anak	3	105.13%	79.022%	26.11%
1.7	Menurunnya dampak perubahan iklim	1	110.06%	82.920%	27.14%
1.8	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	1	101.24%	98.816%	2.42%
1.9	Menurunnya tingkat pengangguran	1	117.80%	72.479%	45.32%

NO	Tujuan/ Sasaran	Jumlah Indikator	Tahun 2024		
			Presentase Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran (%)	Rata-Rata Realisasi Program Anggaran (%)	Selisih Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
2.	Meningkatkan Potensi, Kapasitas dan Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi Daerah	1	122.74%		
2.1	Meningkatnya pengembangan ekonomi berkelanjutan	4	94.69%	88.437%	6.25%
2.2	Meningkatnya investasi penanaman modal	1	101.50%	88.584%	12.92%
3	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berwibawa	1	113.69%		
3.1	Meningkatnya pelayanan publik berbasis elektronik	1	116.01%	89.34%	26.67%
3.2	Meningkatnya penerapan hasil kelitbangan dan inovasi daerah	1	100.61%	94.23%	6,38%
3..3	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan pemerintahan	6	103.38%	83.58%	19,79%
3.4	Meningkatnya kualitas pembangunan kewilayahan dan pemberdayaan Masyarakat	2	122.22%	61.585%	60.63%
3.5	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta stabilitas politik daerah	3	118.00%	88,02%	38.98%

Dari tabel di atas terdapat beberapa kriteria dari perbandingan antara pencapaian kinerja pada setiap sasaran dengan persentase realisasi anggaran atau realisasi yang di belanjakan dari Anggaran yang disediakan, disebut efisien dalam penggunaan anggaran jika capaian kinerja melebihi penyerapan anggaran, tidak efisien jika pencapaian kinerja di bawah realisasi penyerapan anggaran program, berikut adalah kriteria tersebut:

1. Rata-rata capaian kinerja seluruh sasaran mencapai 105,264%, sedangkan rata-rata realisasi anggaran sebesar 87,87%. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja masih berada di bawah tingkat penyerapan anggaran, yang dapat mengindikasikan efisiensi anggaran yang perlu ditingkatkan.
2. Terdapat sasaran yang masuk pada kriteria efektif dan paling efisien yaitu Sasaran 3.4 “Meningkatnya kualitas pembangunan kewilayahan dan pemberdayaan Masyarakat” dengan efisiensi hingga 60,63% dimana pencapaian kinerja sasaran hingga 122,22%% sementara realisasi program anggaran 61,585%, sehingga memiliki Selisih Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran terbaik sebesar 60,63%.
3. Sementara itu, terdapat sasaran dengan rata-rata selisih capaian kinerja dan realisasi anggaran paling rendah yaitu pada sasaran 1.4 yaitu “Terkendalinya Jumlah Penduduk” dengan capaian 75.51%, sementara realisasi anggaran pada program yang mendukung sasaran mencapai 88.242% sehingga memiliki selisih 12.73% (-) tidak efisien.

Metode analisa efisiensi penggunaan sumberdaya ini merupakan metode sederhana dalam menggambarkan secara umum tingkat efisiensi capaian kinerja terhadap penggunaan sumber daya (anggaran), sebagai upaya penelitian lebih lanjut terhadap efektivitas dan efisiensi kinerja agar melakukan analisa lebih dalam terhadap capaian kinerja disetiap indikator, berikut faktor-faktor yang mendukung serta permasalahannya yang telah diuraikan pada BAB III di bagian Sub Bab 3.2 dalam Laporan Kinerja ini.

3.5 Inovasi dan Prestasi

Pada tahun 2024 Pemerintah Daerah Kota Cirebon memiliki fokus pada optimalisasi implementasi Inovasi dan Prestasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan, upaya optimasilasasi dan pengembangan inovasi yang ada juga diapresiasi dengan diterimanya penghargaan tingkat Nasional dari Kementerian Dalam Negeri, atas Capaian Indeks Inovasi Daerah Kategori Inovatif. Inovasi dan Prestasi yang diraih diurai sesuai dengan Area Misi Pemerintah Daerah Kota Cirebon sebagai berikut:

No	Inovasi	Prestasi
1.	Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. MEGAH TINGTING LUR (Mari Cegah Stunting dengan Pemberian Telur) 2. PANTAU SI DIA (Pemantauan Penyakit Tidak Menular Hipertensi dan Diabetes Melitus Oleh Kader Kesehatan) 3. SAYONARA TB (Semua Ayo beRantas tunTas Tuberkulosis) 4. SI ANAK EMAS (digitalisaSI pelayANAn reKam mEdis puskesMAS) 5. JEJAK CINTA (Jejaring, Jemput dan Ajak Ibu Hamil ANC rutin untuk Cegah Kematian Ibu, Bayi dan Balita) 6. JARI MANIS (JAga diRI MengAtasi Hipertensi Pada ProLANIS) 7. SAE TBC Larangan (Sembuh Aman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghargaan Sebagai Kepala Daerah yang memiliki Komitmen Dalam Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan dari Kementerian Bappenas RI kepada Pj Wali Kota Cirebon 2. Penghargaan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kepada Sekolah Adiwiyata Nasional 2024 kepada SMP Santa Maria Kota Cirebon 3. Penghargaan Dinas Kesehatan Kota Cirebon dari BPJS Kesehatan Republik Indonesia 4. Penghargaan Peraih 6 (enam) Besar Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Pengurangan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Sebagai Tolak Ukur Capaian Kinerja Penanggulangan Bencana Kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cirebon 5. Penghargaan Partisipasi, Kerja Sama, dan Dukungannya Selama Proses Pengusulan Karya Budaya Pada Sidang Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2024 kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon 6. Penghargaan Raksa Prasada Kepada SDN Pesantren Kategori Sekolah Berbudaya Lingkungan/Adiwiyata Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 7. Penghargaan Raksa Prasada Kepada SDN Bima Kategori Sekolah Berbudaya Lingkungan/Adiwiyata Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

No	Inovasi	Prestasi
	<p>Edukatif dari Tuberkulosis)</p> <p>8. Mari Ceria (Remaja Putri Cerdas Tanpa Anemia)</p> <p>9. GeMa CerMat (Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan ObAT)</p> <p>10. GEMMES (Gerakan Mencegah dan Menangani Stunting)</p> <p>11. CIKAL (Cipta Karsa Literasi)</p>	<p>8. Penghargaan Raksa Prasada Kepada SDN Kalijaga Permai Kategori Sekolah Berbudaya Lingkungan/Adiwiyata Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024</p> <p>9. Penghargaan Implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Tingkat Provinsi Jawa Barat sebagai Peringkat III kepada Pemerintah Kota Cirebon</p> <p>10. Penghargaan Penyusunan Dokumen Deskripsi SDM Kesehatan Terbaik Ke-2 Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kota Cirebon</p> <p>11. Penghargaan Kelengkapan Data Fasyankes kategori Kota Madya terbaik Ke-3 Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kota Cirebon</p> <p>12. Penghargaan Pengelolaan Data 9 Tenaga Kesehatan Puskesmas Tingkat Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kota Cirebon</p> <p>13. Penghargaan Pengelolaan Data Dokter Spesialis RSUD Provinsi Jawa Barat</p> <p>14. Penghargaan Pemenuhan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis Prioritas Terbaik Ke-3 Tingkat Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kota Cirebon</p> <p>15. Penghargaan Apresiasi Dukungan Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Kegiatan Perencanaan SDM Kesehatan</p> <p>16. Penghargaan UPT Pelayanan Kesehatan Khusus atas Pelaksanaan <i>Public Safety Center (PSC)</i> Layak Rawat terbaik Ke-3 di Jawa Barat kepada Pemerintah Kota Cirebon</p> <p>17. Penghargaan Pelaksanaan Kesehatan Tradisional Terbaik peringkat Ke-3 di Jawa Barat kepada Pemerintah Kota Cirebon</p> <p>18. Implementasi RME terkoneksi Satu Sehat di Puskesmas, Klinik dan Praktik Mandiri Terbaik Peringkat 3 di Jawa Barat kepada Pemerintah Kota Cirebon</p> <p>19. Dinas Kesehatan Kab/Kota dengan Persentase Jumlah Rumah Sakit Patuh Laporan Indikator Nasional Mutu (INM) Tertinggi Semester I Tahun 2024 Provinsi Jawa Barat</p>

No	Inovasi	Prestasi
2.	Tujuan 2 : “Meningkatnya Pertumbuhan Potensi, Kapasitas, dan Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi Daerah”	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. MALL UKM (Melayani Anda Lewat Layanan Usaha Kecil dan Menengah) Kota Cirebon 2. Festival Milim Kampung (Ciptakan Karya Kreatif dan Kearifan Lokal) 3. Kemis Nyerbon (Upaya Pelestarian Budaya Cirebon di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghargaan <i>Public Service Of The Year</i> Jabar Banten Tahun 2024 dari Markplus Institute kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan Dan Perindustrian Kota Cirebon 2. Penghargaan Tokoh Penggerak UMKM Terinspirasi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia
3.	Tujuan 3 : “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berwibawa”	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gerakan Cirebon Minim Sampah (GERIMIS) 2. Sistem Informasi Geografis Bencana Kota Udang (SIGENTONG) 3. Si Kumbang Madu (Program ini memberikan stimulasi tumbuh kembang untuk ibu hamil dan anak balita dalam penurunan stunting melalui kegiatan yang melibatkan ibu PKK) 4. Inovasi Maskot Rang3R Boy untuk Mengkampanyekan Gerakan Cinta Lingkungan di SMPN 7 Cirebon 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghargaan Penganugrahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari Ombudsman Republik Indonesia kepada Pemerintah Kota Cirebon dengan Opini Kualitas Tertinggi dan Zona Hijau 2. Penghargaan Penganugrahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dari Ombudsman Republik Indonesia Kepada Dinas Sosial Kota Cirebon dengan Total Nilai 96,59 3. Penghargaan Penganugrahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari Ombudsman Republik Indonesia Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dengan total nilai 92,89 4. Penghargaan Sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon

No	Inovasi	Prestasi
	<p>5. BUKU SAKTI (Buku Saku Sistem Akuntabilitas Kinerja Terintegrasi)</p> <p>6. BUKTI PRESTASI (Buku Sakti Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Terintegrasi)</p> <p>7. PINTAR BER-AKHLAK (Pedoman Instruksi Penerapan Budaya Kerja Ber-AKHLAK)</p>	<p>5. Penghargaan atas Keberhasilan Menerapkan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dengan Predikat BAIK kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Cirebon</p> <p>6. Penghargaan Peserta Rapat Koordinasi Wilayah Terbaik atas Dukungan Pemutakhiran Data Kepesertaan ASN pada Portal SITARA kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Cirebon</p> <p>7. Penghargaan Partisipasi Aktif dan Kerjasamanya Dalam Pelaksanaan Gerakan Nasional Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih Tahun 2024 dari Menteri Dalam Negeri kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon</p> <p>8. Penghargaan Bhumandala Nawasena dari Badan Informasi Geospasial kepada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon</p> <p>9. Penghargaan Juara II Penyelenggara Tata Kelola Data dari Pj Gubernur Jawa Barat Kepada Pemerintah Kota Cirebon</p> <p>10. Penghargaan Inovasi Penyelenggaraan SDI Terbaik Kabupaten dan Kota dari Pj Gubernur Jawa Barat Kepada Pemerintah Kota Cirebon</p> <p>11. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Jawa Barat kepada Pemerintah Kota Cirebon pada Kategori Kota Informatif</p> <p>12. Pemerintah Daerah Kota Terbaik Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dari Pj Gubernur Jawa Barat kepada Pemerintah Kota Cirebon</p> <p>13. Kriteria Potensi Linmas Peringkat II dari Pj Gubernur Jawa Barat kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon</p> <p>14. Penghargaan Terbaik Pertama Penilik Inovatif pada Kegiatan Jambore GTK Hebat 2024 Provinsi Jawa Barat</p>

No	Inovasi	Prestasi
		15. Penghargaan Penggerak Komunitas Belajar Provinsi Jawa Barat Jambore GTK Hebat Tahun 2024 16. Penghargaan Pemenang 1 pada Permartabatan Bahasa Negara di Lembaga Publik Tahun 2024 yang Diselenggarakan Oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat 17. Penghargaan Kota Cirebon Juara II Lomba Kreativitas Pengembangan Hantaran LKP Nur Utami

3.6 Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Peningkatan Implementasi SAKIP 2025

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah menjadi sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang baik, menjamin akuntabilitas dan terus mendorong berbagai upaya inovasi untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan secara optimal. Melalui Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud sebagai laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan.

Hasil evaluasi pada tahun 2024 yang ditunjukkan Laporan Hasil Evaluasi Nomor B/230/AA.05/2024 Tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan nilai akuntabilitas kinerja, sebelumnya pada tahun 2023 bernilai 68,56 menjadi 69,04 pada tahun 2024 dengan komponen sebagai berikut:

Tabel 3. 75

Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Cirebon

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	Nilai
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	23,98	24,01
2	Pengukuran Kinerja	30	17,88	18,04
3	Pelaporan Kinerja	15	10,27	10,37
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,43	16,62
	Nilai Hasil Evaluasi	100	68,56	69,04
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Namun berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2024 masih ditemukan adanya permasalahan yang menghambat implementasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Cirebon. Sebagai respon terhadap hal tersebut pada tahun 2025 di susun rencana aksi dan tindak lanjut sebagai berikut:

Tabel 3. 76
Rencana Aksi Peningkatan Implementasi SAKIP Tahun 2025 Pemerintah Kota Cirebon

No	Komponen	Temuan Kondisi	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1.	Perencanaan Kinerja	<p>Terdapat sasaran strategis serta indikator kinerja PD yang belum berorientasi hasil seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3. Kepala Dinas Perhubungan 4. Kepala Bidang Promosi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 	<p>Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan baik pada Pemda maupun PD secara berjenjang dengan memastikan bahwa rumusan tujuan dan sasaran strategis yang dikawal telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat serta memiliki indikator yang SMART (<i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-bound</i>) dan Cukup untuk mengawasi pencapaian kinerja. Selanjutnya memastikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kembali sasaran strategis dengan indikator SMART. 2. Mengadakan <i>workshop</i> penyusunan perencanaan kinerja untuk OPD. 	100% OPD memiliki dokumen perencanaan yang memenuhi Kriteria SMART.	TW 4 (2024)	<ol style="list-style-type: none"> 1. BAPPELITBAN GDA 2. Seluruh PD

No	Komponen	Temuan Kondisi	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
			sasaran dan indikator kinerja tersebut sesuai dengan level jabatannya serta sesuai dengan karakteristik/tugas organisasi				
		Terdapat PD belum menyampaikan PK Kepala Bidang pada laman <i>esr.menpan.go.id</i> sehingga tidak tahu kejenjangannya seperti Dinas Tenaga Kerja	Memastikan seluruh PK Perangkat Daerah telah diunggah pada laman <i>esr.menpan.go.id</i>	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan unggahan PK OPD. Sosialisasi kewajiban unggah dokumen bagi OPD 	100% PK OPD tersedia di laman <i>esr.menpan.go.id</i>	TW 1 (2025)	<ol style="list-style-type: none"> SETDA (Bag. Organisasi) Seluruh PD
		Perjengangan kinerja PD belum mempertimbangkan <i>logical framework</i> dan <i>critical succes factor (CSF)</i> atas pencapaian kinerja, sehingga belum menggambarkan hubungan sebab akibat	Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan <i>logical framework</i>	<ol style="list-style-type: none"> Pelatihan teknis <i>Logical Framework</i> dan CSF. Revisi dokumen penjenjangan kinerja 	Semua OPD memiliki dokumen dengan penjenjangan kinerja yang sesuai.	TW 1 (2025)	<ol style="list-style-type: none"> BAPPELITBAN GDA Seluruh PD

No	Komponen	Temuan Kondisi	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
		dalam mendukung kinerja PD lainnya.	dan <i>critical succes factor (CSF)</i> dalam menapai tujuan dan sasaran pemerintah. Selanjutnya memanfaatkan perpanjangan kinerja tsb sebagai dasar dalam menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan	berbasis CSF.			
		Penetapan rencana aksi pada sebagian PD masih belum sepenuhnya menjabarkan kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi yang selaras untuk pencapaian kinerja utama yang telah ditetapkan pada PK	Memastikan seluruh PD menyusun rencana aksi yang didukung aksi yang selaras dalam mencapai kinerja dan mengunggah pada laman esr.menpan.go.id	1. Verifikasi keselarasan rencana aksi dengan kinerja utama. 2. Monitoring unggahan rencana aksi OPD.	100% OPD memiliki rencana aksi yang jelas dan terdokumentasi.	TW1 (2025)	1.SETDA (Bag. Organisasi) 2. Seluruh PD
		Penjejaran kinerja sebagian PD masih belum mempertimbangkan <i>cross-cutting</i> kinerja	Melakukan identifikasi dan pemetaan pada cascading kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya	1. Pemetaan tugas dan fungsi antar OPD yang memiliki keterkaitan	<i>Cross-cutting</i> kinerja terintegrasi di 100%	TW 1 (2025)	1. BAPPELITBA NGDA 2. Seluruh PD

No	Komponen	Temuan Kondisi	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
		dengan unit/instansi lain.	potensi crusscutting kinerja dengan tugas dan fungsi dari PD lain yang memiliki keterkaitan dengan mencapai kinerja	2. Penyelarasan target kinerja OPD terkait.	OPD yang berkaitan.		
2	Pengukuran Kinerja	Terdapat ketidakselarasan antara IKU dengan PK, seperti pada DPPAKB terdapat indikator "Indeks Pembangunan Gender", "Indeks Pemberdayaan Gender", "Laju Pertumbuhan Penduduk", dan beberapa indikator lain yang tidak dimuat di PK.	Memastikan keselarasan seluruh indikator kinerja pada IKU telah dimuat dalam PK.	Reviu seluruh indikator kinerja pada PK perangkat Daerah agar lebih spesifik dan terukur serta Memuat IKU	100% PD memiliki PK yang memuat indikator IKU PD nya.	TW 4 (2024)	1. SETDA (Bag. Organisasi) 2. Seluruh PD
		Terdapat IKU PD yang tidak dilengkapi dengan definisi operasional seperti Dinas Kepemudaan dan Olahraga.	menyempurnakan IKU dengan DO dan formulasi perhitungan serta sumber data yang	Memeriksa dan Membimbing Perangkat Daerah yang belum	100% IKU PD memiliki DO	TW 4 (2024)	1. SETDA (Bag. Organisasi) 2. Seluruh PD

No	Komponen	Temuan Kondisi	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
			relevan untuk setiap indikator kinerja	memiliki DO pada IKUnya			
		Belum seluruh PD memanfaatkan Aplikasi e-sakip sebagai pengukuran kinerja secara berkala.	Mendorong PD untuk memanfaatkan aplikasi e-sakip sebagai alat pemantauan dan evaluasi capaian kinerja secara berkala serta mendorong PD melakukan monitoring atas pencapaian rencana aksi untuk memastikan tingkat ketercapaian kinerja pada TW IV	1. Menyampaikan Surat perihal Pengisian dokumen SAKIP pada Perangkat Daerah, khususnya data capaian kinerja per triwulan 2. Penyusunan Buku Pedoman SAKIP	1. dokumen (1 Surat) 2. Buku SAKTI (Buku Saku Akuntabilitas Kinerja Terintegrasi)	TW 4 (2024)	1. SETDA (Bag. Organisasi) 2. Seluruh PD
		Pemda telah melakukan pengukuran kinerja, namun hasilnya belum sepenuhnya menjadi perhatian pimpinan dan digunakan sebagai dasar pemberian	Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan pemberian reward dan punishment, penentuan strategi,	Menyusun Perwal SAKIP yang memperkuat reward dan punishment dalam implementasi	Dokumen Perwal (1 Dokumen)	TW 2 (April) (2025)	1. BAPPELITBANG DA 2. SETDA (Bag. Organisasi) 3. Seluruh PD

No	Komponen	Temuan Kondisi	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
		<i>reward and punishment</i> dan perbaikan strategi pencapaian kinerja.	target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai	SAKIP khususnya pengukurna kinerja			
		Beberapa PD belum sepenuhnya melakukan pengukuran capaian kinerja secara berjenjang, dimana pengukuran kinerja pada aplikasi masih sebatas indikator kinerja kepala PD pada akhir TW IV dan sebagian PD belum mengukur capaian kinerja atas rencana aksi triwulanan, hanya sebatas pengukuran realisasi anggaran.	Menggunakan informasi capaian kinerja pada laporan kinerja sebagai penentuan target tahun	<ol style="list-style-type: none"> Mereview dokumen perencanaan dan melakukan penyesuaian target jika capaian kinerja N-1 telah melebihi target (dokumen perencanaan yang dirubah adalah PK Perubahan) Memberikan bimtek 	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh PK memiliki target relevan (tidak kurang dari N-1) Laporan Interim PD memuat ukuran capaian kinerja 	<ol style="list-style-type: none"> TW 1 (2025) TW 1-4 (2025) 	<ol style="list-style-type: none"> SETDA (Bag. Organisasi) Seluruh PD

No	Komponen	Temuan Kondisi	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
				dan review terhadap laporan Triwulan			
3	Pelaporan Kinerja	Informasi dalam laporan kinerja belum dimanfaatkan dalam perencanaan pada tahun berikutnya. Hal ini terlihat dari penetapan target yang lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Seperti pada Dinas Koperasi, Usaha Izin Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.	penyesuaian aktivitas/strategi mencapai kinerja dan kebutuhan anggarannya	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan Publish/ Pembahasan hasil Pengukuran Kinerja pada Rakor Pimpinan Memperkuat kembali kajian kebijakan pada strategi dan perencanaan penganggaran yang tertuang dalam Renja 	<ol style="list-style-type: none"> Publikasi dan Rakor Laporan Kinerja (1 Keg.) seluruh PK memuat target relevan 	TW 1 (2025)	<ol style="list-style-type: none"> SETDA (Bag. Organisasi) Seluruh PD

No	Komponen	Temuan Kondisi	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
				berdasarkan hasil pengukuran kinerja			
		Laporan Kinerja PD belum menyajikan analisis keberhasilan/kegagalan yang memadai dalam mencapai kinerja, seperti laporan kinerja yang disusun oleh Dinas Perhubungan serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Meningkatkan kualitas laporan kinerja PD dengan menyajikan analisis secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/tidak tercapainya kinerja organisasi	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi Buku SAKTI (Buku Saku Akuntabilitas Kinerja Terintegrasi) Melaksanakan Pendampingan Penyusunan LKIP pada Perangkat Daerah (Khususnya Dishub dan DPUTR) 	<ol style="list-style-type: none"> Kegi. Sosialisasi (1) Desk/FGD SAKIP(32 PD) 	TW 1 (2025)	<ol style="list-style-type: none"> SETDA (Bag. Organisasi) Seluruh PD
		LPPD dan LKJIP PD belum seluruhnya di publikasikan untuk dapat diakses oleh masyarakat	Memastikan laporan kinerja diunggah pada laman Kota Cirebon, sehingga dapat diakses	Saat ini LKIP sudah di publish secara public pada esakip.cirebo	1. Publikasi pada Media	TW 1 (2025)	SETDA (Bag. Organisasi)

No	Komponen	Temuan Kondisi	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
			secara luas oleh masyarakat	nkota.go.id, untuk memperluas publikasi di beritakan pada website Pemerintah Kota Cirebon			
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Evaluasi Internal SAKIP yang telah dilakukan belum didukung dengan kualitas SDM yang merata dan penjaminan mutu yang baik.	Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal agar mampu menggunakan instrumen evaluasi secara maksimal, menerapkan judgement profesional secara tepat, memberikan simpulam hasil evaluasi yang menggambarkan kondisi ril penerapan SAKIP setiap PD sehingga rekomendasinya dapat memacu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Blimbingan Teknis Evaluasi SAKIP bagi Evaluator 2. Membuat Tim Gabungan yang melibatkan mitra evaluator sesuai komponen SAKIP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimtek Evaluator 2. SK tim Evaluasi SAKIP 	TW 2 (2025)	Inspektorat

No	Komponen	Temuan Kondisi	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
			perbaikan akuntabilitas kinerja PD				
		Belum adanya mekanisme monitoring yang optimal atas hasil evaluasi untuk memastikan bahwa hasil evaluasi dipahami oleh seluruh pimpinan PD dan rekomendasi dapat ditindaklanjuti dengan baik.	Memastikan rekomendasi hasil evaluasi AKIP dapat menjadi perhatian pimpinan PD dan memastikan adanya proses monitoring untuk memastikan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan berjalan dengan baik	Pelaksanaan Monitoring Kinerja menyisipkan catatan hasil evaluasi pada SAKIP Perangkat Daerah	Penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut Pada PD	TW 1-TW 4	1. SETDA (Bag. Organisasi) 2. Seluruh PD
		Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dijadikan dasar pemberian reward and punishment sehingga mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas implementasi SAKIP secara keseluruhan.	Menyusun kebijakan reward and punishment dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga mampu mendorong peningkatan implementasi SAKIP di PD	Menyusun perbaikan Perwal tentang SAKIP yang memuat penguatan Reward dan Punishment	Perwal Tentang SAKIP (1 Dokumen)	TW 2 2025	1. BAPPELITBAN GDA 2. SETDA (Bag. Organisasi) 3. Seluruh PD



BAB IV PENUTUP

Tahun 2024 merupakan tahun penting dalam keberlanjutan pembangunan di Kota Cirebon, dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi. Berbagai kebijakan strategis yang telah diterapkan menunjukkan hasil positif, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan sistem tata kelola pemerintahan berbasis inovasi.

Pada tahun ini, Pemerintah Daerah Kota Cirebon terus mendorong efektivitas dan efisiensi pelayanan melalui optimalisasi inovasi yang telah berjalan serta pengembangan kebijakan baru guna menghadapi tantangan pembangunan. Selain itu, Pemerintah Daerah Kota Cirebon berupaya menindaklanjuti beberapa kelemahan yang terdapat pada tahun 2023, serta menerapkan target-target baru pasca ditetapkannya RPD Kota Cirebon Tahun 2024-2026.

Komitmen dalam mewujudkan pembangunan daerah tercermin dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 ini. Secara umum, capaian sasaran strategis yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai harapan, meskipun terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi untuk memastikan target pembangunan dapat tercapai secara optimal. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama Kota Cirebon secara umum berhasil dicapai sesuai harapan, menjadi landasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

A. Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cirebon, pencapaian 101,73% dengan Predikat **Melebihi Target**
2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), pencapaian 105,56%, dengan predikat **Melebihi Target**
3. Persentase Penduduk Miskin, pencapaian 99,10% dengan predikat **Sangat Tinggi**

4. Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi masyarakat, pencapaian 102,13% dengan predikat **Melebihi Target**
 5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Cirebon, pencapaian 90,27% dengan predikat **Sangat Tinggi**
 6. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup, pencapaian 101,16% dengan predikat **Melebihi Target**
 7. Terkendalinya Jumlah Penduduk, pencapaian 75,51% dengan predikat **Tinggi**
 8. Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Olahraga, pencapaian 101,75% dengan predikat **Melebihi Target**
 9. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dan perlindungan anak, pencapaian 105,13% dengan predikat **Melebihi Target**
 10. Menurunnya dampak perubahan iklim, pencapaian 110,06% dengan predikat **Melebihi Target**
 11. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal, pencapaian 101,24% dengan predikat **Melebihi Target**
 12. Menurunnya tingkat pengangguran, pencapaian 117,80% dengan predikat **Melebihi Target**
- B. Tujuan 2 Meningkatnya Pertumbuhan Potensi, Kapasitas, dan Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi Daerah**
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), pencapaian 111,8% dengan predikat **Melebihi Target**
 2. Meningkatnya pengembangan ekonomi berkelanjutan, pencapaian 94,69% dengan predikat **Sangat Tinggi**
 3. Meningkatnya investasi penanaman modal, pencapaian 101,50% dengan predikat **Melebihi Target**
- C. Tujuan 3 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berwibawa**
1. Indeks Reformasi Birokrasi, pencapaian 113,69% dengan predikat **Melebihi Target**
 2. Meningkatnya pelayanan publik berbasis elektronik, pencapaian 116,01% dengan predikat **Melebihi Target**

3. Meningkatnya penerapan hasil kelitbangan dan inovasi daerah, pencapaian 100,61% dengan predikat **Melebihi Target**
4. Meningkatnya dukungan penyelenggaraan pemerintahan, pencapaian 103,38% dengan predikat **Melebihi Target**
5. Meningkatnya kualitas pembangunan kewilayahan dan pemberdayaan Masyarakat, pencapaian 122,22% dengan predikat **Melebihi Target**
6. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta stabilitas politik daerah, pencapaian 118,00% dengan predikat **Melebihi Target**

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis yang tercantum dalam RPD Tahun 2024–2026, terdapat 3 tujuan dan 16 sasaran, dengan total 21 indikator beserta targetnya pada tahun 2024. Adapun capaian tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Rekapitulasi Predikat Pencapaian Kinerja Seluruh Indikator
pada Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2024

	Cukup 65-74,99	Tinggi 75.00 – 89.99	Sangat Tinggi >90	Sesuai Target =100	Melebihi Target >100
Tujuan	-		1	-	4
Sasaran	-	1	2	-	13

Dari pencapaian sasaran strategis pada perubahan RPD Kota Cirebon Tahun 2024-2026, umumnya seluruh pencapaian yang di dapat sesuai harapan, secara keseluruhan rata-rata pencapaian indikator pada tujuan dan sasaran strategis adalah **103,54%**, data dukung setiap capaian sasaran/indikator kinerja dapat dilihat pada link <https://s.id/datakinerjaWalkot2024>. Kendati demikian ada beberapa catatan penting terkait kelemahan atas pencapaian yang perlu ditindak lanjuti sebagai berikut:

1. Tujuan dan Sasaran pada tingkat Pemerintah Daerah dinilai cukup baik dan menjawab isu strategis namun sasaran strategis dan indikatornya pada Perangkat Daerah sebagai turunan dari Rencana Pembangunan Daerah perlu direview untuk menjamin keselarasan kinerja.

2. Sebagian besar capaian kinerja pada sasaran strategis telah memenuhi harapan, maka kinerja tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan namun pada sasaran serta indikator kinerja yang belum dicapai secara efektif dan efisien berdasarkan analisa pada BAB III Akuntabilitas Kinerja perlu dievaluasi secara mendalam dan ditingkatkan pada tahun berikutnya.
3. Terkait kelemahan dalam setiap sasaran dan upaya untuk mengantisipasinya yang dijabarkan cukup spesifik di dalam BAB III pada laporan ini, agar dapat ditindaklanjuti baik dari sisi perencanaan serta pelaksanaan atau implementasinya.

Demikian laporan ini telah disusun, pencapaian atas kinerja yang telah ditetapkan merupakan kerja keras seluruh unsur dalam Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kota Cirebon, sementara atas kelemahan pada beberapa pencapaian kinerja semata-mata merupakan suatu kelemahan dan ketidaksempurnaan insan manusia yang seyogyanya dijadikan motivasi untuk memperbaikinya di masa yang akan datang. Terimakasih kami sampaikan kepada seluruh elemen pemangku kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, serta masyarakat yang juga turut mengambil peran dalam membangun Kota Cirebon, semoga Laporan ini dapat memberikan gambaran kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon dan dipergunakan sebagai mestinya.

Cirebon, 27 Maret 2025
WALI KOTA CIREBON



EFFENDI EDO, S.AP. M.Si



LAMPIRAN

BAGIAN INI BERISI DOKUMEN PENDUKUNG YANG MELENGKAPI LAPORAN INI, YAITU:

- LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA). DOKUMEN INI BERTUJUAN UNTUK MENGEVALUASI SEJAUH MANA ANGGARAN TELAH DIREALISASIKAN SECARA EFISIEN DALAM Mendukung Pencapaian Program dan Kegiatan yang telah direncanakan.
- PERJANJIAN KINERJA. DOKUMEN INI BERFUNGSI UNTUK MEMASTIKAN BAHWA KINERJA YANG DICAPAI SELARAS DENGAN SUMBER DAYA YANG TELAH DIALOKASIKAN, SEHINGGA EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM DAPAT DIUKUR SECARA OBJEKTIF.

DOKUMEN-DOKUMEN INI DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR EVALUASI SERTA UNTUK MEMASTIKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN.





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. AGUS MULYADI, M.Si

Jabatan : Pj. Wali Kota Cirebon

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

UNIT PENGOLAH		
No	JABATAN	PARAF TGL
1		<i>[Signature]</i>
2		<i>[Signature]</i>
PARAF KOREKSI		
No	JABATAN	PARAF TGL
1	ASMIN	<i>[Signature]</i>
2	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3		
4		
5		

Cirebon, Oktober 2024
Pj. Wali Kota Cirebon, *[Signature]*
:
DR. AGUS MULYADI, M.Si

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cirebon (Poin)	76,76
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Persen)	56,08
		Prosentase Penduduk Miskin (Persen)	8,94
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	10,75
		Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	13,16
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Poin)	88
1.2	Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Harapan Hidup (Tahun)	75,18
		Angka Kejadian TB (per 100 ribu penduduk)	497
		Prevalensi Balita Stunting (Persen)	14
		Skor Pola Pangan Harapan (Persen)	92
1.3	Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rp)	12.550
		Tingkat Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Jangkauan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (Persen)	100
1.4	Terkendalinya Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)	0,98
1.5	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Olahraga	Angka Partisipasi Masyarakat Olahraga (Persen)	54
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan Pemuda terbina (Persen)	65
1.6		Indeks Pembangunan Gender/IPG (Poin)	94,47

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender/IDG (Poin)	78,7
		Jumlah Skor Evaluasi Kota Layak Anak (Poin)	550
1.7	Menurunnya dampak perubahan iklim	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Persen)	7,26
1.8	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan local	Persentase pelestarian obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya (Persen)	76,50
1.9	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)	7,65
Tujuan:			
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Daya Saing Daerah yang berdampak pada menurunnya kemiskinan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (Persen)	4,49
Sasaran:			
2.1	Meningkatnya pengembangan ekonomi berkelanjutan	Kontribusi PDRB dari Sektor Industri (ADHB) (Persen)	10,87
		Kontribusi PDRB dari Sektor Pariwisata (ADHB) (Persen)	5,60
		Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan (ADHB) (Persen)	30,46
		Kontribusi PDRB dari Sektor Pertanian dan Perikanan (ADHB) (Persen)	0,34
2.2	Meningkatnya investasi penanaman modal	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Persen)	4,68
Tujuan:			
3.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berwibawa	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	74
Sasaran:			
3.1	Meningkatnya pelayanan publik berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Poin)	3,56
3.2	Meningkatnya penerapan hasil kelitbangan dan inovasi daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang Diserahkan Untuk Dimanfaatkan Oleh Perangkat Daerah dan/atau Stakeholders (Persen)	71
3.3	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	82
		Indeks Perencanaan Pembangunan (Poin)	95,58
		Indeks Profesionalitas ASN (Poin)	70
		Nilai SAKIP (Poin)	71
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan (Peringkat)	WTP

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Tingkat Maturitas SPIP (Poin)	3
3.4	Meningkatnya kualitas pembangunan kewilayahan dan pemberdayaan Masyarakat	Target Kelurahan Cepat Berkembang (Persen)	90,91
		Target Kelurahan Swasembada (Persen)	40,91
3.5	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta stabilitas politik daerah	Indeks Ketahanan Daerah (Poin)	0,5
		Jumlah Daerah Rawan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lokasi)	12
		Jumlah kejadian konflik kebangsaan, nasionalisme dan antar umat beragama (Kasus)	0

No.	Program	Jumlah (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	885.584.494.992
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	119.982.530.493
3.	Program Pengembangan Kurikulum	726.247.052
4.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.564.810.868
5.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	443.064.766.133
6.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.748.399.950
7.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	604.473.825
8.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.446.423.650
9.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	9.387.736.565

No.	Program	Jumlah (Rp)
10.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	691.607.322
11.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	50.000.000
12.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	6.281.707.815
13.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	6.737.566.148
14.	Program Penataan Bangunan Gedung	6.147.861.300
15.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	22.702.324.776
16.	Program Penyelenggaraan Jalan	20.917.067.528
17.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	305.500.000
18.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	439.050.645
19.	Program Penatagunaan Tanah	1.229.221.401
20.	Program Pengembangan Perumahan	270.206.540
21.	Program Kawasan Permukiman	6.225.494.544
22.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	2.600.293.032
23.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.522.119.675
24.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	4.880.518.200
25.	Program Penanggulangan Bencana	1.596.495.940

No.	Program	Jumlah (Rp)
26.	Program Pemberdayaan Sosial	222.947.000
27.	Program Rehabilitasi Sosial	885.745.718
28.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	565.514.807
29.	Program Penanganan Bencana	352.666.796
30.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	65.999.569
31.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	58.999.407
32.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	3.825.333.148
33.	Program Penempatan Tenaga Kerja	344.997.572
34.	Program Hubungan Industrial	170.998.148
35.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	563.988.009
36.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	113.871.862
37.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	125.648.650
38.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	108.417.096
39.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.248.777.632
40.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	108.862.962
41.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	166.501.780
42.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	453.074.504
43.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	37.108.465

No.	Program	Jumlah (Rp)
44.	Program Penyuluhan Pertanian	95.401.130
45.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.071.683.119
46.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	403.362.719
47.	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	525.702.126
48.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	204.818.271
49.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	149.999.346
50.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	120.549.183
51.	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	40.170.261
52.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	229.546.776
53.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	119.999.485
54.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	78.743.106
55.	Program Pengelolaan Persampahan	15.765.703.880
56.	Program Pendaftaran Penduduk	190.420.176

No.	Program	Jumlah (Rp)
57.	Program Pencatatan Sipil	107.291.725
58.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	515.508.492
59.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	26.739.600
60.	Program Perlindungan Perempuan	36.764.500
61.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	206.399.300
62.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	60.036.536
63.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	160.298.100
64.	Program Perlindungan Khusus Anak	84.664.800
65.	Program Pengendalian Penduduk	348.599.143
66.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.847.339.699
67.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.793.446.936
68.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	4.442.661.290
69.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	3.388.304.358
70.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	3.197.164.490
71.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	398.877.203
72.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	782.211.735

No.	Program	Jumlah (Rp)
73.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	50.736.900
74.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	70.024.400
75.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	0
76.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	477.620.000
77.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	106.676.300
78.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	345.941.264
79.	Program Pengembangan UMKM	1.797.608.808
80.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	51.830.000
81.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	31.629.900
82.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	219.309.064
83.	Program Pengembangan Ekspor	142.527.400
84.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	262.736.988
85.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	272.927.250
86.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	642.481.536
87.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	34.892.400

No.	Program	Jumlah (Rp)
88.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	44.016.180
89.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	154.583.524
90.	Program Promosi Penanaman Modal	240.307.620
91.	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.074.375.540
92.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	329.546.846
93.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	241.745.384
94.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	705.810.011
95.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	11.522.121.958
96.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	562.883.650
97.	Program Pengembangan Kebudayaan	1.605.573.628
98.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	179.852.063
99.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	839.363.736
100.	Program Pengelolaan Permuseuman	275.539.600
101.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	4.278.905.830
102.	Program Pemasaran Pariwisata	1.619.228.820

No.	Program	Jumlah (Rp)
103.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	350.000.000
104.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	219.413.936
105.	Program Pembinaan Perpustakaan	937.815.620
106.	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	163.580.584
107.	Program Pengelolaan Arsip	442.281.330
108.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	118.664.572
109.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	89.999.425
110.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.910.289.599
111.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	5.975.838.460
112.	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.570.795.380
113.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dprd	10.805.734.464
114.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	490.937.416
115.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	572.376.096
116.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	734.721.716
117.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	29.181.402.811
118.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.679.210.908
119.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.260.300.192

No.	Program	Jumlah (Rp)
120.	Program Kepegawaian Daerah	1.870.641.278
121.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.716.327.613
122.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	556.719.728
123.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	740.301.000
124.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	324.665.404
125.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	978.410.000
126.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	23.757.312.438
127.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	258.025.514
128.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	907.115.530
129.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	7.085.956.896
130.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	20.205.151.996
131.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	689.248.500
132.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	185.414.300
Total Anggaran		1.744.478.228.310

UNIT PENGOLAH		
JABATAN	PARAF	TGL
	<i>[Signature]</i>	
	<i>[Signature]</i>	
PARAF KOREKSI		
JABATAN	PARAF	TGL
	<i>[Signature]</i>	
	<i>[Signature]</i>	

Cirebon, Oktober 2024

Wakil Wali Kota Cirebon

[Signature]

AGUS MULYADI, M.Si



PEMERINTAHAN KOTA CIREBON



LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)

TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.637.782.303.140,00	1.554.837.161.527,00	94,94	1.457.195.241.975,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	653.938.370.148,00	559.033.085.899,00	85,49	532.653.850.484,00
4.1.01	Pajak Daerah	281.507.565.359,00	226.058.293.884,00	80,30	217.861.895.888,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	20.402.775.949,00	20.438.885.680,00	100,18	19.375.024.062,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	20.071.781.402,00	20.238.594.601,00	100,83	19.071.147.052,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	20.071.781.402,00	20.238.594.601,00	100,83	19.071.147.052,00
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	201.119.901,00	188.107.932,00	93,53	187.640.694,00
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	201.119.901,00	188.107.932,00	93,53	187.640.694,00
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	129.874.646,00	12.183.147,00	9,38	116.236.316,00
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	129.874.646,00	12.183.147,00	9,38	116.236.316,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	80.993.498.382,00	69.386.168.017,00	85,67	64.995.600.322,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	56.371.246.073,00	47.716.432.636,00	84,65	45.000.732.363,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	56.371.246.073,00	47.716.432.636,00	84,65	45.000.732.363,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	8.543.186.163,00	7.033.317.014,00	82,33	6.498.579.556,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	8.543.186.163,00	7.033.317.014,00	82,33	6.498.579.556,00
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	11.477.883.485,00	10.205.390.131,00	88,91	9.768.362.448,00
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	11.477.883.485,00	10.205.390.131,00	88,91	9.768.362.448,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	4.601.182.661,00	4.431.028.236,00	96,30	3.727.925.955,00
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	4.601.182.661,00	4.431.028.236,00	96,30	3.727.925.955,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	15.052.192.776,00	8.709.584.669,00	57,86	8.067.424.308,00
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	11.803.745.625,00	5.084.884.602,00	43,08	4.350.478.373,00
4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film	11.803.745.625,00	5.084.884.602,00	43,08	4.350.478.373,00
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	16.055.769,00	17.243.500,00	107,40	234.797.228,00
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	16.055.769,00	17.243.500,00	107,40	234.797.228,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	837.539.850,00	751.042.106,00	89,67	588.998.204,00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	837.539.850,00	751.042.106,00	89,67	588.998.204,00
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	41.027.565,00	86.411.626,00	210,62	45.706.840,00
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	41.027.565,00	86.411.626,00	210,62	45.706.840,00
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	2.092.464.929,00	2.346.826.024,00	112,16	2.612.936.644,00
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	2.092.464.929,00	2.346.826.024,00	112,16	2.612.936.644,00
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	261.359.038,00	423.176.811,00	161,91	234.507.019,00
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	261.359.038,00	423.176.811,00	161,91	234.507.019,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	7.333.511.947,00	7.053.876.856,00	96,19	5.540.049.311,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	6.147.574.359,00	5.794.989.175,00	94,26	4.731.072.831,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	6.147.574.359,00	5.794.989.175,00	94,26	4.731.072.831,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	978.013.532,00	883.993.900,00	90,39	708.440.250,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	978.013.532,00	883.993.900,00	90,39	708.440.250,00
4.1.01.09.04	Pajak Reklame Selebaran	57.039.125,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.09.04.0001	Pajak Reklame Selebaran	57.039.125,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	150.884.931,00	191.143.781,00	126,68	100.536.230,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	150.884.931,00	191.143.781,00	126,68	100.536.230,00
4.1.01.09.10	Pajak Reklame Peragaan	0,00	183.750.000,00	0,00	0,00
4.1.01.09.10.0001	Pajak Reklame Peragaan	0,00	183.750.000,00	0,00	0,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	31.565.462.586,00	38.135.923.788,00	120,82	27.474.574.354,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	31.565.462.586,00	38.135.923.788,00	120,82	27.474.574.354,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	31.565.462.586,00	38.135.923.788,00	120,82	27.474.574.354,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	4.079.291.143,00	2.400.143.212,00	58,84	4.867.181.826,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	4.079.291.143,00	2.400.143.212,00	58,84	4.867.181.826,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	4.079.291.143,00	2.400.143.212,00	58,84	4.867.181.826,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	64.262.767,00	122.939.022,00	191,31	59.327.648,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	64.262.767,00	122.939.022,00	191,31	59.327.648,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	64.262.767,00	122.939.022,00	191,31	59.327.648,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	70.421.248.093,00	48.883.174.095,00	69,42	35.435.642.763,00
4.1.01.15.01	PBBP2	70.421.248.093,00	48.883.174.095,00	69,42	35.435.642.763,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	70.421.248.093,00	48.883.174.095,00	69,42	35.435.642.763,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	51.595.321.716,00	30.927.598.545,00	59,94	52.047.071.294,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	51.595.321.716,00	30.927.598.545,00	59,94	52.047.071.294,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	51.595.321.716,00	30.927.598.545,00	59,94	52.047.071.294,00
4.1.02	Retribusi Daerah	329.481.994.624,00	317.053.093.456,00	96,23	11.408.967.314,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	325.095.776.249,00	312.784.325.095,00	96,21	8.291.829.498,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	316.432.927.899,00	305.264.222.751,00	96,47	11.045.000,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	26.310.547.899,00	25.823.193.612,00	98,15	0,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	290.072.380.000,00	279.425.969.139,00	96,33	0,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	50.000.000,00	15.060.000,00	30,12	11.045.000,00
4.1.02.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	0,00	0,00	0,00	82.935.000,00

4.1.02.01.03.0001	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurusan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat	0,00	0,00	0,00	82.935.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.637.073.350,00	2.774.522.000,00	59,83	2.635.382.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.637.073.350,00	2.774.522.000,00	59,83	2.635.382.000,00
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	1.727.351.896,00
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	1.727.351.896,00
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	91.250.000,00
4.1.02.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	91.250.000,00
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	102.241.600,00
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	0,00	0,00	0,00	102.241.600,00
4.1.02.01.14	Retribusi Pelayanan Kebersihan	4.025.775.000,00	4.745.580.344,00	117,88	3.641.624.002,00
4.1.02.01.14.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan	4.000.000.000,00	4.692.230.344,00	117,31	3.618.374.002,00
4.1.02.01.14.0002	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	14.925.000,00	24.900.000,00	166,83	23.250.000,00
4.1.02.01.14.0003	Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri	10.850.000,00	28.450.000,00	262,21	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.240.921.375,00	2.769.475.278,00	123,59	2.089.869.035,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	586.202.375,00	989.014.333,00	168,72	551.729.960,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	586.202.375,00	989.014.333,00	168,72	501.554.960,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	0,00	0,00	0,00	50.175.000,00
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	1.148.949.000,00	1.182.046.945,00	102,88	1.175.861.575,00
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	1.148.949.000,00	1.182.046.945,00	102,88	1.175.861.575,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	45.000.000,00	109.600.000,00	243,56	75.020.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	45.000.000,00	109.600.000,00	243,56	75.020.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	40.000.000,00	40.662.000,00	101,66	41.260.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	40.000.000,00	40.662.000,00	101,66	41.260.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	245.770.000,00	247.230.000,00	100,59	245.997.500,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	25.770.000,00	27.010.000,00	104,81	25.652.500,00
4.1.02.02.11.0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	180.000.000,00	180.200.000,00	100,11	180.000.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	40.000.000,00	40.020.000,00	100,05	40.345.000,00
4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	0,00	61.000.000,00	0,00	0,00
4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	0,00	61.000.000,00	0,00	0,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	175.000.000,00	139.922.000,00	79,96	0,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	175.000.000,00	139.922.000,00	79,96	0,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.145.297.000,00	1.499.293.083,00	69,89	1.027.268.781,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.335.000.000,00	1.096.399.083,00	82,13	1.027.268.781,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.335.000.000,00	1.096.399.083,00	82,13	1.027.268.781,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	810.297.000,00	402.894.000,00	49,72	0,00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	810.297.000,00	402.894.000,00	49,72	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.900.000.000,00	8.570.399.813,00	53,90	6.850.064.199,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	15.900.000.000,00	8.570.399.813,00	53,90	6.850.064.199,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.200.000.000,00	1.813.112.873,00	43,17	2.563.088.537,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.200.000.000,00	1.813.112.873,00	43,17	2.563.088.537,00
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.700.000.000,00	594.469.649,00	34,97	557.771.811,00
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.700.000.000,00	594.469.649,00	34,97	557.771.811,00
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	10.000.000.000,00	6.162.817.291,00	61,63	3.729.203.851,00
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	10.000.000.000,00	6.162.817.291,00	61,63	3.729.203.851,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	27.048.810.165,00	7.351.298.746,00	27,18	296.532.923.083,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	792.577.388,00	547.874.600,00	69,13	55.515.000,00
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	792.577.388,00	547.874.600,00	69,13	55.515.000,00
4.1.04.01.08.0001	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	300.000.000,00	68.325.800,00	22,78	13.915.000,00
4.1.04.01.08.0002	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	492.577.388,00	479.548.800,00	97,36	41.600.000,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	60.667.000,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	0,00	0,00	0,00	60.667.000,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	0,00	0,00	0,00	60.667.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	2.901.335.412,00	2.718.039.245,00	93,68	1.899.029.667,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.881.335.412,00	2.698.316.336,00	93,65	1.871.689.799,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.881.335.412,00	2.698.316.336,00	93,65	1.871.689.799,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	20.000.000,00	19.722.909,00	98,61	27.339.868,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	20.000.000,00	19.722.909,00	98,61	27.339.868,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	1.456.481.155,00	245.937.180,00	16,89	205.075.799,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.456.481.155,00	245.937.180,00	16,89	205.075.799,00

4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.456.481.155,00	245.937.180,00	16,89	205.075.799,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	100.000.000,00	94.965.210,00	94,97	108.647.046,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	100.000.000,00	94.965.210,00	94,97	108.647.046,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	100.000.000,00	94.965.210,00	94,97	108.647.046,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.710.233.465,00	15.797.021,00	0,58	66.198.000,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.710.233.465,00	15.797.021,00	0,58	66.198.000,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.710.233.465,00	15.797.021,00	0,58	66.198.000,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.904.692.982,00	1.375.559.825,00	72,22	1.343.975.260,00
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	50.026.956,00	15.387.146,00	30,76	7.925.747,00
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	50.026.956,00	15.387.146,00	30,76	7.925.747,00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	75.040.435,00	858.729.015,00	1.144,36	418.403.954,00
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	75.040.435,00	858.729.015,00	1.144,36	418.403.954,00
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	18.676.730,00	4.049.802,00	21,68	2.432.722,00
4.1.04.12.08.0001	Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film	18.676.730,00	4.049.802,00	21,68	2.432.722,00
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	45.024.261,00	48.257.590,00	107,18	85.486.740,00
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videootron/Megatron	45.024.261,00	48.257.590,00	107,18	85.486.740,00
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	46.691.826,00	5.716.540,00	12,24	8.450.505,00
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	46.691.826,00	5.716.540,00	12,24	8.450.505,00
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.667.565,00	270.542,00	16,22	700.934,00
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.667.565,00	270.542,00	16,22	700.934,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.667.565.209,00	443.149.190,00	26,57	820.574.658,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	1.667.565.209,00	443.149.190,00	26,57	820.574.658,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	2.053.657.852,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	2.053.657.852,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.13.02.0012	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	2.053.657.852,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	15.029.831.911,00	2.249.981.015,00	14,97	1.248.660.116,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	169.790.880,00	835.839.402,00	492,28	403.843.051,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	169.790.880,00	835.839.402,00	492,28	403.843.051,00
4.1.04.15.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	14.860.041.031,00	1.414.141.613,00	9,52	844.817.065,00
4.1.04.15.15.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	14.860.041.031,00	1.414.141.613,00	9,52	844.817.065,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	291.307.682.069,00
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	291.307.682.069,00
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	291.307.682.069,00
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	100.000.000,00	103.144.650,00	103,14	237.473.126,00
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	100.000.000,00	103.144.650,00	103,14	237.473.126,00
4.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	100.000.000,00	103.144.650,00	103,14	237.473.126,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	653.938.370.148,00	559.033.085.899,00	85,49	532.653.850.484,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	982.990.850.992,00	991.867.548.844,00	100,90	922.411.391.491,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	859.697.048.000,00	872.744.168.801,00	101,52	807.444.153.338,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	859.697.048.000,00	872.744.168.801,00	101,52	794.770.094.338,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	61.316.695.000,00	83.686.065.000,00	136,48	70.099.657.226,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.940.975.000,00	3.433.911.000,00	116,76	3.495.923.636,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	33.039.763.000,00	43.348.069.000,00	131,20	39.341.196.609,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	5.000.000.000,00	5.054.283.000,00	101,09	4.023.762.178,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	7.296.367.000,00	8.024.376.000,00	109,98	8.253.750.592,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	3.630.464.000,00	6.007.277.000,00	165,47	5.586.835.977,00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	1.200.000.000,00	1.420.943.000,00	118,41	1.269.887.063,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	6.605.990.000,00	14.710.341.000,00	222,68	6.237.632.811,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	466.978.000,00	550.707.000,00	117,93	347.792.599,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	30.892.000,00	30.892.000,00	100,00	61.192.550,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.105.266.000,00	1.105.266.000,00	100,00	1.481.683.211,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	605.434.282.000,00	606.158.280.000,00	100,12	559.232.958.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	605.434.282.000,00	606.158.280.000,00	100,12	559.232.958.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	29.427.211.000,00	28.244.349.486,00	95,98	25.648.122.847,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0,00	0,00	0,00	1.148.584.500,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	14.589.734.000,00	14.582.573.200,00	99,95	3.266.664.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.676.160.000,00	2.674.511.800,00	99,94	3.569.735.375,00
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	0,00	0,00	446.155.000,00
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	230.120.000,00	118.000.000,00	51,28	0,00
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	907.159.726,00
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	401.625.000,00	401.625.000,00	100,00	0,00

4.2.01.01.03.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00
4.2.01.01.03.0058	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	0,00	0,00	0,00	13.658.901.054,00
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	0,00	0,00	1.743.647.000,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	11.529.572.000,00	10.467.639.486,00	90,79	777.276.192,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	163.518.860.000,00	154.655.474.315,00	94,58	139.789.356.265,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	49.090.650.000,00	49.043.700.007,00	99,90	47.389.082.953,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	0,00	0,00	1.390.000.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	65.754.476.000,00	61.958.352.000,00	94,23	58.988.411.200,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.226.144.000,00	1.429.250.000,00	116,56	1.092.750.000,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.608.460.000,00	4.587.279.600,00	99,54	4.137.435.000,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	4.026.090.000,00	3.905.190.000,00	97,00	5.568.800.000,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	14.310.702.000,00	11.113.486.667,00	77,66	18.202.913.150,00
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	385.901.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	17.687.297.000,00	17.264.960.471,00	97,61	0,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.436.520.000,00	2.422.897.370,00	70,50	2.177.396.012,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	477.620.000,00	475.358.200,00	99,53	0,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	293.649.750,00
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	520.000.000,00	505.000.000,00	97,12	154.575.000,00
4.2.01.01.04.0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	0,00	0,00	0,00	394.343.200,00
4.2.01.01.04.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	1.680.000.000,00	1.635.000.000,00	97,32	0,00
4.2.01.01.04.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.04.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	225.000.000,00	225.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	859.697.048.000,00	872.744.168.801,00	101,52	794.770.094.338,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	12.674.059.000,00
4.2.01.02.01	DID	0,00	0,00	0,00	12.674.059.000,00
4.2.01.02.01.0001	DID	0,00	0,00	0,00	12.674.059.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	0,00	0,00	0,00	12.674.059.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	123.293.802.992,00	119.123.380.043,00	96,62	114.967.238.153,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	107.125.310.671,00	103.270.333.234,00	96,40	102.377.882.941,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	107.125.310.671,00	103.270.333.234,00	96,40	102.377.882.941,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	38.474.927.433,00	36.878.777.940,00	95,85	36.450.295.740,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	22.766.329.194,00	20.507.501.250,00	90,08	20.605.364.130,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	27.383.705.108,00	27.383.705.108,00	100,00	25.451.803.827,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	18.500.348.936,00	18.500.348.936,00	100,00	19.870.419.244,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	16.168.492.321,00	15.853.046.809,00	98,05	12.589.355.212,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	16.168.492.321,00	15.853.046.809,00	98,05	12.589.355.212,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	16.168.492.321,00	15.853.046.809,00	98,05	12.589.355.212,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	123.293.802.992,00	119.123.380.043,00	96,62	114.967.238.153,00
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	982.990.850.992,00	991.867.548.844,00	100,90	922.411.391.491,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	853.082.000,00	3.936.526.784,00	461,45	2.130.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	853.082.000,00	3.936.526.784,00	461,45	2.130.000.000,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	853.082.000,00	3.936.526.784,00	461,45	2.130.000.000,00
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	853.082.000,00	3.936.526.784,00	461,45	2.130.000.000,00
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	853.082.000,00	3.936.526.784,00	461,45	2.130.000.000,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	853.082.000,00	3.936.526.784,00	461,45	2.130.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.637.782.303.140,00	1.554.837.161.527,00	94,94	1.457.195.241.975,00
5	BELANJA DAERAH	1.737.285.680.512,00	1.581.403.514.302,00	91,03	1.444.792.084.073,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.565.881.653.107,00	1.448.287.609.385,00	92,49	1.345.404.690.783,00
5.1.01	Belanja Pegawai	777.466.978.400,00	717.083.685.121,00	92,23	666.258.493.164,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	402.953.074.306,00	364.923.401.215,00	90,56	317.596.240.720,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	286.871.383.891,00	270.894.128.313,00	94,43	232.317.234.934,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	228.425.967.148,00	223.767.311.378,00	97,96	217.552.675.318,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	58.445.416.743,00	47.126.816.935,00	80,63	14.764.559.616,00
5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	25.818.933.936,00	24.133.806.038,00	93,47	20.853.414.752,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	20.740.867.204,00	20.394.760.418,00	98,33	19.702.349.762,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.078.066.732,00	3.739.045.620,00	73,63	1.151.064.990,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.573.377.935,00	6.197.157.750,00	94,28	6.437.450.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.573.377.935,00	6.197.157.750,00	94,28	6.437.450.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	24.342.447.198,00	21.492.704.635,00	88,29	18.458.955.500,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	17.874.194.928,00	16.605.903.635,00	92,90	16.864.179.500,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	6.468.252.270,00	4.886.801.000,00	75,55	1.594.776.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.348.567.092,00	2.256.293.500,00	96,07	2.578.026.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.348.567.092,00	2.256.293.500,00	96,07	2.578.026.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	14.562.637.733,00	13.598.375.820,00	93,38	12.472.388.236,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	11.089.721.622,00	10.936.578.720,00	98,62	11.519.231.738,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.472.916.111,00	2.661.797.100,00	76,64	953.156.498,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.088.219.842,00	2.167.238.566,00	26,80	1.720.717.751,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.788.219.842,00	2.167.238.566,00	27,83	1.720.717.751,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00

5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	13.077.854,00	3.548.281,00	27,13	3.068.521,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12.023.675,00	2.941.157,00	24,46	2.920.180,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.054.179,00	607.124,00	57,59	148.341,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	30.203.766.053,00	21.955.936.489,00	72,69	20.843.745.938,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	27.363.174.276,00	19.913.706.787,00	72,78	20.132.781.989,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.840.591.777,00	2.042.229.702,00	71,89	710.963.949,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	730.039.030,00	556.171.115,00	76,18	477.809.712,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	580.570.664,00	458.344.805,00	78,95	445.577.690,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	149.468.366,00	97.826.310,00	65,45	32.232.022,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.152.940.938,00	1.668.040.708,00	77,48	1.433.429.376,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.742.033.382,00	1.374.939.893,00	78,93	1.336.737.214,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	410.907.556,00	293.100.815,00	71,33	96.692.162,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.247.682.804,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.113.124.956,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	134.557.848,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	204.171.396.137,00	196.123.074.761,00	96,06	199.835.202.538,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	204.171.396.137,00	196.123.074.761,00	96,06	199.835.202.538,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	201.164.366.137,00	193.116.942.113,00	96,00	197.104.347.465,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	3.007.030.000,00	3.006.132.648,00	99,97	2.730.855.073,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	82.164.882.765,00	74.290.498.937,00	90,42	72.361.191.946,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	9.875.061.889,00	5.693.070.425,00	57,65	10.284.315.550,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	1.020.138.797,00	1.020.138.797,00	100,00	913.012.500,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	2.834.772.443,00	2.834.772.443,00	100,00	3.080.482.402,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	150.521.928,00	0,00	0,00	477.609.639,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	366.675.597,00	256.672.918,00	70,00	221.235.000,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	1.578.273.129,00	1.578.273.129,00	100,00	1.312.500.000,00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	40.792.911,00	0,00	0,00	187.687.500,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	3.213.138,00	3.213.138,00	100,00	2.767.500,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	2.816.849.924,00	0,00	0,00	1.788.196.009,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.063.824.022,00	0,00	0,00	2.300.825.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	928.222.587,00	304.035.950,00	32,75	308.516.201,00
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	275.808.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	150.000.000,00
5.1.01.03.02.0003	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi ASN	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	231.853.668,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00
5.1.01.03.02.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00
5.1.01.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	3.375.000,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	38.060.119,00	32.300.000,00	84,87	2.243.750,00
5.1.01.03.02.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	57.447.450,00	57.447.450,00	100,00	57.447.451,00
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	2.250.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	12.288.500,00	12.288.500,00	100,00	10.000.000,00
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	66.750.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0032	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	40.514.850,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	65.754.476.000,00	63.382.143.200,00	96,39	57.826.105.400,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	65.754.476.000,00	63.382.143.200,00	96,39	57.826.105.400,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.296.364.000,00	1.283.000.000,00	98,97	1.022.500.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.296.364.000,00	1.283.000.000,00	98,97	1.022.500.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.413.794.000,00	2.093.320.362,00	86,72	1.820.043.674,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.413.794.000,00	2.093.320.362,00	86,72	1.820.043.674,00

5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.896.964.289,00	1.534.929.000,00	80,92	1.099.711.121,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	950.955.953,00	786.593.000,00	82,72	691.699.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	946.008.336,00	748.336.000,00	79,10	408.012.121,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	34.948.304.710,00	29.798.084.009,00	85,26	29.640.029.076,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000,00	781.305.000,00	99,91	772.630.792,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000,00	781.305.000,00	99,91	772.630.792,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	76.528.200,00	73.430.700,00	95,95	74.953.200,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	76.528.200,00	73.430.700,00	95,95	74.953.200,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	108.485.160,00	88.207.560,00	81,31	91.249.200,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	108.485.160,00	88.207.560,00	81,31	91.249.200,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	78.204.000,00	66.958.500,00	85,62	66.402.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	78.204.000,00	66.958.500,00	85,62	66.402.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00	1.132.892.250,00	99,91	1.120.255.500,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00	1.132.892.250,00	99,91	1.120.255.500,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	394.992.000,00	334.500.000,00	84,69	340.500.000,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	394.992.000,00	334.500.000,00	84,69	340.500.000,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	491.738.350,00	275.450.650,00	56,02	313.333.500,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	491.738.350,00	275.450.650,00	56,02	313.333.500,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.145.000.000,00	4.410.000.000,00	85,71	4.369.575.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.145.000.000,00	4.410.000.000,00	85,71	4.369.575.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000,00	735.000.000,00	66,67	1.083.075.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000,00	735.000.000,00	66,67	1.083.075.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	4.531.226,00	960.986,00	21,21	3.940.058,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	4.531.226,00	960.986,00	21,21	3.940.058,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	42.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	42.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	17.180.590.984,00	14.669.878.363,00	85,39	14.559.804.826,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	115.170.262,00	68.124.294,00	59,15	67.815.594,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.876.896,00	1.607.004,00	85,62	1.597.428,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	5.630.688,00	4.821.012,00	85,62	4.792.284,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	17.057.913.138,00	14.595.326.053,00	85,56	14.485.599.520,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	8.112.000.000,00	6.962.800.000,00	85,83	6.830.135.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	8.112.000.000,00	6.962.800.000,00	85,83	6.830.135.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	337.694.790,00	266.700.000,00	78,98	14.175.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	337.694.790,00	266.700.000,00	78,98	14.175.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	159.382.520,00	0,00	0,00	164.819.036,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.919.000,00	0,00	0,00	52.500.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.919.000,00	0,00	0,00	52.500.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.054.000,00	0,00	0,00	5.754.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.054.000,00	0,00	0,00	5.754.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	84.240.000,00	0,00	0,00	94.500.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	84.240.000,00	0,00	0,00	94.500.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.070.000,00	0,00	0,00	4.200.360,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.070.000,00	0,00	0,00	4.200.360,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.666.000,00	0,00	0,00	2.231.356,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.666.000,00	0,00	0,00	2.231.356,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.000,00	0,00	0,00	1.720,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.000,00	0,00	0,00	1.720,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.808.520,00	0,00	0,00	5.202.480,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.808.520,00	0,00	0,00	5.202.480,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	194.000,00	0,00	0,00	107.280,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	194.000,00	0,00	0,00	107.280,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	429.000,00	0,00	0,00	321.840,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	429.000,00	0,00	0,00	321.840,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	974.100.000,00	836.750.000,00	85,90	807.231.343,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	974.100.000,00	836.750.000,00	85,90	807.231.343,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	974.100.000,00	836.750.000,00	85,90	807.231.343,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	52.095.837.962,00	51.111.876.199,00	98,11	45.853.778.505,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	52.095.837.962,00	51.111.876.199,00	98,11	45.853.778.505,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	52.095.837.962,00	51.111.876.199,00	98,11	45.853.778.505,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	717.290.266.397,00	661.041.742.133,00	92,16	617.287.816.179,00
5.1.02.01	Belanja Barang	109.299.562.807,00	96.147.865.371,00	87,97	86.084.503.098,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	108.959.290.067,00	95.834.114.371,00	87,95	86.029.622.738,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	7.309.279.566,00	6.452.127.606,00	88,27	2.708.635.396,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	81.573.900,00	78.415.000,00	96,13	52.815.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.904.810.018,00	5.091.576.282,00	86,23	1.687.651.518,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	93.410.550,00	93.325.250,00	99,91	37.975.510,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	34.559.705,00	34.389.100,00	99,51	86.270.900,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	127.534.000,00	114.066.000,00	89,44	14.558.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	227.109.800,00	128.732.356,00	56,68	167.895.100,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	239.932.400,00	210.665.500,00	87,80	130.111.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.759.428.804,00	267.851.300,00	9,71	145.565.600,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	427.848.240,00	250.287.150,00	58,50	150.362.109,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	917.200,00	917.200,00	100,00	1.954.000,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	21.750,00	21.750,00	100,00	120.046.200,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	370.000,00
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	0,00	0,00	323.960,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	68.557.568,00	64.625.000,00	94,26	83.825.300,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	21.770.550,00	16.245.000,00	74,62	6.539.000,00

5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.458.850,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.035.817.549,00	6.315.383.981,00	89,76	5.860.122.084,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.275.231.606,00	5.296.101.115,00	84,40	4.889.225.708,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	99.744.000,00	98.941.000,00	99,19	62.152.950,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	241.244.000,00	217.348.300,00	90,09	169.506.000,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00	0,00	16.398.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.384.063.800,00	4.175.237.389,00	95,24	2.479.180.150,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.135.424.028,00	2.033.171.899,00	95,21	1.966.818.448,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.597.127.834,00	1.462.164.247,00	91,55	1.354.504.157,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	3.867.636.790,00	3.590.125.079,00	92,82	4.813.578.257,00
5.1.02.01.01.0033	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	6.551.520,00	6.535.200,00	99,75	4.205.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	394.895.100,00	371.635.000,00	94,11	670.338.750,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	2.134.155.685,00	2.056.264.000,00	96,35	1.575.976.100,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	908.057.344,00	826.944.080,00	91,07	284.490.600,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.835.137.490,00	4.802.399.501,00	99,32	2.480.857.971,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.203.585.612,00	2.068.970.172,00	93,89	848.791.966,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.676.801.775,00	1.525.377.854,00	90,97	801.587.400,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	10.517.424.305,00	10.009.123.000,00	95,17	15.803.137.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.297.574.172,00	2.164.903.124,00	94,23	2.967.406.666,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	904.867.206,00	894.867.200,00	98,89	148.139.200,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	0,00	0,00	541.029.125,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.770.444.000,00	24.473.050.975,00	85,06	21.669.518.271,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.671.465.000,00	6.218.209.861,00	93,21	5.176.585.392,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	2.022.630.000,00	2.003.160.000,00	99,04	2.007.878.400,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	17.400.000,00	25.740.000,00	147,93	1.427.400.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	167.375.000,00	156.000.000,00	93,20	385.000.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	133.500.000,00	133.150.000,00	99,74	133.250.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	175.615.000,00	161.700.000,00	92,08	161.700.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	376.980.000,00	366.100.000,00	97,11	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	416.532.000,00	304.890.000,00	73,20	62.039.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	130.390.000,00	115.817.000,00	88,82	101.383.500,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	304.880.000,00	295.675.000,00	96,98	287.875.000,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	0,00	0,00	0,00	282.109.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	210.046.200,00	207.565.400,00	98,82	328.024.700,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	455.822.500,00	415.769.500,00	91,21	441.178.500,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	294.116.500,00	238.550.000,00	81,11	416.878.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	101.017.740,00	89.749.000,00	88,84	54.880.360,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	88.382.840,00	80.779.000,00	91,40	15.449.400,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	1.530.000,00	1.530.000,00	100,00	38.917.960,00
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	11.104.900,00	7.440.000,00	67,00	513.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	239.255.000,00	224.002.000,00	93,62	0,00
5.1.02.01.04.0404	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	99.000.000,00	98.750.000,00	99,75	0,00
5.1.02.01.04.0405	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.04.0447	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker	3.255.000,00	3.252.000,00	99,91	0,00
5.1.02.01.04.0510	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	123.000.000,00	122.000.000,00	99,19	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	222.098.594.049,00	200.174.815.588,00	90,13	178.715.920.542,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	148.918.356.224,00	135.995.855.376,00	91,32	128.396.725.627,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.239.030.000,00	5.500.818.943,00	75,99	5.186.232.141,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10.861.702.000,00	9.981.861.420,00	91,90	9.068.694.100,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	745.549.000,00	436.994.000,00	58,61	283.860.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.015.700.000,00	1.003.150.000,00	98,76	899.690.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	42.719.000,00	28.068.000,00	65,70	37.770.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	73.411.000,00	69.798.000,00	95,08	206.000.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	1.191.288.000,00	1.191.288.000,00	100,00	1.315.200.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	432.276.000,00	367.352.000,00	84,98	448.821.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	857.257.000,00	780.090.600,00	91,00	276.209.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	7.459.820.236,00	7.252.921.016,00	97,23	1.895.755.279,00

5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	341.520.000,00	291.510.000,00	85,36	15.200.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	26.568.000,00	26.568.000,00	100,00	138.432.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	156.414.000,00	122.354.000,00	78,22	127.300.000,00
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	5.226.000,00	5.200.000,00	99,50	14.999.500,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	336.285.000,00	278.250.000,00	82,74	0,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	574.922.000,00	574.922.000,00	100,00	643.754.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	145.076.000,00	114.780.000,00	79,12	80.950.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	29.198.330.200,00	28.672.473.689,00	98,20	32.431.701.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	177.431.000,00	158.321.000,00	89,23	115.214.565,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.899.579.500,00	3.507.846.607,00	89,95	2.378.477.803,50
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7.853.679.858,00	6.638.331.338,00	84,53	9.199.555.221,50
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	17.808.827.000,00	17.795.499.000,00	99,93	15.367.488.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	11.867.333.000,00	11.731.429.000,00	98,85	10.970.200.000,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	57.888.000,00	57.888.000,00	100,00	27.600.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.271.008.000,00	1.270.216.000,00	99,94	1.204.960.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	122.494.000,00	112.441.194,00	91,79	120.086.953,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.093.415.000,00	1.088.697.000,00	99,57	832.335.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	5.160.000,00	5.160.000,00	100,00	10.464.800,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	10.000.000,00	6.748.800,00	67,49	0,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	37.271.000,00	37.271.000,00	100,00	35.190.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	60.508.000,00	54.859.000,00	90,66	53.500.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	6.626.981.996,00	4.233.811.496,00	63,89	3.500.305.720,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	96.670.000,00	86.635.000,00	89,62	205.586.799,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	7.171.000,00	5.315.000,00	74,12	2.400.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	24.659.000,00	24.295.000,00	98,52	16.835.000,00
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	945.241.000,00	596.079.810,00	63,06	299.211.600,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	8.711.835.200,00	7.774.440.250,00	89,24	7.413.446.500,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	511.383.880,00	275.241.946,00	53,82	284.415.833,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.342.801.214,00	1.039.079.924,00	77,38	1.100.943.745,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	18.124.139.026,00	16.526.692.815,00	91,19	16.375.254.512,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.438.012.000,00	2.168.168.500,00	88,93	2.158.682.500,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.708.126.005,00	3.325.105.597,00	89,67	2.831.355.117,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	28.935.000,00	18.774.240,00	64,88	12.063.500,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	36.682.000,00	31.715.400,00	86,46	84.052.440,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	110.976.000,00	110.488.000,00	99,56	95.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.194.540.109,00	586.459.142,00	49,09	506.156.568,00
5.1.02.02.01.0070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	34.650.000,00	27.000.000,00	77,92	23.793.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	7.865.000,00	3.445.649,00	43,81	1.582.430,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	38.759.983.664,00	37.955.066.603,00	97,92	32.111.632.362,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	31.699.150.000,00	31.699.150.000,00	100,00	26.309.311.788,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	3.554.503.566,00	3.061.721.800,00	86,14	2.723.428.512,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.350.111.051,00	1.241.417.931,00	91,95	1.242.166.174,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	411.231.374,00	390.622.569,90	94,99	386.546.491,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	513.511.098,00	487.417.956,10	94,92	483.006.332,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	1.231.476.575,00	1.074.736.346,00	87,27	967.173.065,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
5.1.02.02.03.0018	Belanja Sewa Tanah Lapangan Parkir	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.080.737.861,00	6.349.503.200,00	78,58	6.572.131.720,00
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	25.984.000,00	25.984.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0009	Belanja Sewa Loader	79.248.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	129.814.000,00	45.884.000,00	35,35	11.912.250,00
5.1.02.02.04.0014	Belanja Sewa Floating Excavator	0,00	0,00	0,00	8.370.000,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	179.283.061,00	89.324.000,00	49,82	72.128.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.166.559.000,00	2.536.208.500,00	80,09	2.842.838.420,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	11.691.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	3.684.286.800,00	2.860.233.800,00	77,63	2.746.245.250,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	815.563.000,00	791.868.900,00	97,09	878.946.800,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	25.666.228.300,00	19.231.910.501,00	74,93	11.306.234.033,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.566.013.500,00	4.425.605.000,00	79,51	3.339.574.500,00
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	7.697.000,00	7.697.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	63.193.000,00	46.860.313,00	74,15	4.635.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	20.029.324.800,00	14.751.748.188,00	73,65	7.962.024.533,00
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	173.288.000,00	168.700.000,00	97,35	289.196.800,00
5.1.02.02.06.0006	Belanja Sewa Jalan Tol	0,00	0,00	0,00	19.466.800,00
5.1.02.02.06.0131	Belanja Sewa Jaringan Telepon Lainnya	173.288.000,00	168.700.000,00	97,35	269.730.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	500.000.000,00	473.779.908,00	94,76	0,00
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	380.000.000,00	374.706.858,00	98,61	0,00
5.1.02.02.08.0034	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	120.000.000,00	99.073.050,00	82,56	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	44.586.329.133,00	38.989.110.467,00	87,45	52.589.512.940,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.527.514.660,00	14.970.967.428,00	85,41	16.004.719.414,00
5.1.02.03.02.0001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	468.000.000,00	233.500.000,00	49,89	233.250.000,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	187.200.000,00	124.500.000,00	66,51	138.142.000,00
5.1.02.03.02.0006	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Asphalt Equipment	259.000.000,00	105.249.720,00	40,64	0,00

5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	84.500.000,00	84.000.000,00	99,41	0,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00	21.540.000,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	9.544.000,00	9.126.000,00	95,62	0,00
5.1.02.03.02.0025	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	29.321.000,00	28.116.000,00	95,89	450.000,00
5.1.02.03.02.0027	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	72.605.000,00	60.317.300,00	83,08	48.279.500,00
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	84.500.000,00	84.400.000,00	99,88	116.703.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6.290.312.060,00	5.446.175.337,00	86,58	5.784.985.854,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	127.500.000,00	75.667.323,00	59,35	0,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	4.783.775.000,00	4.263.974.790,00	89,13	3.637.093.167,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.372.003.600,00	1.079.460.863,00	78,68	551.780.643,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	92.050.000,00	86.266.000,00	93,72	97.101.000,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	264.480.000,00	244.313.750,00	92,38	2.453.639.040,00
5.1.02.03.02.0044	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	198.250.000,00	197.550.000,00	99,65	198.315.000,00
5.1.02.03.02.0061	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	58.320.000,00	55.246.630,00	94,73	99.066.400,00
5.1.02.03.02.0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	77.152.000,00	69.559.000,00	90,16	92.130.713,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	100.864.000,00	94.039.960,00	93,23	65.700.000,00
5.1.02.03.02.0105	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen	10.490.000,00	8.464.000,00	80,69	124.800,00
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	630.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0114	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	0,00	0,00	0,00	22.450.000,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	0,00	0,00	34.920.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	157.234.000,00	135.900.000,00	86,43	26.015.000,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	11.648.000,00	11.648.000,00	100,00	66.015.000,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	655.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.368.212.000,00	1.270.799.963,00	92,88	1.038.499.270,00
5.1.02.03.02.0122	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	30.170.000,00	16.187.480,00	53,65	8.682.300,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	19.180.000,00	18.674.736,00	97,37	119.497.653,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	595.000,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	54.014.000,00	16.923.000,00	31,33	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	700.749.000,00	605.256.125,00	86,37	819.776.627,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	6.725.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	226.236.000,00	224.976.000,00	99,44	214.723.072,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	389.575.000,00	320.675.451,00	82,31	107.864.375,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Bangunan	7.260.080.394,00	6.697.503.932,00	92,25	12.707.871.386,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.594.430.078,00	2.562.205.781,00	98,76	7.952.140.931,00
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	175.371.000,00	174.308.000,00	99,39	460.724.626,00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	3.836.944.816,00	3.311.692.584,00	86,31	4.012.427.572,00
5.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	653.334.500,00	649.297.567,00	99,38	242.578.257,00
5.1.02.03.03.0054	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	19.798.734.079,00	17.320.639.107,00	87,48	23.876.922.140,00
5.1.02.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	0,00	0,00	0,00	1.090.756.480,00
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	12.498.869.374,00	12.058.552.033,00	96,48	18.199.885.738,00

5.1.02.03.04.0014	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota	109.783.200,00	108.606.000,00	98,93	0,00
5.1.02.03.04.0068	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	975.438.698,00	468.717.124,00	48,05	0,00
5.1.02.03.04.0069	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	3.728.606.161,00	3.314.914.500,00	88,90	4.516.684.922,00
5.1.02.03.04.0071	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	1.261.511.435,00	401.558.849,00	31,83	0,00
5.1.02.03.04.0074	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	1.206.762.711,00	950.530.601,00	78,77	0,00
5.1.02.03.04.0077	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam	17.762.500,00	17.760.000,00	99,99	0,00
5.1.02.03.04.0122	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	0,00	0,00	0,00	69.595.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	25.894.564.810,00	20.215.312.656,00	78,07	23.009.802.986,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.894.564.810,00	20.215.312.656,00	78,07	22.919.133.548,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.756.632.500,00	12.781.254.017,00	76,28	9.576.771.539,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	2.073.576.310,00	1.246.105.139,00	60,09	676.595.517,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.064.356.000,00	6.187.953.500,00	87,59	12.535.492.373,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	98.865.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00	31.409.119,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	90.669.438,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa€“Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	90.669.438,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.721.234.000,00	2.591.831.000,00	95,24	1.414.621.500,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.721.234.000,00	2.591.831.000,00	95,24	1.414.621.500,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.690.271.000,00	1.629.150.000,00	96,38	1.127.431.500,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	50.341.000,00	50.341.000,00	100,00	12.000.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	580.622.000,00	512.340.000,00	88,24	275.190.000,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	47.215.081.012,00	47.132.356.009,00	99,82	45.790.071.872,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	47.215.081.012,00	47.132.356.009,00	99,82	45.790.071.872,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	47.215.081.012,00	47.132.356.009,00	99,82	45.790.071.872,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	14.846.865.750,00	13.970.228.320,00	94,10	0,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	14.846.865.750,00	13.970.228.320,00	94,10	0,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	14.846.865.750,00	13.970.228.320,00	94,10	0,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	250.628.034.836,00	241.820.222.722,00	96,49	229.683.383.241,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	250.628.034.836,00	241.820.222.722,00	96,49	229.683.383.241,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	250.628.034.836,00	241.820.222.722,00	96,49	229.683.383.241,00
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	809.375.001,00
5.1.03.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00	0,00	809.375.001,00
5.1.03.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	809.375.001,00
5.1.03.03.04.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	809.375.001,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.900.000.000,00	1.858.030.479,00	97,79	1.350.000.000,00
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.900.000.000,00	1.858.030.479,00	97,79	1.350.000.000,00
5.1.04.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.900.000.000,00	1.858.030.479,00	97,79	1.350.000.000,00
5.1.04.02.02.0001	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.900.000.000,00	1.858.030.479,00	97,79	1.350.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	65.059.408.310,00	64.194.151.652,00	98,67	59.341.506.439,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	5.950.000.000,00	5.950.000.000,00	100,00	1.950.000.000,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	5.950.000.000,00	5.950.000.000,00	100,00	1.950.000.000,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	5.950.000.000,00	5.950.000.000,00	100,00	1.950.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	47.767.360.810,00	46.965.373.554,00	98,32	46.543.279.326,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	28.092.248.960,00	28.091.522.254,00	100,00	14.937.200.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	28.092.248.960,00	28.091.522.254,00	100,00	14.937.200.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	11.968.050.000,00	11.512.469.600,00	96,19	22.887.467.640,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	11.968.050.000,00	11.512.469.600,00	96,19	22.887.467.640,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.707.061.850,00	7.361.381.700,00	95,51	8.718.611.686,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.707.061.850,00	7.361.381.700,00	95,51	8.718.611.686,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	9.661.500.000,00	9.625.371.238,00	99,63	9.235.599.413,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	9.661.500.000,00	9.625.371.238,00	99,63	9.235.599.413,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	9.661.500.000,00	9.625.371.238,00	99,63	9.235.599.413,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.680.547.500,00	1.653.406.860,00	98,39	1.612.627.700,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.680.547.500,00	1.653.406.860,00	98,39	1.612.627.700,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.680.547.500,00	1.653.406.860,00	98,39	1.612.627.700,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.165.000.000,00	4.110.000.000,00	98,68	357.500.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	4.165.000.000,00	4.110.000.000,00	98,68	357.500.000,00

5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	4.165.000.000,00	4.110.000.000,00	98,68	357.500.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	4.165.000.000,00	4.110.000.000,00	98,68	357.500.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.565.881.653.107,00	1.448.287.609.385,00	92,49	1.345.404.690.783,00
5.2	BELANJA MODAL	150.124.346.326,00	127.030.325.736,00	84,62	92.790.771.193,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	945.000.126,00	457.500.000,00	48,41	0,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	945.000.126,00	457.500.000,00	48,41	0,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	945.000.126,00	457.500.000,00	48,41	0,00
5.2.01.01.01.0001	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	126,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.01.01.0006	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	195.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	750.000.000,00	457.500.000,00	61,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.731.588.935,00	66.965.119.218,00	87,27	53.836.058.442,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	180.015.448,00	156.880.978,00	87,15	66.070.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	180.015.448,00	156.880.978,00	87,15	66.070.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	99.112.000,00	82.778.000,00	83,52	8.865.000,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	80.903.448,00	74.102.978,00	91,59	57.205.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	5.679.545.480,00	5.346.684.500,00	94,14	1.728.224.285,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	5.542.911.080,00	5.233.458.500,00	94,42	1.608.790.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	650.000.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	3.220.000.000,00	2.933.000.000,00	91,09	838.000.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	926.585.600,00	909.188.500,00	98,12	32.390.000,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	108.643.000,00	106.300.000,00	97,84	88.400.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	254.300.000,00	254.000.000,00	99,88	0,00
5.2.02.02.01.0008	Belanja Modal Alat Angkutan Kereta Rel	35.628.480,00	34.170.000,00	95,91	0,00
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	997.754.000,00	996.800.000,00	99,90	0,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	103.634.400,00	80.426.000,00	77,61	119.434.285,00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	103.634.400,00	80.426.000,00	77,61	119.434.285,00
5.2.02.02.04	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	33.000.000,00	32.800.000,00	99,39	0,00
5.2.02.02.04.0003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	33.000.000,00	32.800.000,00	99,39	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	163.275.919,00	104.699.600,00	64,12	24.656.100,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	96.627.600,00	57.150.000,00	59,14	4.461.300,00
5.2.02.03.01.0001	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	96.627.600,00	57.150.000,00	59,14	0,00
5.2.02.03.01.0002	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	0,00	0,00	0,00	636.300,00
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	0,00	0,00	0,00	3.825.000,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	6.789.315,00	2.330.000,00	34,32	1.444.800,00
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	6.699.315,00	2.330.000,00	34,78	0,00
5.2.02.03.02.0012	Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam	0,00	0,00	0,00	1.444.800,00
5.2.02.03.02.0013	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	90.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	59.859.004,00	45.219.600,00	75,54	18.750.000,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	0,00	0,00	0,00	891.000,00
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	11.400.000,00	9.600.000,00	84,21	1.600.000,00
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	0,00	0,00	0,00	16.259.000,00
5.2.02.03.03.0011	Belanja Modal Anak Timbangan/Biara	35.132.800,00	24.116.400,00	68,64	0,00
5.2.02.03.03.0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	13.326.204,00	11.503.200,00	86,32	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	408.942.500,00	408.840.000,00	99,97	8.200.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	408.942.500,00	408.840.000,00	99,97	8.200.000,00
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	43.942.500,00	43.840.000,00	99,77	8.200.000,00
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	365.000.000,00	365.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.971.697.905,00	6.591.847.141,00	82,69	5.229.331.383,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.645.796.458,00	1.330.691.852,00	80,85	1.854.485.467,00
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	62.712.000,00	57.750.000,00	92,09	9.000.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	392.225.670,00	273.621.000,00	69,76	450.791.201,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.190.858.788,00	999.320.852,00	83,92	1.394.694.266,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.102.055.633,00	4.280.000.420,00	83,89	3.129.593.316,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.257.324.132,00	1.127.157.608,00	89,65	1.047.938.959,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	9.750.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1.261.913.920,00	1.052.985.100,00	83,44	603.947.097,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	78.507.650,00	75.960.000,00	96,75	48.561.600,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.278.308.283,00	1.799.749.312,00	78,99	1.133.000.660,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	226.001.648,00	224.148.400,00	99,18	286.395.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.223.845.814,00	981.154.869,00	80,17	245.252.600,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	201.593.614,00	125.836.869,00	62,42	63.005.600,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	44.891.600,00	43.100.000,00	96,01	0,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	743.312.500,00	628.955.000,00	84,62	175.697.400,00
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	234.048.100,00	183.263.000,00	78,30	6.549.600,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.044.164.564,00	2.960.938.300,00	97,27	1.374.445.501,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	947.247.864,00	922.581.300,00	97,40	1.262.549.501,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	157.284.000,00	156.150.000,00	99,28	1.016.309.500,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	679.840.000,00	670.900.000,00	98,68	94.685.000,00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	110.123.864,00	95.531.300,00	86,75	79.880.001,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	48.675.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	2.096.916.700,00	2.038.357.000,00	97,21	111.896.000,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	2.096.916.700,00	2.038.357.000,00	97,21	111.896.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	792.140.983,00	737.199.109,00	93,06	39.909.328.856,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	792.140.983,00	737.199.109,00	93,06	39.909.328.856,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	115.205.000,00	60.530.900,00	52,54	35.303.040.896,00
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	0,00	0,00	0,00	4.327.160.960,00

5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00
5.2.02.07.01.0008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	0,00	0,00	0,00	34.567.000,00
5.2.02.07.01.0014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	0,00	0,00	0,00	22.800.000,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	676.935.983,00	676.668.209,00	99,96	1.760.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	947.728.177,00	943.504.800,00	99,55	145.922.200,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	109.788.900,00	105.994.800,00	96,54	0,00
5.2.02.08.01.0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Kesehatan	50.669.100,00	48.100.000,00	94,93	0,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	56.925.000,00	55.700.000,00	97,85	0,00
5.2.02.08.01.0037	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik	2.194.800,00	2.194.800,00	100,00	0,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	27.288.600,00	26.860.000,00	98,43	124.921.200,00
5.2.02.08.03.0004	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	30.600,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.03.0010	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	27.258.000,00	26.860.000,00	98,54	76.321.200,00
5.2.02.08.03.0011	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga	0,00	0,00	0,00	41.775.000,00
5.2.02.08.03.0012	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:PKN	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	0,00	0,00	0,00	1.725.000,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.2.02.08.06	Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	6.150.000,00	6.150.000,00	100,00	0,00
5.2.02.08.06.0003	Belanja Modal Peralatan Hidrologi	6.150.000,00	6.150.000,00	100,00	0,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	804.500.677,00	804.500.000,00	100,00	0,00
5.2.02.08.07.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Penunjang	804.500.677,00	804.500.000,00	100,00	0,00
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0,00	0,00	0,00	21.001.000,00
5.2.02.08.08.0006	Belanja Modal Peralatan Umum	0,00	0,00	0,00	21.001.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	13.390.295.677,00	11.183.936.450,00	83,52	5.051.205.667,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	10.259.606.434,00	8.618.397.600,00	84,00	3.032.670.249,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	16.052.854,00	13.345.000,00	83,13	174.270.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	10.243.553.580,00	8.605.052.600,00	84,00	2.321.418.950,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	536.981.299,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.130.689.243,00	2.565.538.850,00	81,95	2.018.535.418,00
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	0,00	0,00	0,00	38.053.600,00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	418.381.680,00	402.734.900,00	96,26	753.150.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.842.161.724,00	1.371.791.950,00	74,47	638.308.899,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	342.300.839,00	263.167.000,00	76,88	383.480.620,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	527.845.000,00	527.845.000,00	100,00	205.542.299,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	771.065.720,00	756.896.333,00	98,16	296.000,00
5.2.02.13.03	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	771.065.720,00	756.896.333,00	98,16	296.000,00
5.2.02.13.03.0002	Belanja Modal Alat Pengolahan Air	771.065.720,00	756.896.333,00	98,16	296.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	111.900.000,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	0,00	0,00	0,00	111.900.000,00
5.2.02.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	0,00	0,00	0,00	106.900.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	204.800.000,00	198.946.500,00	97,14	49.500.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	204.800.000,00	198.946.500,00	97,14	49.500.000,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	204.800.000,00	198.946.500,00	97,14	49.500.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	15.529.900,00	14.800.000,00	95,30	132.978.450,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	15.529.900,00	14.800.000,00	95,30	132.978.450,00
5.2.02.19.01.0001	Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	5.529.900,00	5.500.000,00	99,46	114.192.000,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	10.000.000,00	9.300.000,00	93,00	15.986.450,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.178.319.152,00	4.133.260.152,00	98,92	0,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.178.319.152,00	4.133.260.152,00	98,92	0,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.178.319.152,00	4.133.260.152,00	98,92	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	38.984.067.510,00	33.426.685.355,00	85,74	0,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	38.984.067.510,00	33.426.685.355,00	85,74	0,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	38.984.067.510,00	33.426.685.355,00	85,74	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.253.880.474,00	35.762.073.628,00	80,81	22.024.728.830,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	31.980.104.474,00	30.354.386.628,00	94,92	22.024.728.830,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	31.480.128.424,00	29.870.595.928,00	94,89	22.024.728.830,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.969.050.735,00	4.905.625.051,00	82,18	11.473.004.908,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	5.662.840.489,00	5.164.807.877,00	91,21	0,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	0,00	0,00	30.407.922,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	19.552.615.200,00	19.529.235.000,00	99,88	10.507.066.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	14.250.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	295.622.000,00	270.928.000,00	91,65	0,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	499.976.050,00	483.790.700,00	96,76	0,00
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	499.976.050,00	483.790.700,00	96,76	0,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	12.273.776.000,00	5.407.687.000,00	44,06	0,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	12.273.776.000,00	5.407.687.000,00	44,06	0,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	12.273.776.000,00	5.407.687.000,00	44,06	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	24.189.911.416,00	19.895.322.040,00	82,25	12.096.608.000,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	16.447.541.323,00	12.213.361.800,00	74,26	957.696.000,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	16.447.541.323,00	12.213.361.800,00	74,26	957.696.000,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	16.447.541.323,00	12.213.361.800,00	74,26	957.696.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	7.727.370.093,00	7.667.197.240,00	99,22	5.159.693.000,00

5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	7.588.097.465,00	7.528.553.000,00	99,22	5.159.693.000,00
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	5.159.693.000,00
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	7.588.097.465,00	7.528.553.000,00	99,22	0,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	1.591.800,00	1.554.000,00	97,63	0,00
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.591.800,00	1.554.000,00	97,63	0,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	137.680.828,00	137.090.240,00	99,57	0,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	137.680.828,00	137.090.240,00	99,57	0,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	15.000.000,00	14.763.000,00	98,42	0,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	15.000.000,00	14.763.000,00	98,42	0,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	15.000.000,00	14.763.000,00	98,42	0,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00	5.979.219.000,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	0,00	0,00	0,00	5.979.219.000,00
5.2.04.04.01.0004	Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah	0,00	0,00	0,00	5.979.219.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.003.965.375,00	3.950.310.850,00	98,66	4.811.753.121,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	544.770.000,00	535.098.000,00	98,22	4.725.375.921,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	544.770.000,00	535.098.000,00	98,22	4.578.621.021,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	0,00	0,00	0,00	3.318.455.621,00
5.2.05.01.01.0002	Belanja Modal Buku Filsafat	0,00	0,00	0,00	12.790.000,00
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	0,00	0,00	0,00	41.755.900,00
5.2.05.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	0,00	0,00	0,00	47.345.800,00
5.2.05.01.01.0005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	0,00	0,00	0,00	100.129.700,00
5.2.05.01.01.0006	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	0,00	0,00	0,00	71.154.400,00
5.2.05.01.01.0008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	865.800,00
5.2.05.01.01.0011	Belanja Modal Buku Laporan	0,00	0,00	0,00	803.264.800,00
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	544.770.000,00	535.098.000,00	98,22	182.859.000,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	0,00	0,00	0,00	146.754.900,00
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	0,00	0,00	0,00	144.279.900,00
5.2.05.01.02.0002	Belanja Modal Bentuk Mikro (Microform)	0,00	0,00	0,00	2.475.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	198.084.620,00	184.934.300,00	93,36	44.143.200,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	198.084.620,00	184.934.300,00	93,36	44.143.200,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5.2.05.02.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	198.084.620,00	184.934.300,00	93,36	41.643.200,00
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00	28.364.000,00
5.2.05.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00	28.364.000,00
5.2.05.07.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00	28.364.000,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	13.870.000,00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	13.870.000,00
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	0,00	0,00	0,00	13.870.000,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.261.110.755,00	3.230.278.550,00	99,05	0,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.261.110.755,00	3.230.278.550,00	99,05	0,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.261.110.755,00	3.230.278.550,00	99,05	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	21.622.800,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	21.622.800,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	21.622.800,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	0,00	0,00	0,00	21.622.800,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	150.124.346.326,00	127.030.325.736,00	84,62	92.790.771.193,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	21.279.681.079,00	6.085.579.181,00	28,60	6.596.622.097,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	21.279.681.079,00	6.085.579.181,00	28,60	6.596.622.097,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	21.279.681.079,00	6.085.579.181,00	28,60	6.596.622.097,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	21.279.681.079,00	6.085.579.181,00	28,60	6.596.622.097,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	21.279.681.079,00	6.085.579.181,00	28,60	6.596.622.097,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	21.279.681.079,00	6.085.579.181,00	28,60	6.596.622.097,00
	JUMLAH BELANJA	1.737.285.680.512,00	1.581.403.514.302,00	91,03	1.444.792.084.073,00
	SURPLUS/DEFISIT	(99.503.377.372,00)	(26.566.352.775,00)	26,70	12.403.157.902,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	99.503.377.372,00	100.171.156.607,00	100,67	89.767.998.705,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	109.171.156.607,00	109.171.156.607,00	100,00	118.032.998.705,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	102.171.156.607,00	102.171.156.607,00	100,00	93.032.998.705,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	102.171.156.607,00	102.171.156.607,00	100,00	93.032.998.705,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	102.171.156.607,00	102.171.156.607,00	100,00	93.032.998.705,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	102.171.156.607,00	102.171.156.607,00	100,00	93.032.998.705,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00	25.000.000.000,00
6.1.04.03	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00	25.000.000.000,00
6.1.04.03.04	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00	25.000.000.000,00
6.1.04.03.04.0001	Pinjaman Daerah dari LKB-BUMD-Jangka Pendek	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00	25.000.000.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	109.171.156.607,00	109.171.156.607,00	100,00	118.032.998.705,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9.667.779.235,00	9.000.000.000,00	93,09	28.265.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.409.000.000,00	2.000.000.000,00	83,02	3.265.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.409.000.000,00	2.000.000.000,00	83,02	3.265.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.409.000.000,00	2.000.000.000,00	83,02	3.265.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.409.000.000,00	2.000.000.000,00	83,02	3.265.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	25.000.000.000,00

6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00	0,00	25.000.000.000,00
6.2.03.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	25.000.000.000,00
6.2.03.03.04.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	25.000.000.000,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	7.258.779.235,00	7.000.000.000,00	96,43	0,00
6.2.04.04	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN	7.258.779.235,00	7.000.000.000,00	96,43	0,00
6.2.04.04.01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN	7.258.779.235,00	7.000.000.000,00	96,43	0,00
6.2.04.04.01.0001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN	7.258.779.235,00	7.000.000.000,00	96,43	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9.667.779.235,00	9.000.000.000,00	93,09	28.265.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	99.503.377.372,00	100.171.156.607,00	100,67	89.767.998.705,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	73.604.803.832,00	0,00	102.171.156.607,00

Kota Cirebon, 05 Februari 2025
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH

H. MASTARA, SP, M.Si
NIP. 196908101990111001